

# MEMAHAMI INKLUSI KEUANGAN

Kehidupan moderen saat ini berlangsung dengan sangat kompleks dan dinamis. Salah satu konsekuensi dari fenomena tersebut adalah bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan dan dikonsumsi oleh individu, rumah tangga, kelompok orang, dan organisasi telah menjadi semakin banyak dan bervariasi. Demikian pula volume dan frekuensi transaksi keuangan berlangsung semakin tinggi.

Transaksi keuangan yang semakin intensif diperkirakan terus berlangsung di masa-masa mendatang. Intensitas tersebut didukung oleh perangkat teknologi informasi yang semakin canggih, sehingga proses transaksi dapat dilakukan dengan sangat mudah, cepat, dan seolah tanpa batas. Interaksi di antara pihak-pihak yang berpartisipasi di dalam transaksi keuangan pun tidak lagi bersifat konvensional, yaitu melalui tatap muka, tetapi telah semakin sering melalui media elektronik dari jarak yang saling berjauhan.

Situasi terkini seakan-akan telah menambah satu lagi persyaratan bagi seseorang untuk dapat hidup layak dan sejahtera secara sosial dan ekonomi di era moderen, yaitu kemampuan untuk mengakses produk dan layanan keuangan. Akses ini dibutuhkan agar individu yang bersangkutan dapat melakukan beragam transaksi keuangan dalam menjalani hidupnya secara berkualitas dari hari ke hari. Transaksi keuangan yang dimaksud dapat dilakukan untuk tujuan konsumtif maupun produktif.

Sayangnya, masih banyak penduduk yang belum memiliki akses sama sekali atau hanya memiliki akses yang terbatas terhadap berbagai Roberto Akyuwen dan Jaka Waskito - 2 produk dan layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan. Tanpa adanya akses keuangan, seorang penduduk akan menghadapi kendala untuk hidup secara produktif dan keluar dari jeratan persoalan pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Keterbatasan akses juga dijadikan sebagai faktor yang menghambat partisipasi penduduk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau negara.

Terminologi atau istilah yang terkait dengan akses keuangan yang saat ini sedang sering dibicarakan oleh berbagai pihak adalah inklusi keuangan. Suatu negara dikatakan memiliki tingkat inklusi keuangan yang tinggi apabila sebagian besar penduduknya telah menggunakan atau memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan, seperti memiliki tabungan atau mendapatkan kredit dari bank atau memiliki polis asuransi. Sebaliknya, suatu negara yang rendah tingkat inklusi keuangannya bermakna bahwa hanya sebagian kecil dari populasi penduduknya yang telah berinteraksi dengan lembaga jasa keuangan, baik bank maupun bukan bank.

ISBN 978-602-8683-22-7



9 786028 683227



Roberto Akyuwen  
Jaka Waskito

MEMAHAMI INKLUSI KEUANGAN

Roberto Akyuwen & Jaka Waskito

# MEMAHAMI INKLUSI KEUANGAN



# **MEMAHAMI INKLUSI KEUANGAN**



**Roberto Akyuwen  
Jaka Waskito**

# **MEMAHAMI INKLUSI KEUANGAN**



## MEMAHAMI INKLUSI KEUANGAN

---

Penulis : Roberto Akyuwen  
Jaka Waskito

Editor dan  
Penyelaras Bahasa : Pradiastuti Purwitorosari

Layout : Tim Kreatif Lintang Pustaka Utama

Desain Cover : Tim Kreatif Lintang Pustaka Utama

Cetakan I : Maret 2018

Penerbit : Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada  
Anggota IKAPI 077/DIY/2012

Alamat : Jl. Teknik Utara, Pogung, Sleman, Yogyakarta  
Telp (0274-564239) ext 209, Fax (0274-564239)

ISBN :

**SANKSI PELANGGARAN PASAL 72:  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).





## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas lindunganNya, penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan baik dan tiba di tangan para pembaca yang budiman.

Pemilihan judul “Memahami Inklusi Keuangan” didasarkan pada pengamatan penulis bahwa topik mengenai inklusi keuangan sedang hangat dibicarakan oleh banyak pihak dalam dua dekade terakhir. Salah satu penyebabnya adalah karena inklusi keuangan dipandang sebagai upaya yang strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan di berbagai negara. Kondisi inklusi keuangan yang tinggi di suatu negara menandakan semakin banyak penduduk di negara tersebut yang memiliki akses dan terlibat dalam aktivitas layanan keuangan oleh beragam lembaga keuangan. Adanya akses ini terbukti mampu meningkatkan kontribusi penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian persoalan pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan.

Sebaliknya, masih banyak negara yang memiliki tingkat inklusi keuangan yang relatif rendah atau bahkan sangat rendah. Kondisi ini membatasi ruang gerak penduduknya, khususnya yang bermukim di kawasan-kawasan terpencil, untuk melakukan

kegiatan ekonomi produktif yang dapat menunjang perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Indonesia pun masih menghadapi tantangan yang besar dalam memperbaiki tingkat inklusi keuangan penduduknya. Meskipun layanan keuangan telah semakin inklusif di Indonesia, namun masih banyak upaya yang perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan, khususnya oleh pemerintah dan regulator jasa keuangan.

Buku ini berupaya menjelaskan kepada para pembaca mengenai konsep dari inklusi keuangan, perkembangan inklusi keuangan, dan berbagai aspek yang terkait dengannya. Perkembangan inklusi keuangan dipaparkan dalam dua kategori, yaitu kondisi di tingkat global dan di dalam negeri. Secara khusus dibahas pula mengenai remitansi dan perkembangan teknologi keuangan yang telah membawa perubahan besar dalam upaya meningkatkan jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat.

Akhirnya, semoga materi-materi yang tertuang di dalam buku ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Yogyakarta, 19 Maret 2018

Penulis,  
Roberto Akyuwen  
Jaka Waskito

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
Satu	
PENDAHULUAN.....	1
Dua	
PENGERTIAN INKLUSI KEUANGAN.....	7
Tiga	
PERKEMBANGAN INKLUSI KEUANGAN.....	23
3.1. Inklusi Keuangan Global .....	
3.2. Inklusi Keuangan di Indonesia .....	
Empat	
INKLUSI KEUANGAN DIGITAL.....	57
Lima	
INKLUSI KEUANGAN DAN STABILITAS KEUANGAN	73



Enam  
REMITANSI DAN INKLUSI KEUANGAN ..... 85

Tujuh  
REGULASI INKLUSI KEUANGAN ..... 99

Delapan

PENUTUP ..... 111

DAFTAR PUSTAKA..... 113

TENTANG PENULIS ..... 119

## DAFTAR TABEL

3.1. Indikator Inklusi Keuangan berupa Kepemilikan dan Penggunaan Rekening di Indonesia Tahun 2014.....	35
3.2. Indikator Inklusi Keuangan berupa Pembayaran Digital dan Remitansi Domestik di Indonesia Tahun 2014.....	40
3.3. Indikator Inklusi Keuangan berupa Tabungan dan Kredit di indonesia Tahun 2014.....	43
3.4. Indeks Literasi Keuangan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2016 .....	46
3.5. Indeks Inklusi Keuangan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2016 .....	49



## DAFTAR GAMBAR

2.1.	Dampak Inklusi Keuangan .....	13
3.1.	Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Indonesia Tahun 2013 dan 2016.....	45
3.2.	Indeks Literasi Keuangan Sektoral di Indonesia Tahun 2013 dan 2016.....	47
3.3.	Indeks Inklusi Keuangan Sektoral di Indonesia Tahun 2016.....	50
3.4.	Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2016 .....	51
3.5.	Tujuan Keuangan Masyarakat Indonesia Tahun 2016	54
4.1.	Kemiskinan Ekstrim di Dunia .....	61
4.2.	Faktor-Faktor Kunci untuk Mempercepat Dampak Inklusi Keuangan.....	64
6.1.	Dampak Proses Remitansi terhadap Akses Keuangan	92
7.1.	Prinsip-Prinsip Regulasi Pro Inklusif .....	104



## DAFTAR SINGKATAN

AFI	<i>Alliance for Financial Inclusion</i>
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATM	<i>Auto Teller Machine</i>
BCG	<i>Boston Consulting Grup</i>
BFA	<i>Bankable Frontier Associates</i>
CGAP	<i>Consultative Group to Assist the Poor</i>
CGFS	<i>Committee on Global Financial Stability</i>
CIGI	<i>Center for International Governance Innovations</i>
ECB	<i>European Central Bank</i>
UN-ESCAP	<i>United Nations-Economic and Social Commission for Asia and the Pacific</i>
FATF	<i>Financial Action Task Force</i>
Fintech	<i>Financial Technology</i>
GPFI	<i>Global Partnership for Financial Inclusion</i>
GNI	<i>Gross National Income</i>
IFAD	<i>International Fund for Agricultural Development</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
ITU	<i>International Telecommunication Union</i>
KTP	<i>Kartu Tanda Penduduk</i>
KYC	<i>Know Your Customer</i>
LKM	<i>Lembaga Keuangan Mikro</i>
NPL	<i>Non Performing Loan</i>

ODI	<i>Overseas Development Institute</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Cooperation and Development</i>
OJK	Otoritas Jas Keuangan
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SNKI	Strategi Nasional Keuangan Inklusif
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UNCTAD	<i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
UNO	<i>United Nations Organizations</i>



## Satu

# PENDAHULUAN

**K**ehidupan moderen saat ini berlangsung dengan sangat kompleks dan dinamis. Salah satu konsekuensi dari fenomena tersebut adalah bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan dan dikonsumsi oleh individu, rumah tangga, kelompok orang, dan organisasi telah menjadi semakin banyak dan bervariasi. Demikian pula volume dan frekuensi transaksi keuangan berlangsung semakin tinggi.

Transaksi keuangan yang semakin intensif diperkirakan terus berlangsung di masa-masa mendatang. Intensitas tersebut didukung oleh perangkat teknologi informasi yang semakin canggih, sehingga proses transaksi dapat dilakukan dengan sangat mudah, cepat, dan seolah tanpa batas. Interaksi di antara pihak-pihak yang berpartisipasi di dalam transaksi keuangan pun tidak lagi bersifat konvensional, yaitu melalui tatap muka, tetapi telah semakin sering melalui media elektronik dari jarak yang saling berjauhan.

Situasi terkini seakan-akan telah menambah satu lagi persyaratan bagi seseorang untuk dapat hidup layak dan sejahtera secara sosial dan ekonomi di era moderen, yaitu kemampuan untuk mengakses produk dan layanan keuangan. Akses ini dibutuhkan agar individu yang bersangkutan dapat melakukan beragam transaksi keuangan dalam menjalani hidupnya secara

berkualitas dari hari ke hari. Transaksi keuangan yang dimaksud dapat dilakukan untuk tujuan konsumtif maupun produktif.

Sayangnya, masih banyak penduduk yang belum memiliki akses sama sekali atau hanya memiliki akses yang terbatas terhadap berbagai produk dan layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan. Tanpa adanya akses keuangan, seorang penduduk akan menghadapi kendala untuk hidup secara produktif dan keluar dari jeratan persoalan pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Keterbatasan akses juga dijadikan sebagai faktor yang menghambat partisipasi penduduk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau negara.

Terminologi atau istilah yang terkait dengan akses keuangan yang saat ini sedang sering dibicarakan oleh berbagai pihak adalah *inklusi keuangan*. Suatu negara dikatakan memiliki tingkat inklusi keuangan yang tinggi apabila sebagian besar penduduknya telah menggunakan atau memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan, seperti memiliki tabungan atau mendapatkan kredit dari bank atau memiliki polis asuransi. Sebaliknya, suatu negara yang rendah tingkat inklusi keuangannya bermakna bahwa hanya sebagian kecil dari populasi penduduknya yang telah berinteraksi dengan lembaga jasa keuangan, baik bank maupun bukan bank.

Megaldi de Sousa (2015) menuliskan bahwa pentingnya kedudukan inklusi keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi telah mengundang perhatian serius dari pemerintahan di seluruh negara di dunia, sebagai berikut ini.

*“Financial inclusion, or inclusive financing, generally refers to the wide availability of financial services and to their usage by low-income households and other disadvantaged groups. The concept has gained importance since the early 2000s when a direct correlation between inclusion and poverty reduction was found (Chibba 2009; Manji 2010). Today, inclusive financing is an integral part of mainstream thinking on economic development, and even the G20 has recognized its importance (G20 Leaders Declaration 2012).”*

Negara-negara yang tergolong maju telah memiliki tingkat inklusi keuangan yang tinggi. Sedangkan negara-negara yang diklasifikasikan sedang berkembang maupun terbelakang mempunyai tingkat inklusi keuangan yang relatif rendah atau bahkan sangat rendah. Tinggi rendahnya inklusi keuangan menjadi penting karena memiliki keterkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk dan aktivitas ekonomi di suatu negara.

Premis tersebut cukup beralasan jika dilihat dari kondisi aktual di lapangan. Penduduk miskin atau berpendapatan rendah yang sebagian besar menghuni wilayah terisolasi di negara-negara yang sedang berkembang dan terbelakang pada umumnya belum melek keuangan, sehingga masih jauh dari inklusi keuangan. Mereka masih memerlukan banyak edukasi dan literasi keuangan sebelum memasuki fase inklusi keuangan. Belum lagi kebutuhan infrastruktur fisik pendukungnya yang masih sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali, seperti jaringan listrik dan telekomunikasi.

Adapun penduduk perkotaan yang menjadi ciri negara-negara maju sangat dimanjakan dengan infrastruktur teknologi informasi yang tersedia di seluruh penjuru kota dan fasilitas publik. Ketersediaan ini memudahkan mereka melakukan transaksi keuangan dengan cepat, mudah, dan murah, sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih manfaat ekonomi, seperti transaksi perdagangan barang dan jasa atau jual beli saham. Akan tetapi, perlu pula dipahami bahwa penggunaan teknologi informasi juga memiliki risikonya tersendiri yang antara lain terkait dengan keamanan jaringan.

Substansi fundamental yang perlu diperhatikan oleh pemerintah di semua negara adalah lebih dari sekedar peningkatan inklusi keuangan di kalangan penduduknya. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa peningkatan inklusi keuangan dapat ditransmisikan secara efektif menjadi perbaikan indikator-indikator pembangunan sosial dan ekonomi. Inklusi keuangan yang membaik hanya bermakna apabila masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Proposisi tersebut dapat dianalogikan dengan hubungan di antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat disparitas atau kesenjangan antarkelompok penduduk atau antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat dikatakan berkualitas jika mampu berlangsung secara berkelanjutan, stabil, dan manfaatnya dirasakan oleh sebagian besar penduduk di negara yang bersangkutan. Dengan kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai dengan angka disparitas yang rendah yang berarti bahwa pembangunan ekonomi berlangsung secara lebih merata di seluruh wilayah negara tersebut.

Demikian pula peningkatan inklusi keuangan seyogyanya terjadi dengan memberikan peluang kepada penduduk yang menghuni wilayah-wilayah yang terisolasi untuk mendapatkan akses keuangan agar terbuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi mereka. Inklusi keuangan seharusnya membantu penduduk miskin dan berpendapatan rendah untuk mendapatkan peluang hidup secara produktif yang dapat memperbaiki kualitas hidup mereka secara signifikan. Untuk konteks ini, upaya peningkatan inklusi keuangan seringkali perlu diawali dengan peningkatan literasi keuangan.

Walter Bayly, *Chief Executive Officer (CEO) Banco de Crédito del Perú (BCP)* menyatakan:

*“Financial inclusion is widely recognized as one of the most important engines of economic development. Its contributions to GDP, individual and social welfare, and business creation and expansion – particularly small and medium enterprises – have been amply documented. The benefits of financial inclusion for the poor are extremely significant. Indeed, access to formal financial institutions allows poor households to expand consumption, absorb disruptive shocks, manage risks and invest in durable goods, health and education. The evidence further demonstrates that deeper financial intermediation helps improve income distribution.”*

Di Indonesia, atau negara-negara lainnya yang memiliki kemiripan kondisi geografis dengan Indonesia, penggunaan

teknologi informasi adalah suatu keniscayaan dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan. Apapun strategi yang dipilih, penggunaan jaringan telekomunikasi, dan internet beserta perangkat fisik pelengkapannya adalah pilihan yang tidak dapat dihindari. Populasi penduduk yang menghuni pulau-pulau yang tersebar demikian banyak hanya mungkin dijangkau secara efektif dan efisien dengan menggunakan perangkat teknologi informasi.

Layanan keuangan tanpa kantor, seperti *branchless banking*, menjadi pilihan karena kerepotan dan mahalnya biaya untuk membuka kantor cabang atau kantor unit atau kantor kas bank di pulau-pulau terpencil untuk melayani nasabah dalam jumlah yang sedikit. Kendala skala ekonomi ini dapat diatasi dengan menggunakan seorang agen yang dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi, seperti *mobile phone*. Tantangannya adalah menyediakan sumber energi dan jaringan untuk memastikan bahwa perangkat teknologi informasi untuk memfasilitasi produk dan layanan keuangan dapat berlangsung dengan lancar. Dalam pandangan Piyush Gupta, CEO DBS Bank menyatakan berikut ini.

*"The story of financial inclusion is a digital one – going beyond the mere proliferation of apps to support mobile banking and the rise of payment systems and agent banking, to the importance of data analytics and aligning back-end systems to support digital banking. The banks in this study that are successfully reaching the unbanked/underbanked segments are the ones that are exploring a myriad of digital channels to create convenient customer service points, while also re-thinking their operations to take advantage of cost reductions and efficiencies in technology."*

Upaya meningkatkan inklusi keuangan maupun literasi keuangan sejatinya merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat, tanpa kecuali. Akan tetapi, elemen-elemen masyarakat yang dimaksud tersebut terdapat para pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan beragam aktivitas jasa keuangan dan di antaranya lembaga pemerintah, bank sentral, otoritas jasa keuangan, dan industri jasa keuangan. Mereka inilah

yang dalam kesehariannya melaksanakan berbagai aktivitas yang berpengaruh langsung terhadap inklusi keuangan.

Banyak negara telah memiliki kebijakan strategis sebagai landasan bagi peningkatan inklusi keuangan di negaranya masing-masing. Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 September 2016 telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Strategi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi langkah-langkah strategis kementerian/ lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk menjalankan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) telah dibentuk suatu Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan SNKI, mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SNKI. Dewan Nasional ini dipimpin langsung oleh Presiden dengan Wakil Presiden selaku Wakil Ketua bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan anggotanya terdiri dari menteri koordinator lainnya dan para menteri dari sektor-sektor yang terkait.

Komitmen Pemerintah Indonesia yang tinggi terhadap upaya memperbaiki kondisi inklusi keuangan di kalangan masyarakatnya telah dijalankan dengan beragam aktivitas aktual. OJK misalnya, telah melakukan serangkaian survei secara berkala untuk memantau perkembangan literasi keuangan dan inklusi keuangan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, banyak program yang telah dijalankan bersama-sama dengan industri jasa keuangan untuk memastikan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak aneka ragam produk dan layanan keuangan dapat menjangkau sebagian besar masyarakat Indonesia.

## Dua PENGERTIAN INKLUSI KEUANGAN

Banyak pihak telah menyatakan bahwa inklusi keuangan dapat membantu masyarakat dan perekonomian karena inklusi keuangan mempunyai kemampuan untuk menciptakan eksternalitas positif. Maksudnya adalah inklusi keuangan bersumber dari peningkatan tabungan dan investasi, sehingga mendorong proses pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh lagi, inklusi keuangan menyediakan landasan untuk membangun kebiasaan menabung uang khususnya di kalangan penduduk berpendapatan rendah yang hampir sepanjang hidupnya berada dalam kondisi keterbatasan keuangan. Adanya tabungan setidaknya dapat mengurangi kerentanan mereka terhadap berbagai krisis.

Keberadaan layanan keuangan yang memadai sebenarnya memiliki banyak manfaat. *Pertama*, layanan keuangan menyediakan input yang bernilai bagi perekonomian. Melalui perbankan, sekuritas, dan asuransi, layanan keuangan memfasilitasi transaksi domestik dan internasional, memobilisasi dan menyalurkan tabungan domestik, dan memperluas ketersediaan kredit bagi perusahaan, termasuk usaha yang berskala mikro, kecil, dan



menengah (UMKM). Kedua, layanan keuangan berkontribusi terhadap output dan kesempatan kerja dengan beberapa aktivitas memiliki nilai tambah yang tinggi dan membutuhkan pekerjaan yang berkualitas. Dengan penjelasan tersebut, *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2016) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai

*“... the effective access and use by individuals and firms of available, affordable, convenient, quality, and sustainable financial services from formal providers ...”*

UNCTAD berpandangan bahwa inklusi keuangan dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan serta pembangunan sosial dan ekonomi.

Sudut pandang UNCTAD pada dasarnya sejalan dengan yang dikemukakan oleh *World Bank*. Inklusi keuangan menurut *World Bank* (2017) sebagai berikut.

*“... individuals and businesses have access to useful and affordable financial products and services that meet their needs – transactions, payments, savings, credit and insurance – delivered in a responsible and sustainable way”.*

Akses pada suatu rekening merupakan langkah pertama menuju inklusi keuangan yang lebih luas karena kepemilikan rekening memungkinkan seseorang untuk menyimpan uang serta mengirim dan menerima pembayaran. Suatu rekening dapat juga digunakan sebagai pintu masuk untuk layanan keuangan lainnya. Asumsi inilah yang menyebabkan akses penduduk dunia terhadap rekening telah menjadi fokus dari inisiatif *World Bank Group’s Universal Financial Access 2020*.

Akses keuangan memfasilitasi kehidupan masyarakat sehari-hari, selain membantu keluarga dan pengusaha membuat perencanaan untuk mengantisipasi kejadian atau situasi darurat yang tidak terduga. Sebagai seorang pemilik rekening, masyarakat cenderung terdorong untuk menggunakan layanan keuangan lainnya, seperti kredit dan asuransi, atau memulai

dan mengembangkan usaha yang dijalankan. Di samping itu, pemilik rekening juga dapat berinvestasi pada pendidikan atau kesehatan dan mengelola risiko, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidupnya.

Meskipun banyak lembaga internasional yang berupaya mendefinisikan inklusi keuangan, tetapi pada dasarnya tidak terdapat definisi yang diterima secara universal. *The United Nations Millennium Development Goal Summit 2010* mendefinisikan inklusi keuangan sebagai “*universal access, at a reasonable cost, to a wide range of financial services, provided by a variety of sound and sustainable institutions*”. Sedangkan menurut *Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)*, “*financial inclusion means that households and businesses have access and can effectively use appropriate financial services*”. Layanan keuangan dimaksud harus disediakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta di dalam lingkungan regulasi yang kondusif. Layanan keuangan disediakan oleh sejumlah penyedia layanan yang sebagian besar diantaranya bersifat komersial dan berupaya untuk menjangkau semua orang yang dapat menggunakannya, termasuk penduduk desa, penduduk miskin, orang cacat, dan kelompok masyarakat lainnya.

Pemerintah India dalam Rajendran (2013) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai proses memastikan akses terhadap layanan keuangan serta kredit yang disediakan secara mencukupi dan tepat waktu yang dibutuhkan oleh kelompok rentan, seperti bagian terlemah dari kelompok berpendapatan rendah dan dengan biaya yang terjangkau. Makna inklusi keuangan adalah penyampaian layanan keuangan kepada kelompok berpendapatan rendah, khususnya bagian populasi yang terabaikan, dengan peluang yang sama. Target utamanya adalah akses terhadap layanan keuangan untuk standar kehidupan dan pendapatan yang lebih baik.

Rajendran (2013) menyatakan bahwa mencapai inklusi keuangan tidak saja menolong pembangunan, tetapi juga untuk mencapai inklusi sosial. Inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif telah menjadi agenda prioritas dari pemerintah di semua negara berkembang. Levine (1998; 1999),

Beck, Demirguc-Kunt dan Levine (2007), Deininger dan Squire (1998), Dollar dan Kraay (2002), White dan Anderson (2001), Ravallin (2001), serta Bourguignon (2001) mencatat adanya dampak positif dari keuangan terhadap pengurangan kemiskinan. Sementara itu, Levine, Loayza, dan Beck (2000) serta Loayza dan Ranciere (2002) mengamati bahwa pengembangan bank yang lebih baik berhubungan erat dengan pertumbuhan.

Dalam penelitian lainnya, Boyd dan Prescott (1980), Greenwood dan Jovanovic (1990), Kity dan Levite (1993), Levine dan Zervous (1998) dapat menunjukkan bahwa perbaikan fungsi bank dapat mempercepat proses alokasi sumber daya dan pertumbuhan. Selanjutnya, Hans dan Deepika (2011) menegaskan bahwa alokasi sumber daya yang merata dapat tercipta bagi semua segmen masyarakat dengan adanya inklusi keuangan. Oleh karena itu, Dev (2010) mengemukakan bahwa inklusi keuangan dapat mengarahkan efisiensi yang lebih besar dari proses intermediasi keuangan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations Organizations* (UNO) telah menetapkan sejumlah tujuan dari inklusi keuangan berikut ini sejak tahun 2006.

1. Akses dengan biaya terjangkau dari semua rumah tangga dan usaha terhadap layanan keuangan yang membuat mereka menjadi layak bagi bank (*bankable*).
2. Kelembagaan yang tertata yang dipandu oleh sistem manajemen internal yang sesuai, standar kinerja industri, dan pemantauan kinerja oleh pasar serta dengan regulasi kehati-hatian sebagaimana mestinya.
3. Keberlanjutan lembaga keuangan sebagai sarana untuk menyediakan akses bagi layanan keuangan dari waktu ke waktu.
4. Penyedia layanan keuangan yang beragam yang layak, sehingga memungkinkan biaya layanan yang lebih murah (*cost effective*) dan tersedianya variasi pilihan bagi konsumen.

Selain PBB, inklusi keuangan juga telah menjadi perhatian G20, yaitu kumpulan negara-negara yang dikategorikan memiliki pangsa perekonomian yang besar dibandingkan negara-negara lainnya di dunia. Negara-negara yang tergabung di dalam G20 melalui *G20 Financial Inclusion Experts Group* memfokuskan atensinya pada perlunya inovasi dalam implementasi inklusi keuangan. Inovasi dalam konteks ini dimaknai sebagai perbaikan akses terhadap layanan keuangan bagi penduduk miskin melalui pendekatan-pendekatan baru yang aman dan tersebar secara merata. Prinsip-prinsip berikut ditetapkan sebagai upaya untuk membantu menciptakan lingkungan regulasi dan kebijakan yang memungkinkan terwujudnya inklusi keuangan yang inovatif. Lingkungan yang kondusif akan sangat menentukan kecepatan pengisian kesenjangan layanan keuangan bagi lebih dari dua juta orang yang saat ini masih terabaikan. Prinsip-prinsip inklusi keuangan ala G20 diturunkan dari pengalaman dan pembelajaran dari para pembuat kebijakan di seluruh dunia, terutama para pemimpin di negara-negara berkembang.

1. Kepemimpinan

Menanamkan komitmen pemerintah dalam hal inklusi keuangan secara luas untuk membantu penanggulangan kemiskinan.

2. Keragaman

Menerapkan pendekatan kebijakan yang mendorong kompetisi dan menyediakan insentif berbasis pasar untuk menyalurkan akses keuangan yang berkelanjutan dan penggunaan beragam layanan keuangan yang terjangkau (tabungan, kredit, pembayaran, transfer, asuransi) serta keragaman penyedia layanan.

3. Inovasi

Mendorong inovasi teknologi dan kelembagaan sebagai instrumen untuk memperluas akses dan penggunaan sistem keuangan, termasuk untuk mengatasi kelemahan infrastruktur.

4. Proteksi

Memacu suatu pendekatan komprehensif dalam bidang perlindungan konsumen dengan melibatkan pemerintah, penyedia layanan keuangan, dan konsumen.

5. Pemberdayaan

Mengembangkan literasi keuangan dan kapabilitas keuangan.

6. Kerjasama

Menciptakan suatu lingkungan kelembagaan dengan garis akuntabilitas dan koordinasi yang jelas di dalam pemerintah serta juga mendorong kemitraan dan konsultasi langsung di antara instansi pemerintah, pelaku bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

7. Pengetahuan

Menggunakan data yang disempurnakan untuk membuat kebijakan yang berbasis pembuktian, mengukur kemajuan, dan memperhatikan perkembangan yang terjadi oleh regulator dan penyedia layanan keuangan.

8. Proporsionalitas

Membangun suatu kerangka kerja kebijakan dan regulasi yang proporsional dengan risiko dan manfaat yang timbul dalam inovasi produk dan layanan yang didasarkan pada suatu pemahaman mengenai kesenjangan dan kendala yang ada pada regulasi saat ini.

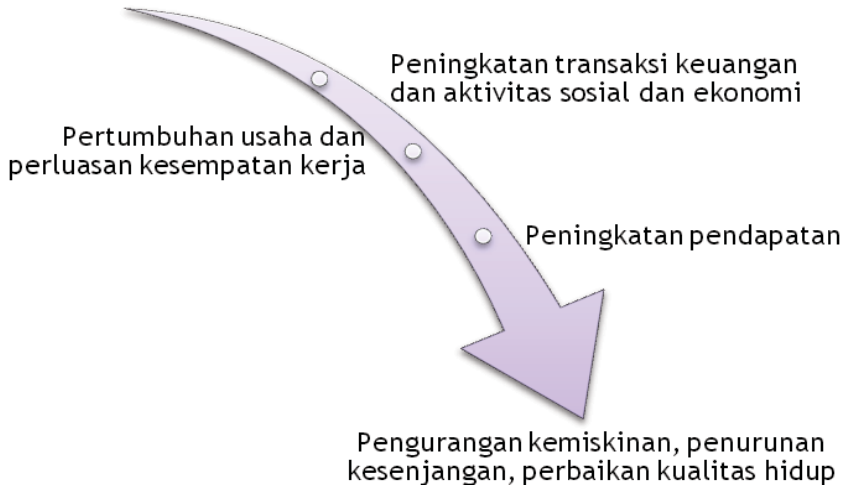
9. Kerangka Kerja

Memperhatikan kerangka kerja regulasi, merefleksikan standar internasional, dan mendukung lansekap kompetisi serta kepentingan nasional.

Berbagai sudut pandang yang dikemukakan telah memperkaya konteks inklusi keuangan dan diperkirakan akan

terus berkembang di masa mendatang. Beberapa definisi lain yang dikutip dimulai dari Merz (2010) yang menjadi editor untuk merangkum sejumlah tulisan. Dikatakan bahwa inklusi keuangan akan menyediakan peluang bagi para penduduk miskin untuk memperbaiki standar kehidupan mereka. Inklusi keuangan juga memungkinkan perusahaan, khususnya penyedia layanan keuangan untuk melakukan kebaikan sembari mendapatkan akses terhadap banyak nasabah baru yang menguntungkan di dalam pasar yang dinamis dan bertumbuh dengan cepat. Bagi suatu negara, inklusi keuangan berpotensi menstimulasi aktivitas ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup penduduknya. Inklusi keuangan yang penuh bermakna menyediakan akses bagi seluruh rumah tangga terhadap layanan keuangan moderen yang sesuai, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran serta dukungan dan edukasi yang memadai untuk membantu nasabah membuat keputusan-keputusan keuangan yang baik bagi diri mereka. Produk dan layanan keuangan yang tersedia harus dapat dijangkau, dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tersedia dalam proksimitas fisik (relatif dekat untuk dijangkau), serta diatur dan diawasi untuk melindungi konsumen/nasabah.

#### Peningkatan inklusi keuangan



**Gambar 2.1. Dampak Inklusi Keuangan**

Menurut Joshi (2011), inklusi keuangan adalah proses memastikan akses yang layak terhadap produk dan layanan keuangan yang dibutuhkan oleh kelompok rentan, seperti bagian terlemah dari kelompok berpendapatan rendah, pada biaya yang terjangkau, dalam suatu kondisi yang adil serta transparan oleh para pelaku industri keuangan. Adapun menurut FATF (2011), tatkala terdapat konsensus yang berkembang mengenai pentingnya inklusi keuangan, konsensus yang sama tidak terjadi di seputar definisinya. Definisi inklusi keuangan dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks nasional dan keterlibatan pemangku kepentingan. Secara umum, inklusi keuangan adalah mengenai penyediaan akses terhadap layanan keuangan yang memadai, aman, nyaman, dan terjangkau bagi kelompok yang kurang beruntung atau rentan, termasuk di dalamnya mereka yang berpendapatan rendah serta penduduk yang tidak tercatat dan menghuni kawasan perdesaan, yang selama ini tidak dilayani atau terabaikan dari sektor keuangan formal. Di samping itu, inklusi keuangan juga menyangkut penyediaan layanan keuangan secara luas kepada individu-individu yang pada saat ini hanya memiliki akses terhadap produk-produk keuangan dasar. Lebih jauh lagi, inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai memastikan akses terhadap layanan keuangan dengan biaya yang terjangkau dan dalam suasana yang adil.

Inklusi keuangan didefinisikan dan dikenali dengan lebih tegas oleh Morgan dan Pontines (2014). Negara-negara berpendapatan rendah cenderung melihat sebagian besar penduduk dan perusahaan di negaranya tidak mempunyai akses terhadap layanan keuangan formal. Beberapa alasan yang melandasinya antara lain:

1. terbatasnya jaringan cabang bank dan lembaga keuangan lainnya;
2. terbatasnya jumlah *auto teller machine* (ATM);
3. relatif tingginya biaya yang dibutuhkan untuk melayani tabungan dan pinjaman dalam jumlah yang kecil;



4. terbatasnya kemampuan untuk mengidentifikasi identitas nasabah;
5. terbatasnya aset yang dapat dijadikan sebagai agunan; dan
6. minimnya informasi mengenai kredit.

Morgan dan Pontines (2014) merangkung dua definisi inklusi keuangan yang dikemukakan oleh Hannig dan Jensen (2010) serta Khan (2010). Menurut Hannig dan Jensen (2010)

*“Financial inclusion aims at drawing the “unbanked” population into the formal financial system so that they have the opportunity to access financial services ranging from savings, payments, and transfers to credit and insurance.”*

Sedangkan inklusi keuangan menurut Khan (2011) berikut ini.

*“... the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as weaker sections and low income groups at an affordable cost. It primarily represents access to a bank account backed by deposit insurance, access to affordable credit and the payments system.”*

Inklusi keuangan paling lazim dipikirkan dalam terminologi akses terhadap kredit dari lembaga keuangan formal, meskipun sebenarnya konsep inklusi keuangan memiliki dimensi yang lebih banyak. Rekening formal meliputi pinjaman dan simpanan dan dapat dilihat dari sudut pandang frekuensi penggunaan, cara mengakses, dan tujuan penggunaannya. Rekening-rekening formal dapat pula berada dalam bentuk *mobile money* yang dapat diakses melalui telepon genggam. Menurut Demirguc-Kunt dan Klapper (2012), layanan keuangan lainnya selain perbankan adalah asuransi, baik untuk kesehatan maupun pertanian.

Zwedu (2014) mengungkapkan bahwa inklusi keuangan memfasilitasi akses terhadap layanan tabungan dan transfer serta penyediaan kredit dan asuransi pada biaya yang terjangkau bagi penduduk miskin. Mereka belum mengenal bank, sehingga tidak

memiliki akses terhadap sistem perbankan formal. Setidaknya terdapat dua perspektif yang dapat digunakan ketika berurusan dengan inklusi keuangan, yaitu hubungan di antara perbankan dengan inklusi dan bagaimana regulasi keuangan mempengaruhi ukuran dan komposisi sektor keuangan bagi inklusi keuangan.

Pendapat Zwedu (2014) pada dasarnya sejalan dengan tulisan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan inklusi keuangan. Pemerintah Skotlandia misalnya, mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses individu terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai. Akses yang dimaksud mencakup kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman untuk memanfaatkan layanan keuangan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, eksklusi keuangan seringkali dihubungkan dengan isu-isu sosial, seperti pendapatan rendah, tingkat kriminalitas yang tinggi, kualitas rumah yang buruk, minimnya kemampuan dasar, rumah tangga yang berantakan, kesehatan yang buruk, dan kemiskinan.

Fokus terhadap individu dalam konteks inklusi keuangan nampak pula dalam definisi yang diutarakan oleh Cheston dkk (2016). Kepemilikan rekening menjadi indikator yang paling penting dalam mengukur tingkat inklusi keuangan seorang individu, meskipun disadari bahwa inklusi keuangan adalah suatu konsep yang lebih luas. Maknanya adalah menyediakan akses terhadap layanan keuangan yang berkualitas dan cocok bagi semua orang yang dapat menggunakannya dan memastikan bahwa masyarakat memiliki alat yang dibutuhkan untuk mengelola kondisi keuangan dan kehidupannya. Inklusi keuangan lebih dari sekedar akses untuk memastikan penggunaan produk dan layanan keuangan yang berkualitas dan bahwa konsumen dapat berinteraksi di pasar melalui rantai suplai. Cheston dkk (2016) mengutip *The Center for Financial Inclusion* yang mendefinisikan inklusi keuangan dengan beberapa indikator berikut ini.

1. Akses terhadap suatu layanan keuangan yang sangat sesuai. Termasuk di dalamnya kredit, tabungan, asuransi, dan pembayaran.

2. Disediakan secara berkualitas, meliputi kenyamanan, keterjangkauan, kecocokan, serta memperhatikan perlindungan konsumen.
3. Memperhatikan kapabilitas keuangan. Nasabah terinformasi dan mampu membuat keputusan pengelolaan keuangan yang baik.
4. Bagi siapa saja yang dapat menggunakan layanan keuangan, khususnya bagi mereka yang terabaikan dan belum terlayani.
5. Melalui suatu pasar yang beragam dan kompetitif. Tersedia banyak penyedia layanan keuangan, infrastruktur keuangan yang memadai, dan kerangka kerja regulasi yang jelas.

Selanjutnya terdapat para peneliti yang menjelaskan konsep inklusi keuangan dengan menggunakan data lintas negara. Sahay dkk (2015) mengemukakan bahwa inklusi keuangan telah menjadi agenda reformasi pada tataran negara-negara secara individual maupun di tingkat internasional. Dalam perkembangannya, lebih dari 60 pemerintahan di dunia telah menetapkan inklusi keuangan sebagai suatu target resmi. Negara-negara anggota PBB telah meletakkan inklusi keuangan sebagai tujuan kunci pada agenda pembangunan pasca 2015.

Mengapa demikian? Menurut Sahay dkk (2015) dikarenakan inklusi keuangan bagi para pembuat kebijakan dilihat sebagai suatu cara untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memajukan pembangunan ekonomi. Inklusi keuangan adalah akses dan penggunaan layanan keuangan formal oleh rumah tangga dan perusahaan. Sayangnya, meskipun terdapat kemajuan, masih terdapat kesenjangan inklusi keuangan yang lebar di antara wilayah, pendapatan, gender, dan dimensi-dimensi lainnya.

Sahay dkk (2015) mencermati pula hubungan di antara upaya perbaikan inklusi keuangan dengan kondisi ekonomi makro. Diutarakan bahwa kajian empirik mengenai dampak ekonomi makro dari inklusi keuangan masih sangat minim. Kondisi ini sebagian di antaranya disebabkan oleh terbatasnya

suplai data inklusi keuangan antarnegara. Selain itu, isu inklusi keuangan belum menjadi perhatian para ekonom makro hingga terjadinya krisis keuangan di Amerika Serikat pada tahun 2007 (*sub-prime crisis*).

Inklusi keuangan adalah suatu konsep multidimensi, maka dampaknya terhadap ekonomi makro tergantung pada sifat alamiahnya. *Pertama*, inklusi keuangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akses rumah tangga dan perusahaan yang lebih baik terhadap beragam layanan perbankan dengan disertai oleh peningkatan penggunaan layanan keuangan oleh wanita, akan mendukung pertumbuhan yang lebih tinggi. Selain itu, sektor-sektor yang bergantung pada pembiayaan eksternal dapat bertumbuh lebih cepat di negara-negara dengan tingkat inklusi keuangan yang lebih tinggi. *Kedua*, bukti-bukti baru menunjukkan bahwa risiko stabilitas keuangan meningkat ketika akses terhadap kredit diperluas tanpa melalui supervisi yang memadai. Penyangga keuangan menurun dengan akses kepada kredit yang lebih luas, khususnya di negara-negara dengan pengawasan yang lebih lemah. Akhirnya, peningkatan jenis akses lainnya terhadap layanan keuangan tidak mempengaruhi stabilitas keuangan.

Perbandingan kondisi inklusi keuangan antarnegara diamati juga oleh Mehrota dan Yetman (2015). Menurut mereka, inklusi keuangan berupa akses terhadap layanan keuangan, sangat bervariasi di antara negara-negara di dunia. Di beberapa negara maju sekalipun, data hasil survei menunjukkan bahwa hampir setiap satu dari lima orang dewasa tidak memiliki rekening bank atau bentuk lainnya dari akses terhadap sektor keuangan formal (Demirguc-Kunt dan Klapper, 2012). Di banyak negara yang tumbuh cepat dan berkembang, pangsa penduduk dewasa yang belum terlayani bank dapat mencapai 90 persen. Akan tetapi, inklusi keuangan sepertinya akan terus meningkat dalam tahun-tahun mendatang karena didukung oleh pembangunan ekonomi serta inisiatif dari bank sentral dan pembuat kebijakan.

Inklusi keuangan bagi bank sentral menjadi hal yang penting dikarenakan beberapa alasan. *Pertama*, terdapat pengaruh dari inklusi keuangan terhadap pembangunan keuangan, pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan pengurangan kemiskinan, atau lingkungan ekonomi makro pada umumnya. Akses terhadap instrumen keuangan yang sesuai memungkinkan penduduk miskin untuk berinvestasi pada aset-aset fisik dan pendidikan, mengurangi ketidakmerataan pendapatan, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, inklusi keuangan mempunyai implikasi penting bagi stabilitas keuangan dan moneter. Peningkatan inklusi keuangan telah merubah perilaku perusahaan dan konsumen secara signifikan, sehingga akan mempengaruhi kebijakan moneter. Stabilitas keuangan juga akan terpengaruh karena komposisi dari penabung dan peminjam mengalami perubahan.

*The MasterCard Foundation* (2017) mencatat bahwa secara global, dari tahun 2011 hingga 2014, inklusi keuangan formal bagi penduduk dewasa mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu dari 51 persen menjadi 62 persen. Selama periode tersebut, diperkirakan sejumlah 700 juta penduduk dewasa di dunia telah membuka rekening pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya, atau dengan menggunakan penyedia jasa uang elektronik (*mobile money provider*). Meskipun demikian, di Afrika, ternyata 66 persen penduduk dewasa masih belum berpartisipasi dalam layanan keuangan (*financially excluded*). Biaya operasi untuk menyalurkan layanan keuangan kepada lebih banyak orang di benua Afrika masih yang tertinggi di dunia. Kondisi ini sangat disayangkan karena sistem keuangan yang inklusif sangat penting untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial. Keterbatasan akses terhadap layanan keuangan berkontribusi terhadap perangkap kemiskinan dan menjauhkan penduduk dari penggunaan potensi yang mereka miliki. Tingkat inklusi keuangan di Afrika diketahui masih sangat rendah dikarenakan terbatasnya infrastruktur, densitas populasi yang rendah, dan masih relatif tingginya biaya untuk melayani nasabah berpendapatan rendah.

Substansi yang sama dikemukakan pula oleh Yoo (2017). Inklusi keuangan menurutnya adalah suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat menjadi independen secara keuangan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, inklusi keuangan memiliki makna lebih luas dari hanya sekedar pinjaman. Inklusi keuangan dicapai melalui penyediaan akses terhadap produk dan layanan keuangan yang terjangkau dan sesuai. Inklusi keuangan membantu penduduk yang belum terlayani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya. Akan tetapi, inklusi keuangan bermakna lebih dari sekedar membantu mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan untuk memulai usaha yang baru. Dalam banyak kasus, penduduk miskin membutuhkan bantuan untuk menyediakan makanan, perumahan, dan pelayanan kesehatan bagi keluarganya serta pendidikan bagi anak-anak mereka. Inklusi keuangan dipandang sebagai suatu prioritas kunci dan sarana untuk mengurangi kemiskinan dalam pengertian memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk itu, *The World Bank* telah menetapkan suatu tujuan untuk memastikan akses yang meluas (*universal access*) terhadap layanan keuangan pada tahun 2020.

Regulator pun memiliki perspektif yang sama mengenai inklusi keuangan. Bank Sentral Brasil (*Banco Central Do Brasil*) (2010) menegaskan bahwa definisi inklusi keuangan harus sesuai dengan inisiatif dan proyek yang bervariasi yang mendorong inklusi keuangan. Di negara tersebut, ketika proyek strategi inklusi keuangan dimulai pada tahun 2009, definisi inklusi keuangan adalah “*to provide access to financial services that are appropriate to the needs of the population*”. Definisi ini menekankan pentingnya terminologi inklusi keuangan yang “*appropriate*”. Maknanya adalah bahwa tidak semua layanan keuangan yang ditawarkan di pasar berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi. Inklusi keuangan bukanlah tujuan akhir, namun harus dipahami sebagai cara untuk memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat para pelaku ekonomi. Inklusi

keuangan juga menjadi prasyarat bagi stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Layanan keuangan harus dapat dijangkau oleh semua penduduk dan seharusnya sesuai dengan kebutuhan mereka yang spesifik.

Inklusi keuangan berperan dalam pengurangan kemiskinan melalui dua cara yang saling berhubungan. *Pertama*, inklusi keuangan membantu mengembangkan industri keuangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, inklusi keuangan menyediakan layanan keuangan yang memadai, sehingga memperbaiki kualitas kehidupan penduduk.

*Banco Central Do Brasil* (2010) kemudian menyempurnakan definisi inklusi keuangannya menjadi *“process of effective access and use by the population of financial services that are appropriate to their needs, contributing to their quality of life”*. Definisi terakhir ini menekankan ide bahwa inklusi keuangan adalah suatu proses yang dinamis dan berjenjang yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Definisi tersebut juga mengekspresikan ide bahwa tujuan inklusi keuangan adalah berkontribusi terhadap kualitas hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan yang menargetkan inklusi keuangan harus memasukkan elemen regulasi, edukasi keuangan, dan perlindungan konsumen.

OJK sebagai regulator jasa keuangan di Indonesia mendefinisikan inklusi keuangan sebagai:

*“ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”*

Definisi tersebut tertuang di dalam Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang disediakan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK);

2. meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
3. meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; dan
4. meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

PUJK diwajibkan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dengan prinsip-prinsip yang terukur, terjangkau, tepat sasaran, dan berkelanjutan.



# Tiga PERKEMBANGAN INKLUSI KEUANGAN

## 3.1. Inklusi Keuangan Global

Tantangan untuk meningkatkan inklusi keuangan masih cukup besar, meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa tahun terakhir ini. Masih ada jutaan penduduk dewasa di seluruh dunia yang belum memiliki rekening di lembaga jasa keuangan (LJK). Lebih dari separuh di antaranya menyatakan tidak memiliki uang yang cukup sebagai alasan tidak memiliki rekening. Maknanya adalah bahwa layanan keuangan belum dapat dijangkau atau tidak dirancang agar sesuai bagi penduduk yang berpendapatan rendah. Kendala lainnya adalah jarak tempat tinggal yang jauh dari penyedia jasa keuangan, tidak memiliki dokumen yang dibutuhkan, kurang percaya terhadap penyedia layanan keuangan, dan alasan religus.

Tidak hanya konsumen individu dan rumah tangga, terdapat pula jutaan UMKM di negara-negara berkembang dan tumbuh cepat yang kekurangan pembiayaan untuk berkembang. Alasan yang mengemuka adalah ketiadaan agunan dan sejarah kredit, selain tidak resminya usaha yang dijalankan. Para pelaku UMKM ini pun tidak memiliki rekening di LJK.

Kepemilikan rekening juga menggambarkan adanya perbedaan karakteristik konsumen dalam hubungannya dengan LJK. Sebagian kelompok masyarakat lebih terabaikan dibandingkan kelompok lainnya. Misalnya kaum wanita miskin di perdesaan, populasi penduduk di wilayah terpencil yang sulit dijangkau, dan usaha mikro dan kecil yang masih beroperasi secara informal. Di samping itu, penduduk yang mengungsi atau berada di wilayah konflik termasuk populasi yang berada di luar sistem keuangan.

Inklusi keuangan telah menjadi prioritas bagi para pembuat kebijakan, regulator, dan lembaga pembangunan global. Komitmen ini antara lain terlihat dari penetapan inklusi keuangan sebagai penggerak (*enabler*) terhadap tujuh dari 17 tujuan yang tertuang di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selanjutnya negara-negara yang tergabung dalam G20 juga berkomitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan di seluruh dunia, termasuk dengan melaksanakan prinsip-prinsip inklusi keuangan secara digital (*G20 High Level Principles for Digital Financial Inclusion*). *World Bank* memandang inklusi keuangan sebagai penggerak utama bagi pengurangan kemiskinan ekstrim dan dapat memicu pemerataan kesejahteraan, sehingga berambisi untuk mencapai tujuan global berupa akses keuangan universal (*Universal Financial Access*) pada tahun 2020.

Lebih dari 55 negara telah membuat komitmen menyangkut inklusi keuangan sejak tahun 2010. Dari jumlah tersebut, lebih dari 30 negara di antaranya telah mengembangkan dan meluncurkan strategi nasional inklusi keuangan. Strategi ini pada dasarnya digunakan sebagai basis untuk mempercepat implementasi inklusi keuangan di negara yang bersangkutan.

Negara-negara yang mencapai kemajuan signifikan dalam inklusi keuangan telah menata lingkungan kebijakan dan regulasinya dengan baik serta mendorong berlangsungnya kompetisi yang memungkinkan bank maupun lembaga keuangan bukan bank untuk berinovasi dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dalam praktiknya, upaya

inovasi dan persaingan ini harus dilengkapi dengan perlindungan konsumen secara memadai untuk memastikan penyediaan layanan keuangan yang bertanggung jawab.

Peningkatan inklusi keuangan yang disertai dengan upaya inovasi dan intensitas kompetisi yang tinggi dewasa ini diwarnai dengan peningkatan penggunaan telepon seluler dan kehadiran teknologi keuangan atau *fintech* (*financial technology*). *Fintech* sejatinya merupakan perluasan penggunaan teknologi informasi pada sektor jasa keuangan. Keduanya telah memfasilitasi perluasan akses terhadap layanan keuangan bagi populasi yang tadinya sulit dijangkau serta usaha mikro dan kecil dengan biaya dan risiko yang rendah.

Penduduk dunia telah mulai menggunakan kartu tanda pengenal atau kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau digital, sehingga memudahkan mereka untuk membuka rekening di LJK dibandingkan pada masa lampau. Digitalisasi pembayaran tunai juga telah dikenalkan dan digunakan oleh lebih banyak penduduk, sehingga meningkatkan transaksi keuangan. Selain itu, layanan keuangan berbasis telepon seluler, seperti *mobile banking* atau *internet banking*, membuat akses terhadap layanan keuangan menjadi lebih nyaman, mudah, dan cepat, bahkan di wilayah-wilayah yang terpencil sekalipun. Teknologi informasi yang mampu menyimpan data dalam jumlah besar (*big data*) memungkinkan penyedia jasa keuangan untuk merancang produk-produk keuangan digital yang lebih sesuai dengan individu atau kebutuhan kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan.

Beberapa kendala atau tantangan yang dihadapi oleh negara-negara yang ingin mempercepat upaya peningkatan inklusi keuangan bagi penduduknya sebagai berikut:

1. memastikan akses dan layanan keuangan diperluas bagi populasi yang sulit dijangkau, termasuk kaum wanita dan penduduk miskin di perdesaan;
2. meningkatkan literasi dan kapabilitas keuangan di kalangan penduduk, sehingga mereka dapat memahami beragam produk dan layanan keuangan dengan baik;

3. memastikan bahwa setiap orang memiliki dokumen identifikasi diri yang valid, tetapi murah dan mudah diperoleh;
4. mengembangkan produk-produk keuangan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan konsumen tertentu;
5. menjalankan kerangka kerja perlindungan konsumen yang komprehensif serta melakukan penyesuaian terhadap regulasi dan pengawasan, termasuk dengan memanfaatkan teknologi; dan
6. keterbatasan kepemilikan KTP menimbulkan kesulitan bagi seorang individu untuk membuka rekening bank serta mengakses modal dan kredit.

Data yang paling sering digunakan dan dianggap paling mewakili kondisi inklusi keuangan di dunia adalah *Global Findex* yang diterbitkan secara berkala oleh *World Bank*. *Global Findex* menyediakan data yang mendalam mengenai bagaimana individu-individu menabung, meminjam, melakukan pembayaran, dan mengelola risiko. Basis data ini dipandang sebagai suatu basis data yang paling komprehensif mengenai inklusi keuangan yang secara konsisten mengukur penggunaan layanan keuangan oleh masyarakat di banyak negara dari waktu ke waktu. *Global Findex 2014* memuat lebih dari 100 indikator, termasuk pengelompokan data inklusi keuangan menurut gender, pendapatan, dan usia. Data tersebut dikumpulkan melalui kemitraan dengan suatu lembaga bernama *Gallup World Poll* dan dibiayai oleh *Bill & Melinda Gates Foundation*. Angka yang muncul bersumber dari hasil wawancara terhadap sekitar 150.000 responden yang berusia 15 tahun atau lebih yang dipilih secara acak dari lebih 140 negara.

Aspek yang menarik dari survei *Global Findex 2014* adalah mulai dibahasnya topik mengenai daya tahan keuangan. Ketika seorang penduduk dikatakan memiliki tempat yang aman untuk menyimpan uang dan akses terhadap kredit tatkala dibutuhkan, maka penduduk tersebut dapat mengelola risiko yang dihadapinya dengan lebih baik. Secara global, 76 persen penduduk dewasa dapat memenuhi persyaratan jumlah dana

yang dibutuhkan dalam situasi darurat, yaitu 1/20 dari *gross national income* (GNI) dalam mata uang lokal atau setara US\$ 2,600. Kepada responden juga ditanyakan mengenai sumber utama untuk mendapatkan dana tersebut. Sekitar tiga perempat dari 76 persen menjawab bahwa tabungan atau keluarga dan sahabat merupakan sumber utama dana darurat.

Di negara-negara yang sedang berkembang, 28 persen penduduk dewasa mampu menyediakan dana daruratnya dari tabungan sebagai sumber utama. Meskipun demikian, 56 persen di antaranya menyatakan bahwa mereka tidak menyimpan pada suatu lembaga keuangan. Situasi ini menggambarkan adanya peluang yang besar untuk merancang produk-produk tabungan formal yang sesuai untuk menjaga keamanan dari tabungan dan akses dalam keadaan darurat.

Pada *Global Findex 2014* (Demirguc-Kunt dkk, 2015) tercatat bahwa persentase penduduk dunia yang berusia 15 tahun atau lebih yang memiliki rekening di LJK berjumlah 62 persen. Kemudian pemilik tabungan formal sebanyak 27 persen, sedangkan peminjam formal sejumlah 11 persen. Ketiga indikator ini dikatakan sebagai indikator kunci dari inklusi keuangan.

Kondisi inklusi keuangan sangat beragam antarnegara, tetapi terungkap bahwa terdapat 700 juta penduduk dunia dewasa yang telah menjadi pemilik rekening di antara tahun 2011 dan 2014. Sementara itu, jumlah penduduk dewasa yang tidak memiliki rekening, atau mereka yang tidak berinteraksi dengan bank, menurun sebesar 20 persen menjadi dua juta orang. Proporsi penduduk dunia dewasa yang telah memiliki rekening adalah 62 persen pada tahun 2014, meningkat dari 51 persen pada tahun 2011.

Pangsa penduduk dewasa yang memiliki rekening meningkat pada hampir semua negara, baik di negara maju, sedang berkembang, maupun yang masih terbelakang. Akan tetapi, perluasan kepemilikan rekening bervariasi di seluruh dunia. Di negara-negara yang telah maju perekonomiannya, seperti *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD),

kepemilikan rekening telah hampir merata, yaitu mencapai 94 persen dari total penduduk dewasa di tahun 2014. Sebaliknya, hanya 54 persen penduduk dewasa di negara berkembang yang memiliki rekening pada periode yang sama. Kesenjangan yang besar terlihat di antara negara-negara yang sedang berkembang, dengan penetrasi kepemilikan rekening berkisar antara 14 persen di Timur Tengah hingga 69 persen di Asia Timur dan Pasifik.

Kepemilikan rekening didefinisikan sebagai memiliki suatu rekening pada suatu lembaga keuangan atau melalui penyedia *mobile money*. Kategori yang pertama termasuk rekening pada suatu bank atau jenis lembaga keuangan lainnya, seperti *credit union*, koperasi, atau lembaga keuangan mikro (LKM). Adapun kategori kedua mencakup layanan keuangan berbasis telepon seluler yang digunakan untuk membayar tagihan atau untuk mengirim dan menerima uang. Definisi rekening *mobile money* dibatasi pada layanan yang dapat digunakan tanpa suatu rekening pada lembaga keuangan tertentu. Penduduk dewasa yang menggunakan rekening *mobile money* yang terhubung dengan lembaga keuangan dianggap memiliki rekening pada suatu lembaga keuangan.

Hampir semua penduduk dewasa yang dilaporkan memiliki rekening menyatakan bahwa mereka mempunyai rekening pada lembaga keuangan. Sekitar 60 persen penduduk dewasa diketahui hanya memiliki rekening pada lembaga keuangan, sedangkan satu persen memiliki rekening pada lembaga keuangan maupun rekening *mobile money*. Satu persen lainnya hanya memiliki rekening *mobile money*. Meskipun demikian, tatkala hanya dua persen dari seluruh penduduk dewasa di dunia yang memiliki rekening *mobile money*, sekitar 12 persen penduduk dewasa di Sub-Sahara Afrika memiliki rekening, dan separuh di antaranya hanya memiliki rekening *mobile money*.

Meskipun terdapat kemajuan pesat dalam inklusi keuangan global, tetapi kesenjangan antarnegara tetap lebar. Masih banyak penduduk dunia yang belum memiliki rekening, khususnya penduduk dewasa wanita dan penduduk miskin. Sekitar 54

persen dari mereka masih belum terlayani bank hingga saat ini. Sebaliknya, 60 persen rumah tangga di negara-negara yang tergolong kaya telah terlayani bank.

Adapun kesenjangan gender tidak mengecil. Sekitar 47 persen wanita memiliki rekening pada tahun 2011, sedangkan sisanya laki-laki. Pada tahun 2014, 58 persen wanita dan 65 persen laki-laki telah memiliki rekening. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan gender yang menetap sebesar tujuh persen secara global. Sedangkan di negara-negara berkembang bahwa kesenjangan gender tetap berada pada angka sembilan persen.

Setidaknya terdapat dua upaya strategis untuk meningkatkan inklusi keuangan, jika mengacu pada data *Global Findex 2014*. *Pertama* adalah perluasan kepemilikan rekening di antara penduduk yang belum dilayani oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. *Kedua*, peningkatan penggunaan rekening yang telah dimiliki.

Telah diketahui bahwa secara global terdapat 38 persen penduduk dewasa yang belum dilayani oleh bank. Hasil survei menunjukkan bahwa di antara responden yang tidak memiliki rekening, hanya empat persen yang menyatakan bahwa alasan untuk tidak memiliki rekening adalah karena tidak membutuhkannya. Dengan menyediakan suatu kerangka kerja regulasi yang kondusif untuk memperluas kepemilikan rekening, seperti pemerian lisensi kepada agen-agen bank, rekening berbiaya rendah, dan memungkinkan evolusi teknologi, seperti *mobile money*, maka para pembuat kebijakan dapat menurunkan atau menghapus kendala terhadap inklusi keuangan.

Pemerintah maupun swasta dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menggeser pembayaran tunai yang masih banyak berlangsung saat ini menuju pembayaran rekening. Lebih dari 20 persen penduduk dunia dewasa yang belum terlayani bank, atau sejumlah lebih dari 400 juta orang, masih menerima upah atau transfer pemerintah dalam bentuk tunai. Pembayaran upah atau transfer pemerintah melalui rekening dibandingkan tunai dapat meningkatkan jumlah

penduduk dewasa yang memiliki rekening mencapai 160 juta orang. Jika hal yang sama dilakukan pada upah di sektor swasta, maka akan terjadi peningkatan pemilik rekening di kalangan penduduk dewasa hingga 280 juta orang.

Pembayaran untuk penjualan produk-produk pertanian juga menawarkan peluang untuk meningkatkan kepemilikan rekening di antara penduduk dewasa yang belum terlayani bank. Sekitar 23 persen dari penduduk dewasa yang belum terlayani bank di negara-negara berkembang, atau setara dengan 440 juta orang, menerima pembayaran dalam bentuk tunai untuk membayar penjualan produk-produk pertanian mereka. Di antara negara-negara berkembang, 36 persen dari total penduduk dewasa yang belum terlayani bank (125 juta orang) di Sub-Sahara Afrika menerima pembayaran dalam bentuk tunai. Hal yang sama terjadi bagi 33 persen penduduk dewasa (160 juta orang) di Asia Timur dan Pasifik, serta 17 persen (105 juta orang) di Asia Selatan. Pergeseran pembayaran produk-produk pertanian dari tunai menjadi transfer kepada rekening kemungkinan sulit untuk dilakukan bagi para pembeli individual. Akan tetapi, banyak orang yang menerimanya menjadi bagian dari suatu rantai nilai pertanian, dan dalam kasus ini, para pembeli komoditas berskala besar dapat mendominasi jenis pembayaran yang diterima melalui transfer.

Peluang meningkatkan kepemilikan rekening terletak pula pada upaya mendorong pihak-pihak yang mengirim atau menerima remitansi domestik hanya dalam bentuk tunai atau melalui transaksi *over-the-counter* untuk berubah menjadi pengiriman melalui rekening. Sejumlah 14 persen penduduk dewasa yang belum terlayani bank (270 juta orang) di negara-negara berkembang diketahui mengirim dan menerima remitansi domestik hanya dalam bentuk tunai. Sedangkan 5 persen lainnya (100 juta orang) melakukannya melalui *transaksi over-the-counter*. Berarti terdapat peluang yang sangat besar untuk merancang produk-produk keuangan yang sesuai, terjangkau, dan nyaman untuk memungkinkan penduduk dewasa yang belum terlayani



bank untuk mengirim atau menerima remitansi domestik melalui rekening. Peluang ini terutama sangat nyata di Sub Sahara Afrika, di mana 22 persen penduduk yang belum terlayani bank (hampir 80 juta orang) masih mengirim dan menerima remitansi domestik hanya dalam bentuk tunai dan sekitar 12 persen (40 juta orang) melakukannya melalui transaksi *over-the-counter*.

Kepemilikan rekening adalah sangat penting bagi penduduk dewasa. Namun, hal ini hanya menjadi tahap pertama dari inklusi keuangan. Tahap selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa para pemilik rekening tersebut mampu menggunakan rekening yang dimiliki untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari inklusi keuangan. Tiga perempat dari pemilik rekening telah menggunakan rekeningnya untuk menabung, melakukan penarikan dana setidaknya tiga kali dalam satu bulan, atau melakukan dan menerima pembayaran secara elektronik. Namun demikian, masih terbuka peluang untuk meningkatkan penggunaan rekening di antara penduduk dewasa yang telah dilayani oleh bank, khususnya di negara-negara berkembang.

Mengapa? Karena lebih dari 1,3 milyar penduduk dewasa di negara-negara berkembang yang memiliki rekening, atau setara dengan 58 persen dari total pemilik rekening, membayar berbagai tagihan secara tunai. Selain itu, lebih dari setengah milyar lainnya, atau 24 persen dari total pemilik rekening, membayar biaya sekolah dalam bentuk tunai. Pergeseran pembayaran dari tunai menjadi rekening berpotensi besar meningkatkan penggunaan rekening dan membuat proses pembayaran menjadi lebih nyaman.

Alasan seseorang menabung sangat bervariasi. Data *Global Findex 2014* menunjukkan bahwa 56 persen penduduk dewasa memiliki tabungan atau menyisihkan uang dalam 12 bulan terakhir. Penduduk dewasa di negara-negara maju yang berpendapatan tinggi, seperti OECD, serta di Asia dan Pasifik, pada umumnya telah melakukannya, sehingga proporsinya menjadi 70 persen. Posisi selanjutnya adalah penduduk dewasa yang memiliki tabungan di Sub Sahara Afrika yang sebanyak 60

persen. Adapun di wilayah-wilayah lainnya, pangsa penduduk dewasa yang memiliki tabungan dalam 12 bulan terakhir dilaporkan berkisar 30-40 persen.

Seperempat dari penduduk dewasa, atau hampir separuh penabung, tercatat memiliki tabungan secara formal, yaitu pada suatu bank atau jenis lembaga keuangan lainnya. Di antara para penabung, pangsa penduduk dewasa yang memiliki tabungan formal mencapai 70 persen di negara-negara maju (OECD). Angka ini hanya berkisar 40 persen di negara-negara berkembang. Jika dibandingkan dengan data tahun 2011, pangsa penduduk dewasa yang memiliki tabungan formal meningkat di semua wilayah pada tahun 2014. Pertumbuhan 7 persen terjadi di negara-negara OECD (menjadi 52 persen), sedangkan di negara-negara berkembang hanya meningkat 4 persen (menjadi 22 persen). Peningkatan tabungan formal sejalan dengan peningkatan kepemilikan rekening pada periode yang sama.

Alternatif tempat untuk menempatkan tabungan yang dilakukan oleh penduduk dewasa di negara-negara berkembang adalah secara semi formal dengan menggunakan kelompok penabung informal atau seseorang di luar keluarga. Sekitar 9 persen dari penduduk dewasa atau 17 persen penabung di negara-negara berkembang dilaporkan memiliki tabungan semi formal dalam 12 bulan terakhir. Alasan yang diberikan oleh responden untuk menabung adalah untuk usia lanjut, pendidikan, dan bisnis. Secara global, hampir 25 persen penduduk dewasa diketahui memiliki tabungan untuk kepentingan usia lanjut dan belanja pendidikan. Sedangkan 14 persen lainnya menggunakan tabungannya untuk keperluan bisnis, baik untuk memulai, mengoperasikan, atau mengembangkan usaha yang dijalankan.

Dalam hal peminjam, diketahui bahwa sekitar 42 persen penduduk dunia yang berusia dewasa telah meminjam uang dalam 12 bulan terakhir. Pangsa mereka dengan pinjaman baru, baik formal maupun informal, relatif konsisten di antara negara-negara di dunia. Demikian pula sumber pinjaman baru sangat beragam antarwilayah. Penduduk dewasa di Amerika Latin dan

Karibia diketahui memiliki pinjaman yang terendah, yaitu hanya 33 persen, sedangkan Sub Sahara Afrika tercatat sebesar 54 persen.

Di negara-negara yang penduduknya berpendapatan tinggi, suatu lembaga keuangan menjadi sumber yang utama bagi pinjaman baru yang dilakukan oleh penduduk dewasanya. Sejumlah 18 persen penduduk dewasa dilaporkan telah mengajukan pinjaman baru dari salah satu lembaga keuangan dalam 12 bulan terakhir. Di wilayah lainnya, keluarga dan teman merupakan sumber yang paling umum untuk suatu pinjaman baru. Data yang tersedia menunjukkan bahwa 29 persen penduduk dewasa di negara-negara berkembang memperoleh pinjaman dari keluarga atau teman dan hanya 9 persen yang meminjam dari suatu lembaga keuangan. Di beberapa negara, lebih banyak penduduk yang dilaporkan mendapatkan pinjaman dari suatu toko (menggunakan pembelian dengan kredit) dibandingkan dari lembaga keuangan. Kurang dari 5 persen dari penduduk dewasa di seluruh dunia yang diketahui meminjam dari pemberi pinjaman swasta yang bersifat informal. Secara umum, pangsa penduduk dewasa yang memperoleh pinjaman baru dari suatu lembaga keuangan relatif tidak mengalami perubahan selama kurun 2011-2014.

Salah satu alasan yang paling umum dikemukakan untuk melakukan pinjaman adalah untuk membeli rumah atau tanah. Investasi ini dapat dikatakan sebagai jenis investasi terbesar yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk di sepanjang hidupnya. Sejumlah 27 persen penduduk usia dewasa di negara-negara berpendapatan tinggi (OECD) memiliki hutang perumahan dari suatu lembaga keuangan. Sedangkan di negara-negara sedang berkembang hanya kurang dari 10 persen. Alasan lainnya bagi penduduk untuk melakukan pinjaman adalah untuk keperluan kesehatan, membayar biaya sekolah, atau untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan bisnis. Di negara-negara berkembang, sejumlah 14 persen penduduk dewasanya mengajukan pinjaman untuk tujuan kesehatan, 8 persen untuk pendidikan, dan 8 persen untuk bisnis. Angka ini hanya berkisar 5

persen untuk penduduk dewasa di negara-negara yang tergabung di dalam OECD.

### 3.2. Inklusi Keuangan di Indonesia

Tingkat inklusi keuangan di kalangan penduduk Indonesia masih rendah sebagaimana tercatat di dalam *Global Index 2014*. Dengan jumlah penduduk 177,7 juta jiwa dan GNI per kapita sebesar US\$ 3,580, persentase penduduk dewasa (berusia 15 tahun atau lebih) di Indonesia yang memiliki tabungan hanya 36,1 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan proporsi penduduk dewasa di kawasan Asia Timur dan Pasifik (69,0 persen) dan rata-rata penduduk dewasa di negara yang berpendapatan rendah hingga menengah (42,7 persen). Sementara itu, persentase pemilik rekening wanita dewasa di Indonesia pada tahun 2014 yang hanya 37,5 persen, juga lebih rendah dibandingkan di kedua kawasan lainnya tersebut (masing-masing 67,0 persen dan 36,3 persen).

Di kalangan penduduk miskin (40 persen termiskin), sejumlah 22 persen diantaranya telah memiliki rekening. Namun, angka ini tertinggal jauh dibandingkan negara-negara di Asia Timur dan Pasifik (60,9 persen) serta negara-negara yang berpendapatan rendah hingga menengah (33,2 persen). Berarti bahwa masih banyak upaya yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan di Indonesia untuk memastikan akses keuangan yang lebih baik bagi sebagian besar penduduk miskin. Perbaikan akses terhadap produk dan layanan keuangan diyakini akan mampu membawa mereka keluar dari perangkap kemiskinan melalui aktivitas ekonomi produktif.

Sedikit berbeda dengan karakteristik data sebelumnya, lebih banyak penduduk berusia muda di Indonesia, yaitu yang berusia antara 15-24 tahun, yang memiliki rekening (35,2 persen) dibandingkan penduduk muda di negara-negara yang berpendapatan rendah hingga menengah (34,7 persen). Akan tetapi, masih jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan persentase penduduk muda di kawasan Asia Timur dan Pasifik

yang memiliki rekening (60,7 persen). Fenomena ini menunjukkan adanya potensi untuk mendorong lebih banyak lagi kaum muda untuk berpartisipasi di dalam sektor jasa keuangan.

**Tabel 3.1. Indikator Inklusi Keuangan berupa Kepemilikan dan Penggunaan Rekening di Indonesia Tahun 2014**

No.	Indikator Inklusi Keuangan	Indonesia	Asia Timur dan Pasifik	Negara Berpendapatan Rendah dan Menengah
1.	Rekening			
1.1.	Penduduk dewasa (usia 15+ tahun)	36,1%	69,0%	42,7%
1.2.	Wanita	37,5%	67,0%	36,3%
1.3.	Penduduk dewasa 40% termiskin	22,2%	60,9%	33,2%
1.4.	Penduduk muda (usia 15-24 tahun)	35,2%	60,7%	34,7%
1.5.	Penduduk dewasa di perdesaan	28,7%	64,5%	40,4%
2.	Rekening lembaga keuangan			
2.1.	Penduduk dewasa	35,9%	68,8%	41,8%
2.2.	Penduduk dewasa tahun 2011	19,6%	55,1%	28,7%
3.	Rekening <i>mobile</i>			
3.1.	Penduduk dewasa	0,4%	0,4%	2,5%
4.	Akses terhadap rekening lembaga keuangan			
4.1.	Memiliki kartu debit	25,9%	42,9%	21,2%
4.2.	Memiliki kartu debit tahun 2011	10,5%	34,7%	10,1%
4.3.	Memiliki ATM sebagai cara utama mengambil uang	70,9%	53,3%	42,4%
4.4.	Memiliki ATM sebagai cara utama mengambil uang tahun 2011	51,1%	37,0%	28,1%
5.	Penggunaan rekening setahun lalu			
5.1.	Menggunakan rekening untuk menerima upah	6,6%	15,1%	5,6%
5.2.	Menggunakan rekening untuk transfer pemerintah	3,0%	8,1%	3,3%
5.3.	Menggunakan Rrekening untuk membayar tagihan	2,9%	11,8%	3,1%

Sumber: *Global Findex 2014*.

Selanjutnya untuk penduduk dewasa yang menghuni kawasan perdesaan di Indonesia, tingkat inklusi keuangan mereka yang ditunjukkan oleh kepemilikan rekening tercatat hanya 28,7 persen. Padahal sebagian besar penduduk Indonesia masih bermukim di wilayah perdesaan. Maknanya adalah bahwa upaya literasi keuangan dan inklusi keuangan perlu ditingkatkan di sentra-sentra pemukiman di banyak wilayah perdesaan di seluruh penjuru Indonesia. Kondisi di Indonesia tertinggal sangat jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang berpendapatan rendah hingga menengah, di mana penduduk dewasa mereka di kawasan perdesaan yang memiliki rekening telah mencapai 40 persen. Adapun persentase yang sama untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik bahkan telah mencapai 64,5 persen.

Dalam hal kepemilikan rekening di lembaga keuangan pun, penduduk dewasa di Indonesia masih tertinggal dibandingkan penduduk dewasa di kawasan Asia Timur dan Pasifik serta negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Persentase kepemilikan rekening penduduk dewasa Indonesia di lembaga keuangan baru mencapai 35,9 persen. Akan tetapi, angka pada tahun 2014 ini cukup menggembirakan apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2011 yang masih sebesar 19,6 persen.

Persentase kepemilikan rekening di lembaga keuangan yang masih rendah menyebabkan kepemilikan rekening *mobile* oleh penduduk dewasa di Indonesia juga rendah. Hanya 0,4 persen penduduk dewasa Indonesia yang memiliki rekening *mobile* pada tahun 2014. Angka ini sama dengan penduduk dewasa di kawasan Asia Timur dan Pasifik, namun lebih rendah dibandingkan penduduk dewasa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (2,5 persen). Kepemilikan rekening *mobile* perlu terus didorong peningkatan penggunaannya mengingat banyak manfaat yang bisa diperoleh, seperti kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan dalam melakukan transaksi keuangan untuk berbagai keperluan.

Data lainnya menunjukkan bahwa pada tahun 2014, 25,9 persen penduduk usia dewasa di Indonesia telah memiliki kartu debit sebagai bentuk akses terhadap lembaga keuangan. Angka ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan kondisi pada tahun 2011 (10,5 persen). Kepemilikan kartu debit oleh penduduk dewasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan penduduk dewasa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (21,2 persen), namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk dewasa yang mendiami kawasan Asia Timur dan Pasifik (42,9 persen).

Meskipun demikian, ternyata penduduk Indonesia sangat intensif dalam menggunakan kartu debatnya untuk mengambil uang di ATM. Tercatat 70,9 persen penduduk Indonesia menggunakan ATM sebagai instrumen utama untuk mengambil uang pada tahun 2014. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk dewasa di kawasan Asia Timur dan Pasifik (53,3 persen) maupun negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah (42,4 persen). Penggunaan ATM oleh penduduk dewasa di Indonesia meningkat pesat dibandingkan situasi pada tahun 2011 (51,1 persen).

Selain kepemilikan, penggunaan rekening menjadi aspek yang sangat penting untuk dicermati dalam rangka mewujudkan inklusi keuangan yang berkualitas. Tingkat penggunaan rekening di kalangan penduduk dewasa Indonesia ternyata masih sangat rendah di tahun 2014, baik untuk keperluan menerima upah dan transfer pemerintah maupun membayar beragam jenis tagihan. Diketahui hanya 6,6 persen penduduk dewasa Indonesia yang menggunakan rekeningnya untuk menerima gaji. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk dewasa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (5,6 persen), namun masih jauh lebih rendah dibandingkan persentase penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik (15,1 persen).

Adapun dalam hal penggunaan rekening untuk menerima transfer pemerintah dan membayar tagihan, tercatat persentase penduduk dewasa Indonesia adalah yang terendah. Pada tahun

2014, hanya 3,0 persen dan 2,9 persen penduduk dewasa Indonesia yang menggunakan rekeningnya untuk menerima transfer pemerintah dan membayar tagihan. Kedua persentase tersebut masih lebih rendah dibandingkan kondisi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang masing-masing sebesar 3,3 persen dan 3,1 persen. Sedangkan penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik yang menggunakan rekening untuk menerima transfer pemerintah dan membayar tagihan telah mencapai masing-masing 8,1 persen dan 11,8 persen.

Selain data-data yang telah diuraikan di atas, *Global Findex 2014* juga memaparkan banyak data lainnya yang menarik untuk didiskusikan. Data yang dimaksud mencakup penggunaan pembayaran digital, remitansi, menabung, dan kredit. Pembayaran digital dikelompokkan menjadi penggunaan kartu debit, kartu kredit, atau internet untuk melakukan pembayaran dan pembelian.

Pada tahun 2014, tercatat hanya 8,5 persen penduduk dewasa Indonesia yang menggunakan kartu debit untuk melakukan pembayaran. Persentase ini lebih rendah dibandingkan penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik (14,8 persen) dan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (9,6 persen). Kemudian persentase yang sangat rendah dijumpai dalam hal penggunaan kartu kredit untuk melakukan pembayaran, yaitu hanya 1,1 persen dari seluruh penduduk dewasa di Indonesia. Penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik (10,8 persen) dan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (2,8 persen) diketahui telah lebih banyak menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembayaran. Sedangkan untuk penggunaan internet dalam melakukan pembayaran dan pembelian, persentase penduduk dewasa Indonesia (5,1 persen) ternyata lebih tinggi dibandingkan penduduk dewasa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (2,6 persen), meskipun masih lebih rendah dibandingkan penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik (15,6 persen).

Untuk kepentingan remitansi, data yang tersedia pada tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat beberapa persentase



penduduk dewasa Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan penduduk dewasa di kawasan Asia Timur dan Pasifik maupun negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Pengiriman remitansi oleh penduduk dewasa di Indonesia misalnya, telah mencapai 17,9 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dua pembanding lainnya yang masing-masing tercatat sebesar 16,6 persen dan 14,2 persen. Pola yang sama terlihat pada pengiriman remitansi melalui lembaga keuangan, di mana persentase penduduk dewasa pengirim di Indonesia telah mencapai 52,4 persen. Sedangkan penduduk dewasa yang menjadi pengirim di Asia Timur dan Pasifik (36,9 persen) maupun negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (30,9 persen) diketahui lebih rendah.

Namun, fakta yang terbalik dijumpai dalam hal pengiriman remitansi melalui telepon seluler dan operator pengiriman uang. Pada tahun 2014, pengiriman remitansi oleh penduduk dewasa Indonesia melalui telepon seluler baru sebesar 3,6 persen. Jauh lebih rendah dibandingkan di Asia Timur dan Pasifik (8,7 persen) maupun negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (7,7 persen). Demikian pula untuk pengiriman remitansi melalui operator transfer uang, di mana hanya 8,7 persen penduduk dewasa Indonesia yang melakukannya. Sementara penduduk dewasa di negara-negara Asia Timur dan Pasifik dan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tercatat hampir sama, yaitu masing-masing sejumlah 18,5 persen dan 18,3 persen.

Penduduk dewasa Indonesia yang menerima remitansi lebih banyak dibandingkan penduduk dewasa di negara-negara Asia Timur dan Pasifik serta negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Tercatat 31,0 persen penduduk dewasa Indonesia yang menerima remitansi pada tahun 2014. Angka ini lebih tinggi dibandingkan di kawasan Asia Timur dan Pasifik (20,6 persen) serta negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (17,8 persen). Fenomena yang sama terjadi pula untuk penerimaan remitansi melalui lembaga keuangan.

**Tabel 3.2. Indikator Inklusi Keuangan berupa Pembayaran Digital dan Remitansi Domestik di Indonesia Tahun 2014**

No.	Indikator Inklusi Keuangan (Penduduk Dewasa Setahun Lalu)	Indonesia	Asia Timur dan Pasifik	Negara Berpendapatan Rendah dan Menengah
1.	Pembayaran Digital			
1.1.	Penggunaan kartu debit untuk melakukan pembayaran	8,5%	14,8%	9,6%
1.2.	Penggunaan kartu kredit untuk melakukan pembayaran	1,1%	10,8%	2,8%
1.3.	Penggunaan internet untuk melakukan pembayaran dan pembelian	5,1%	15,6%	2,6%
2.	Remitansi Domestik			
2.1.	Pengiriman remitansi	17,9%	16,6%	14,2%
2.2.	Pengiriman remitansi melalui lembaga keuangan	52,4%	36,9%	30,9%
2.3.	Pengiriman remitansi melalui telepon seluler	3,6%	8,7%	7,7%
2.4.	Pengiriman remitansi melalui operator transfer uang	8,7%	18,5%	18,3%
2.5.	Penerimaan remitansi	31,0%	20,6%	17,8%
2.6.	Penerimaan remitansi melalui lembaga keuangan	36,3%	29,0%	26,0%
2.7.	Penerimaan remitansi melalui telepon seluler	0,2%	4,9%	5,7%
2.8.	Penerimaan remitansi melalui operator transfer uang	7,9%	15,8%	16,6%

Sumber: *Global Findex 2014*.

Adapun untuk penerimaan remitansi melalui telepon seluler dan operator transfer uang, persentase penduduk dewasa Indonesia diketahui lebih rendah dibandingkan kedua kelompok negara pembanding. Penduduk dewasa Indonesia yang menerima remitansi melalui telepon seluler hanya 0,2 persen pada tahun 2014. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik maupun negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang masing-masing sebesar 4,9 persen dan 5,7 persen. Kondisi yang serupa dijumpai pula dalam hal penerimaan remitansi melalui operator

transfer uang. Rendahnya penerimaan remitansi di Indonesia melalui dua moda yang terakhir menggambarkan masih besarnya peluang untuk mengembangkan pengelolaan remitansi melalui telepon seluler dan operator transfer uang.

Tabungan dan kredit merupakan indikator penting lainnya dari inklusi keuangan. Proporsi penduduk dewasa Indonesia yang menabung di lembaga keuangan (26,6 persen) lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk dewasa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (14,8 persen), namun jauh lebih rendah dibandingkan penduduk dewasa di kawasan Asia Timur dan Pasifik (36,5 persen). Meskipun demikian, persentase tersebut telah meningkat pesat, karena pada tahun 2011 hanya 15,3 persen penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki tabungan di lembaga keuangan. Fakta yang menarik adalah bahwa persentase penduduk dewasa Indonesia yang menabung melalui kelompok atau perorangan di luar keluarga (25,2 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik (6,0 persen) dan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (12,4 persen). Data lebih dari seperempat jumlah penduduk dewasa menunjukkan adanya keunikan karakteristik sosial di Indonesia.

Penduduk dewasa diketahui menggunakan tabungannya untuk berbagai keperluan, yang dalam survei *Global Findex 2014* dikategorikan menjadi tabungan untuk keperluan hari tua, pertanian atau bisnis, dan pendidikan atau uang sekolah. Diketahui 69,3 persen penduduk dewasa Indonesia menabung seluruh uangnya yang tersisa tanpa kepentingan khusus. Angka ini lebih tinggi dibandingkan penduduk dewasa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (45,6 persen), namun masih lebih rendah dibandingkan penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik (71,0 persen). Kebiasaan menabung terus perlu ditingkatkan untuk memenuhi keperluan penduduk sendiri beserta keluarganya maupun untuk kepentingan akumulasi modal bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesadaran penduduk dewasa Indonesia untuk menabung demi hari tua (27,1 persen) pada tahun 2014 diketahui jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk dewasa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (12,6 persen). Akan tetapi, masih tertinggal dibandingkan penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik (36,5 persen). Sedangkan untuk keperluan pertanian dan bisnis, persentase penduduk dewasa Indonesia (22,6 persen) mengalahkan penduduk dewasa di kawasan Asia Timur dan Pasifik (21,3 persen) maupun negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (11,8 persen). Kecenderungan yang sama dijumpai pula pada persentase penduduk dewasa yang menabung untuk keperluan pendidikan atau membayar uang sekolah.

Terjadi peningkatan persentase penduduk dewasa Indonesia yang memperoleh kredit dari lembaga keuangan. Jika pada tahun 2011 tercatat hanya 8,5 persen, maka pada tahun 2014, jumlah penduduk dewasa yang mendapatkan kredit dari lembaga keuangan meningkat menjadi 13,1 persen. Persentase di Indonesia ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik (11,0 persen) serta negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (7,5 persen), baik pada tahun 2011 maupun 2014.

Selain dari lembaga keuangan, cukup banyak penduduk dewasa di Indonesia yang memperoleh pinjaman dari keluarga atau teman, yaitu mencapai 41,5 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan peminjam dewasa di Asia Timur dan Pasifik (28,3 persen) serta negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah (33,1 persen) yang meminjam dari sumber yang sama pada tahun 2014. Adapun untuk pinjaman dari pemberi pinjaman informal swasta, persentase penduduk dewasa di Indonesia yang 2,9 persen lebih rendah dibandingkan rata-rata penduduk dewasa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (8,5 persen). Adapun 2,5 persen penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik diketahui memperoleh kredit dari pemberi pinjaman informal swasta.

**Tabel 3.3. Indikator Inklusi Keuangan berupa Tabungan dan Kredit di Indonesia Tahun 2014**

No.	Indikator Inklusi Keuangan (Penduduk Dewasa Setahun Lalu)	Indonesia	Asia Timur dan Pasifik	Negara Berpendapatan Rendah dan Menengah
1.	Tabungan			
1.1.	Menabung di lembaga keuangan	26,6%	36,5%	14,8%
1.2.	Menabung di lembaga keuangan tahun 2011	15,3%	28,5%	11,1%
1.3.	Menabung pada kelompok atau orang lain di luar keluarga	25,2%	6,0%	12,4%
1.4.	Menabung untuk semua keperluan	69,3%	71,0%	45,6%
1.5.	Menabung untuk hari tua	27,1%	36,5%	12,6%
1.6.	Menabung untuk pertanian atau bisnis	22,6%	21,3%	11,8%
1.7.	Menabung untuk pendidikan atau uang sekolah	33,3%	30,7%	20,0%
2.	Kredit			
2.1.	Meminjam dari lembaga keuangan	13,1%	11,0%	7,5%
2.2.	Meminjam dari lembaga keuangan tahun 2011	8,5%	8,6%	7,3%
2.3.	Meminjam dari keluarga atau teman	41,5%	28,3%	33,1%
2.4.	Meminjam dari pemberi pinjaman informal swasta	2,9%	2,5%	8,5%
2.5.	Meminjam untuk berbagai keperluan	56,6%	41,2%	47,4%
2.6.	Meminjam untuk pertanian atau bisnis	11,7%	8,3%	9,2%
2.7.	Meminjam untuk pendidikan atau uang sekolah	12,2%	7,1%	10,1%
2.8.	Pinjaman perumahan pada lembaga keuangan	5,5%	8,0%	4,7%

Sumber: *Global Findex 2014*.

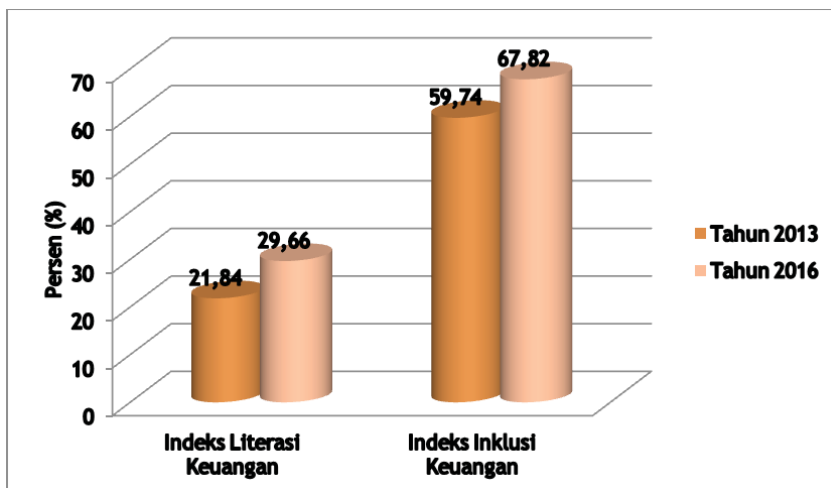
Dari segi tujuan meminjam, terdapat 56,6 persen penduduk dewasa Indonesia yang mendapatkan kredit untuk berbagai keperluan pada tahun 2014. Angka ini lebih besar dibandingkan

penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik (41,2 persen) maupun negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah (47,4 persen). Fenomena yang sama ditemukan pada alasan meminjam uang untuk keperluan pertanian atau bisnis dan untuk pendidikan atau uang sekolah. Persentase penduduk dewasa di Indonesia senantiasa lebih tinggi. Akan tetapi, untuk pinjaman perumahan pada lembaga keuangan, presentase penduduk dewasa di Indonesia yang 5,5 persen masih lebih rendah dibandingkan dengan penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik yang mencapai 8,0 persen. Sedangkan persentase penduduk dewasa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tercatat sebesar 4,7 persen untuk pinjaman perumahan pada lembaga keuangan.

OJK selaku regulator jasa keuangan di Indonesia telah melakukan dua kali survei nasional literasi dan inklusi keuangan, yaitu pada tahun 2013 dan 2016. Survei pada tahun 2013 mencakup 8.000 responden yang tersebar di 40 wilayah pada 20 provinsi. Sedangkan survei pada tahun 2016 meliputi 9.680 responden yang berdomisili di 64 kabupaten/kota pada 34 provinsi se-Indonesia.

Jumlah pertanyaan yang diajukan pada survei tahun 2016 adalah sebanyak 40 pertanyaan. Adapun profil responden terdiri dari aspek strata wilayah, gender, usia, pekerjaan, pendidikan, dan pengeluaran. Strata wilayah meliputi perdesaan dan perkotaan, sedangkan gender terdiri dari laki-laki dan perempuan. Selanjutnya usia responden dikelompokkan menjadi lima kisaran usia, yaitu antara 15-17 tahun, 18-25 tahun, 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan lebih dari 50 tahun. Pekerjaan responden terdiri dari pengusaha, pegawai dan profesional, pelajar/mahasiswa, ibu rumah tangga, pensiunan, tidak bekerja, dan lainnya. Kemudian tingkat pendidikan responden meliputi tidak sekolah/tidak lulus SD, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, dan perguruan tinggi. Kategori pengeluaran responden per bulan diklasifikasikan menjadi kelas A (lebih dari Rp 1.750.000), kelas B (1.250.001 - Rp 1.750.000), kelas C (Rp 600.001 - Rp1.250.000), kelas D (Rp 400.001 - Rp 600.000), dan kelas E (kurang dari Rp 400.000).

Hasil survei cukup menggembirakan, di mana tingkat literasi keuangan mengalami peningkatan dari 21,84 persen pada tahun 2013 menjadi 29,66 persen pada tahun 2016. Sedangkan tingkat inklusi keuangan juga membaik dari 59,74 persen menjadi 67,82 persen pada periode yang sama. OJK juga dapat mengumpulkan data mengenai indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan menurut provinsi dan sektor. Di samping itu, dapat disajikan pula data indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah.



Gambar 3.1. Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Indonesia Tahun 2013 dan 2016

Sumber: OJK.

Jika dilihat menurut provinsi, diketahui bahwa indeks literasi keuangan yang tinggi pada umumnya dijumpai di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Penduduk DKI Jakarta memiliki indeks literasi keuangan yang tertinggi (40,00 persen), kemudian diikuti oleh Jawa Barat (38,70 persen) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (38,55 persen). Provinsi di luar Jawa yang mempunyai indeks literasi keuangan yang tinggi adalah Kepulauan Riau (37,09 persen). Sebaliknya, indeks literasi keuangan terendah ditemukan di Provinsi Papua Barat (19,27 persen), Nusa Tenggara Barat (21,45 persen), dan Papua (22,18 persen). Angka-angka tersebut

menunjukkan bahwa fokus upaya perbaikan literasi keuangan perlu diarahkan ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa.

**Tabel 3.4. Indeks Literasi Keuangan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2016**

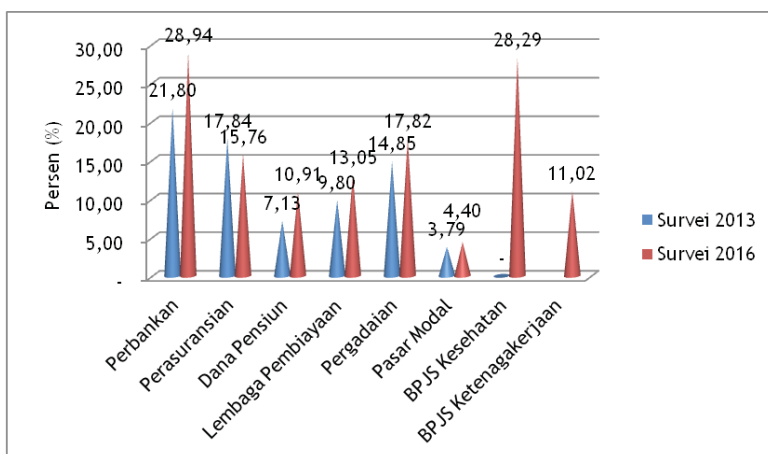
No.	Provinsi	Indeks Literasi Keuangan
1.	Nangroe Aceh Darussalam	32,73 %
2.	Sumatera Utara	32,36 %
3.	Sumatera Barat	27,27 %
4.	Riau	29,45 %
5.	Jambi	26,91 %
6.	Sumatera Selatan	31,27 %
7.	Bengkulu	27,64 %
8.	Bangka Belitung	29,45 %
9.	Lampung	26,91 %
10.	Kepulauan Riau	37,09 %
11.	DKI Jakarta	40,00 %
12.	Jawa Barat	38,70 %
13.	Jawa Tengah	33,51 %
14.	DI Yogyakarta	38,55 %
15.	Jawa Timur	35,58 %
16.	Banten	38,18 %
17.	Bali	37,45 %
18.	Nusa Tenggara Barat	21,45 %
19.	Nusa Tenggara Timur	28,00 %
20.	Kalimantan Barat	30,55 %
21.	Kalimantan Tengah	26,18 %
22.	Kalimantan Selatan	23,27 %
23.	Kalimantan Timur	30,55 %
24.	Kalimantan Utara	26,55 %
25.	Sulawesi Utara	28,73 %
26.	Sulawesi Tengah	22,55 %
27.	Sulawesi Selatan	28,36 %
28.	Sulawesi Tenggara	26,55 %
29.	Gorontalo	23,27 %
30.	Sulawesi Barat	26,91 %
31.	Maluku	26,18 %
32.	Maluku Utara	27,27 %
33.	Papua Barat	19,27 %
34.	Papua	22,18 %

Sumber: OJK.



Sedangkan apabila dikaji berdasarkan sektor, maka diketahui bahwa indeks literasi keuangan yang tertinggi pada tahun 2016 terdapat pada sektor perbankan (28,94%), kemudian diikuti oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (28,29 persen), dan pergadaian (17,82 persen). Sektor dengan indeks literasi keuangan terendah adalah pasar modal (4,40 persen). Angka indeks literasi keuangan untuk semua sektor mengalami peningkatan pada periode 2013-2016, kecuali untuk perasuransian yang mengalami penurunan.

Sektor perbankan mengalami peningkatan indeks literasi keuangan yang terbesar, yaitu dari 21,80 persen pada tahun 2013 menjadi 28,94 persen pada tahun 2016. Peningkatan indeks literasi keuangan untuk sektor perbankan jauh meninggalkan sektor-sektor lainnya yang hanya mengalami perbaikan kurang dari 5 persen pada periode yang sama. Maknanya adalah bahwa upaya yang lebih keras diperlukan untuk memperbaiki literasi keuangan di kalangan penduduk Indonesia untuk sektor keuangan non perbankan. Pada survei nasional tahun 2016, OJK mulai memasukkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai sektor yang ikut disurvei.



**Gambar 3.2. Indeks Literasi Keuangan Sektoral di Indonesia Tahun 2013 dan 2016**

Tingkat inklusi keuangan penduduk di provinsi-provinsi di kawasan barat Indonesia lebih tinggi dibandingkan di kawasan timur, kecuali untuk Provinsi Kalimantan Timur. Hasil survei nasional yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016 menunjukkan bahwa angka indeks inklusi keuangan tertinggi terdapat di DKI Jakarta, yaitu 78,18 persen. Di urutan selanjutnya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Sumatera Utara dengan indeks inklusi masing-masing sebesar 76,73 persen, 76,00 persen dan 75,27 persen. Provinsi-provinsi lainnya yang diketahui memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi adalah Kalimantan Timur (74,91 persen), Kepulauan Riau (74,55 persen), Jawa Timur (73,25 persen), Nangroe Aceh Darussalam (73,09 persen), dan Sumatera Selatan (72,36 persen).

Tingkat inklusi keuangan yang tinggi mengandung makna semakin banyak penduduk yang memiliki akses dan terlibat dalam penggunaan produk dan layanan keuangan. Sebaliknya, indeks inklusi keuangan yang rendah dimaknai sebagai terbatasnya akses penduduk terhadap beragam produk dan layanan keuangan. Keterbatasan ini akan menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan keuangan untuk berbagai transaksi, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

Provinsi-provinsi yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya memperbaiki tingkat inklusi keuangan adalah Papua Barat (58,55 persen) dan Kalimantan Selatan (59,27 persen). Kedua provinsi memiliki angka indeks inklusi keuangan terendah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Di samping itu, perhatian perlu pula diberikan untuk beberapa provinsi lainnya, seperti Papua (61,45 persen), Kalimantan Utara (61,45 persen), Nusa Tenggara Timur (62,18 persen), dan Gorontalo (62,55 persen). Upaya yang ditempuh dapat dimulai dari edukasi secara masif mengingat inklusi keuangan memiliki keterkaitan erat dengan literasi keuangan. Upaya edukasi dapat dilengkapi dengan peluncuran produk-produk dan layanan-layanan yang ramah terhadap penduduk miskin dan berpendapatan rendah, serta mereka yang mendiami kawasan-kawasan terpencil.

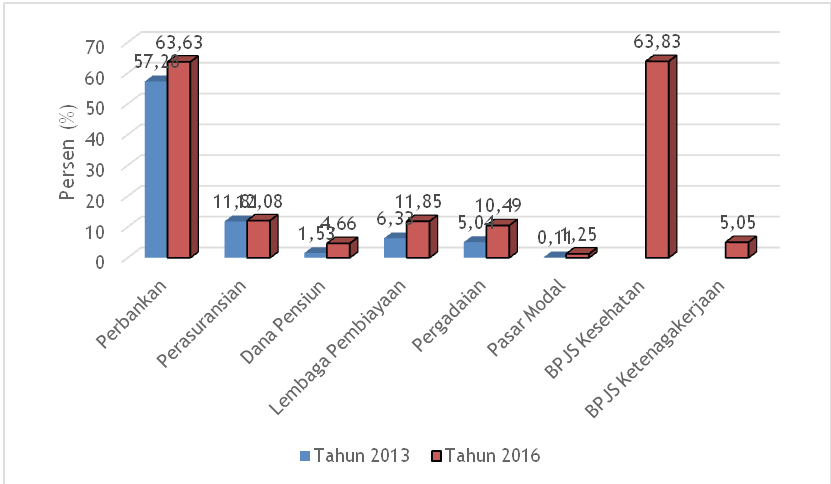
**Tabel 3.5. Indeks Inklusi Keuangan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2016**

No.	Provinsi	Indeks Inklusi Keuangan
1.	Nangroe Aceh Darussalam	73,09
2.	Sumatera Utara	75,27
3.	Sumatera Barat	66,91
4.	Riau	69,45
5.	Jambi	66,91
6.	Sumatera Selatan	72,36
7.	Bengkulu	67,27
8.	Bangka Belitung	69,09
9.	Lampung	69,82
10.	Kepulauan Riau	74,55
11.	DKI Jakarta	78,18
12.	Jawa Barat	68,31
13.	Jawa Tengah	66,23
14.	DI Yogyakarta	76,37
15.	Jawa Timur	73,25
16.	Banten	69,45
17.	Bali	76,00
18.	Nusa Tenggara Barat	63,27
19.	Nusa Tenggara Timur	62,18
20.	Kalimantan Barat	65,45
21.	Kalimantan Tengah	60,36
22.	Kalimantan Selatan	59,27
23.	Kalimantan Timur	74,91
24.	Kalimantan Utara	61,45
25.	Sulawesi Utara	68,36
26.	Sulawesi Tengah	65,09
27.	Sulawesi Selatan	68,00
28.	Sulawesi Tenggara	66,91
29.	Gorontalo	62,55
30.	Sulawesi Barat	65,45
31.	Maluku	64,00
32.	Maluku Utara	64,00
33.	Papua Barat	58,55
34.	Papua	61,45

Sumber: OJK.

Seperti halnya pada literasi keuangan, indeks inklusi keuangan sektoral yang tertinggi pada tahun 2016 dijumpai pada perbankan (63,63 persen) dan BPJS Kesehatan (63,83 persen).

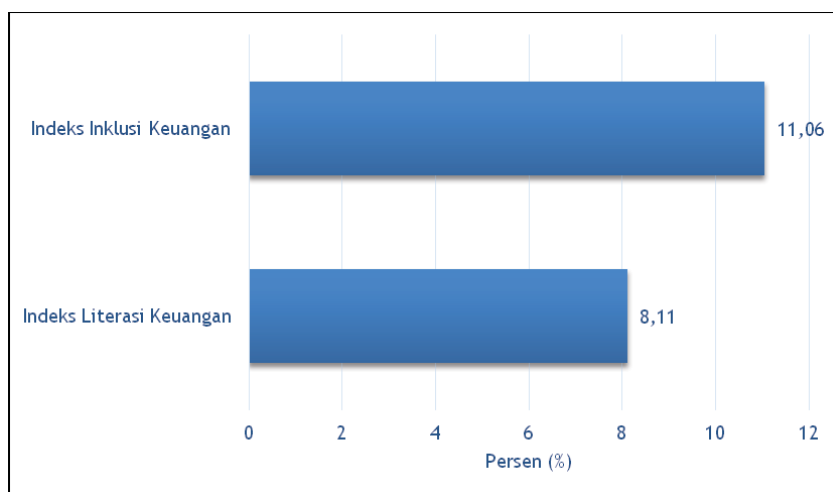
Indeks inklusi keuangan untuk perbankan tersebut meningkat dari 57,28 persen pada tahun 2013. Sedangkan untuk BPJS Kesehatan belum terdapat data empirik sebagai pembanding, karena baru pertama kali disurvei.



**Gambar 3.3. Indeks Inklusi Keuangan Sektoral di Indonesia Tahun 2016**  
Sumber: OJK

Indeks inklusi keuangan perbankan dan BPJS Kesehatan jauh meninggalkan indeks inklusi keuangan untuk sektor-sektor lainnya pada tahun yang sama. Perasuransian memiliki indeks inklusi keuangan sebesar 12,08 persen pada tahun 2016, meningkat dari 11,81 persen pada tahun 2013. Kemudian indeks inklusi keuangan untuk lembaga pembiayaan adalah 11,85 persen pada tahun 2016, meningkat dari 6,33 persen pada tahun 2013. Pasar modal merupakan sektor yang mempunyai indeks inklusi keuangan terendah, yaitu hanya 1,25 persen pada tahun 2016, sedikit meningkat dibandingkan kondisi 2013 yang sebesar 0,11 persen. Adapun sektor dana pensiun, pergadaian, dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki indeks inklusi keuangan yang tidak seburuk pasar modal, namun masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan perbankan dan BPJS Kesehatan.

Tantangan Indonesia untuk memperbaiki kondisi literasi dan inklusi keuangan terlihat dengan jelas dari hasil survei literasi dan inklusi keuangan syariah. Meskipun menjadi negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, namun indeks literasi keuangan maupun inklusi keuangan syariah di Indonesia masih memprihatinkan. Indeks literasi keuangan syariah pada tahun 2016 hanya 8,11 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah sedikit lebih tinggi, yaitu 11,06 persen. Berarti bahwa belum banyak penduduk Indonesia yang mengenal dan menggunakan beragam produk dan layanan keuangan yang disediakan oleh LJK yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah.



**Gambar 3.4. Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2016**

Sumber: OJK.

Seperti telah diperkirakan sebelumnya, indeks literasi keuangan, dan inklusi keuangan syariah yang tertinggi dijumpai di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yaitu masing-masing sebesar 21,09 persen dan 41,45 persen. Indeks tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Dua provinsi yang terdekat adalah Jawa Timur dan Maluku Utara. Indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah di Jawa

Timur adalah 29,35 persen dan 12,21 persen, sedangkan angka yang sama di Maluku Utara adalah 12,73 persen dan 24,73 persen. Maknanya adalah bahwa telah cukup banyak penduduk dewasa di Provinsi Jawa Timur yang telah melek keuangan syariah, namun hanya sedikit yang menggunakan produk dan layanan keuangan syariah. Sebaliknya, di Provinsi Maluku Utara, meskipun hanya sedikit penduduk dewasa yang memahami mengenai keuangan syariah, namun jumlah yang lebih banyak telah menggunakan beragam produk dan layanan keuangan syariah.

Sekali lagi sektor perbankan sangat mendominasi indeks literasi keuangan maupun inklusi keuangan syariah sektoral di Indonesia pada tahun 2016. Angka indeks literasi keuangan syariah mencapai 6,63 persen untuk perbankan, sedangkan indeks inklusi keuangan syariahnya adalah 9,61 persen. Kedua angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah untuk sektor perasuransian yang sebesar 2,51 persen dan 1,92 persen. Selanjutnya indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah untuk sektor pergadaian masing-masing 1,63 persen dan 0,71 persen. Adapun untuk sektor lembaga pembiayaan masing-masing 0,19 persen dan 0,24 persen.

Data lainnya yang dapat ditampilkan oleh OJK berdasarkan hasil survei literasi keuangan dan inklusi keuangan nasional tahun 2016 adalah pengetahuan penduduk mengenai karakteristik produk dan layanan jasa keuangan, kemampuan berhitung masyarakat, sikap dan perilaku masyarakat, *delivery channel* atau cara penyampaian produk dan jasa keuangan, serta sumber informasi yang mempengaruhi dan pihak yang diajak untuk berkonsultasi mengenai produk dan jasa keuangan. Mayoritas penduduk Indonesia (84,16 persen) telah mengenal fitur keuangan beserta manfaatnya (86,57 persen), dan denda yang dikenakan apabila melanggar perjanjian (66,04 persen). Namun, pangsa penduduk yang mengetahui haknya (40,75 persen) serta cara memperoleh produk dan jasa keuangan (40,58 persen) masih lebih rendah. Demikian pula dalam hal pengetahuan mengenai risiko

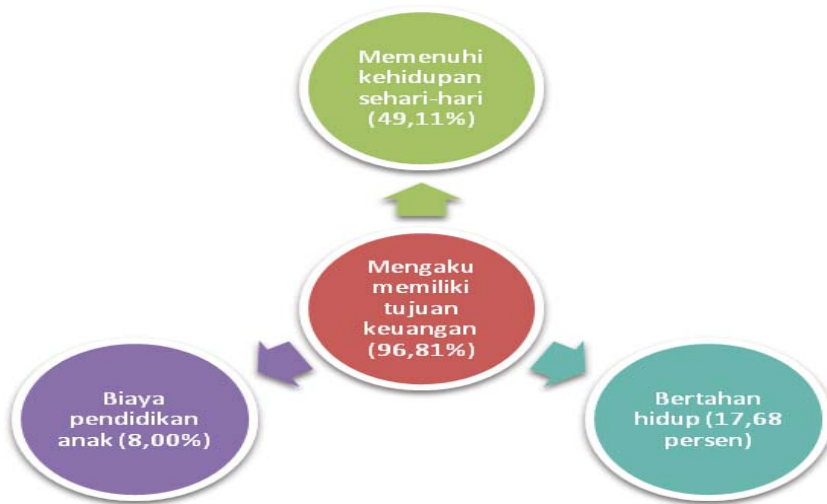
(36,25 persen), kewajiban (36,38 persen), dan biaya yang harus ditanggung (37,81 persen).

Berdasarkan hasil survei pada tahun 2016, OJK mendapati hanya 36,02 persen responden yang mewakili masyarakat Indonesia yang menyatakan memiliki kemampuan menghitung bunga, angsuran, hasil investasi, biaya penggunaan produk, denda, dan inflasi. Sejumlah 93,55 persen responden lainnya dapat menjawab soal aritmetika sederhana dengan benar. Kemudian, meskipun hanya 30,00 persen menyatakan dapat menghitung bunga, namun 62,61 persen responden ternyata dapat memberikan jawaban yang tepat mengenai perhitungan bunga.

Karakter masyarakat Indonesia yang rendah hati tampak pula dalam hasil survei mengenai inflasi. Hanya 10,98 persen responden yang menyatakan dapat menghitung nilai mata uang atau inflasi. Namun, ternyata 35,28 persen dari mereka mampu menjawab konsep inflasi dengan benar. Fenomena yang serupa muncul pula dalam hal hasil investasi. Sebanyak 62,65 persen responden memiliki pemahaman mengenai konsep investasi dan risiko, meskipun hanya 9,67 persen yang menyatakan dapat menghitung hasil investasi.

Tujuan keuangan dapat terlihat dari sikap dan perilaku masyarakat Indonesia. Hampir seluruh responden mengaku memiliki tujuan keuangan (96,81 persen). Tujuan yang dimaksud masih didominasi oleh keperluan jangka pendek, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (49,11 persen) dan mempertahankan hidup (17,68 persen). Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk membiayai pendidikan anak (8,00 persen).

Untuk mencapai tujuan keuangan tersebut, masyarakat Indonesia cenderung melakukan upaya-upaya yang berjangka pendek pula. Tercatat 75,29 persen responden memilih menabung sebagai instrumen untuk memenuhi tujuan keuangan mereka. Selanjutnya sejumlah 42,13 persen menyusun rencana keuangan yang mereka miliki, dan 38,36 persen responden lainnya bekerja atau mencari pekerjaan.



**Gambar 3.5. Tujuan Keuangan Masyarakat Indonesia Tahun 2016**  
Sumber: OJK.

Lembaga-lembaga jasa keuangan memiliki beberapa instrumen untuk melayani masyarakat. Perbankan misalnya, memiliki perangkat *phone banking* (5,81 persen), ATM (86,27 persen), dan kantor bank (94,10 persen). Data ini menunjukkan bahwa produk dan layanan keuangan di Indonesia masih lebih dominan disediakan atau digunakan melalui pendekatan konvensional. Sebagaimana dipahami bahwa cara-cara penyapaian produk dan layanan konvensional dewasa ini telah menjadi tidak efisien jika dibandingkan dengan pendekatan baru yang jauh lebih efisien, seperti dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Perusahaan asuransi juga masih lebih banyak menggunakan kantor-kantornya (88,86 persen) untuk menyampaikan produk dan jasa keuangannya kepada masyarakat. Instrumen lainnya, yaitu agen asuransi sejumlah 18,64 persen dan *bancassurance* sebanyak 2,27 persen. Sedangkan untuk lembaga pembiayaan, 75,37 persen layanannya disalurkan melalui kantor-kantor mereka yang tersebar di seluruh Indonesia. Diikuti oleh 28,90 persen melalui ATM, dan 20,66 persen lewat agen perusahaan pembiayaan.



LJK lainnya, meliputi dana pensiun, pergadaian dan pasar modal juga masih menyediakan produk dan layanannya terutama melalui kantor-kantornya, yaitu masing 92,40 persen, 87,12 persen dan 50,00 persen. Hanya 17,49 persen dan 12,05 persen produk dan layanan dana pensiun dan pergadaian yang disalurkan melalui ATM, kemudian masing-masing 1,01 persen dan 13,43 persen disajikan lewat agen. Perusahaan-perusahaan pasar modal telah menjual produknya melalui agen sebesar 37,50 persen dan 25,00 persen sisanya melalui *online trasaction*.

Lebih dari separuh masyarakat Indonesia, atau tepatnya 51,74 persen, yang menggunakan iklan televisi sebagai sumber informasi yang paling mempengaruhi mereka untuk membuat keputusan keuangan. Sedangkan 31,69 persen masyarakat menggunakan saran dari teman tatkala harus memutuskan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan keuangannya. Kemudian 23,43 persen masyarakat lainnya memanfaatkan informasi dari kantor-kantor cabang LJK untuk membuat keputusan keuangan.

Dalam hal mendapatkan tips keuangan, sejumlah 55,61 persen masyarakat Indonesia yang diwakili oleh responden menggunakan pasangannya sebagai pihak yang diajak untuk berkonsultasi. Adapun 54,39 persen memanfaatkan keluarga atau teman untuk mendapatkan tips keuangan. Pihak lainnya yang diajak berkonsultasi untuk memperoleh tips keuangan adalah orang tua sebagaimana disampaikan oleh 19,61 persen responden.

Hasil-hasil survei dan analisisnya sebagaimana didiskusikan di atas memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi literasi keuangan dan inklusi keuangan di kalangan penduduk Indonesia beserta upaya-upaya strategis yang dapat ditempuh untuk memperbaikinya. Karakteristik masyarakat menjadi elemen yang penting untuk dipahami, demikian pula dengan pendekatan yang perlu ditempuh untuk memastikan agar produk dan layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum terakses. Kondisi geografi wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari barat hingga ke timur mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi informasi

merupakan upaya yang harus ditempuh agar produk dan layanan keuangan dapat menjangkau semakin banyak penduduk dengan cepat, mudah, dan murah (efisien dan efektif).

## Empat

## INKLUSI KEUANGAN DIGITAL

Penggunaan teknologi informasi berkembang dengan pesat dewasa ini dan telah merambah semua sektor perekonomian. Secara lebih spesifik, penggunaan instrumen digital dipandang sebagai pemicu utama inovasi, kompetisi, dan pertumbuhan. Sekalipun masih banyak penduduk dunia yang belum berpartisipasi dalam layanan keuangan, peluang yang sangat besar tersedia bagi perekonomian digital untuk mendukung inklusi keuangan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (ADB, 2016).

Beberapa aspek yang mengemuka dalam pembahasan mengenai inklusi keuangan oleh berbagai kalangan antara lain meliputi:

- tren inklusi keuangan digital, serta peluang dan tantangan untuk mencapai penduduk yang belum terlayani oleh produk dan layanan keuangan;
- pendekatan yang berpusat pada konsumen dalam inklusi keuangan;
- model bisnis digital untuk mengakses layanan keuangan;
- supervisi dan regulasi layanan keuangan digital; serta
- biaya dan nilai keuangan digital.

Kemajuan dan adopsi teknologi digital dan model bisnis akan memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mencapai skala yang lebih besar dan melakukan penetrasi pada pasar baru dengan lebih intensif, di samping dapat memahami konsumen dengan lebih baik. Menurut ADB (2016), sekitar 90 persen data dunia telah dihasilkan dalam dua tahun terakhir. Pada akhir tahun 2020, sejumlah 212 milyar hal akan terkoneksi dan terdapat 6,1 milyar pengguna telepon pintar (*smartphone*) di seluruh dunia. Sebelumnya, pada tahun 2015, sekitar 51 persen beban kerja telah diproses pada dunia maya (*cloud*).

Menarik untuk menyimak apa yang diutarakan oleh Yoo (2017),

*"Imagine how much harder your life would be if you had no access to a bank. How would you manage your financial resources? How would you save for retirement or large expenses like buying a car? How would you support yourself if you got sick or injured and could not work? How could you plan for the future?"*

Kondisi sebagaimana diutarakan Yoo (2017), semakin memprihatinkan apabila membayangkan bahwa kita juga dalam kondisi miskin. Tanpa adanya penghasilan tetap atau agunan, kebanyakan bank tidak akan menyediakan akses pembiayaan. Bahkan ketika seseorang mempunyai pendapatan atau uang, jumlah simpanannya sedemikian kecil, sehingga kebanyakan bank bahkan tidak mau membukakan rekening tabungan baginya.

Menurut data *World Bank*, saat ini terdapat 2,5 milyar orang yang tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Mereka disebut sebagai *unbanked* dan kebanyakan dari mereka hidup dekat dengan atau di bawah garis kemiskinan. Lebih dari 760 juta orang di seluruh dunia hidup dengan pendapatan kurang dari US\$ 1.90 per hari dan sebagian besar diantaranya tidak mempunyai pendapatan yang tetap atau dapat diprediksi. Orang-orang ini berasal dari berbagai latar belakang. Mereka adalah guru dan pekerja rumahan yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Mereka adalah petani yang memperoleh pendapatan satu

atau dua kali dalam setahun, yaitu ketika menjual hasil panennya. Mereka dapat pula para pengusaha yang tidak mampu menambah modal yang dibutuhkan untuk memulai suatu bisnis baru dan menciptakan kesempatan kerja.

Mereka yang tidak memiliki akses kepada produk dan layanan keuangan formal tersebut perlu dibantu dengan instrumen yang mudah, cepat dan murah. Perangkat digital dapat membantu efisiensi dalam transaksi keuangan, karena membuat penyedia layanan keuangan lebih mudah beradaptasi terhadap kebutuhan keuangan bagi konsumen yang beragam, termasuk penduduk miskin atau berpendapatan rendah dan mereka yang menghuni kawasan terpencil. Teknologi digital dan *big data* memungkinkan para penyedia layanan keuangan untuk melayani kelompok yang terabaikan (*financially excluded*) secara lebih efektif dengan menggunakan pendekatan yang berpihak pada konsumen (*consumer-centric approach*).

Teknologi baru, seperti Fino di India, membantu menyediakan akses terhadap layanan keuangan yang terjangkau bagi lebih dari 50 juta orang yang hidup dalam kondisi memprihatinkan dan berpendapatan rendah (*the bottom of the economic pyramid*). Pemain teknologi keuangan atau *financial technology (fintech)* seperti bKash di Bangladesh telah menjangkau lebih dari 22 juta orang dan sekarang tumbuh lebih cepat lagi dibandingkan M-Pesa di Kenya. Menurut Carol Realini, penulis buku *Financial Inclusion at the Bottom of the Pyramid*, dalam lima tahun ke depan, planet bumi akan melihat perubahan terbesar yang pernah terjadi, yaitu tiga milyar orang akan menggunakan internet, terutama melalui telepon seluler mereka. Hal ini akan menyediakan peluang akses global bagi perbankan dan layanan keuangan digital (ADB, 2016).

Kondisi tersebut hanya mungkin berlangsung apabila terdapat sistem identifikasi penduduk di tingkat nasional, sistem koneksi antarpenyedia jasa keuangan yang efisien dan cepat, lingkungan regulasi yang mendukung dan terbuka, serta dukungan pemerintah bagi adopsi layanan keuangan digital.

Dalam konteks ini, rancangan yang berfokus pada kepentingan konsumen merupakan kunci bagi adopsi dan penggunaan layanan keuangan. Digitalisasi akan memainkan peran yang vital dalam meningkatkan akses yang inklusif terhadap produk dan layanan keuangan bagi penduduk miskin di seluruh dunia.

Layanan keuangan digital mengalami perubahan dengan cepat dengan adanya teknologi baru, pemain baru, dan kemitraan baru. Tatkala pengembangan baru ini membawa peluang yang besar, para pembuat kebijakan dan regulator perlu memahami dan mengatur keseimbangan di antara tantangan dan risiko dengan manfaat yang ditawarkan. Langkah ini tidak mudah dijalankan sebagaimana terbukti dari fakta bahwa meskipun akses terhadap layanan keuangan digital sedang meningkat di Asia dan Pasifik, tetapi penggunaannya tetap rendah di banyak wilayah. Untuk menjangkau penduduk yang tergolong *unbanked* atau *underbanked*, para penyedia layanan keuangan perlu memikirkan kembali cara operasional mereka. Solusi-solusi yang ditawarkan perlu dipusatkan pada nasabah, yaitu dengan memperhatikan kebutuhan, preferensi dan perilaku mereka.

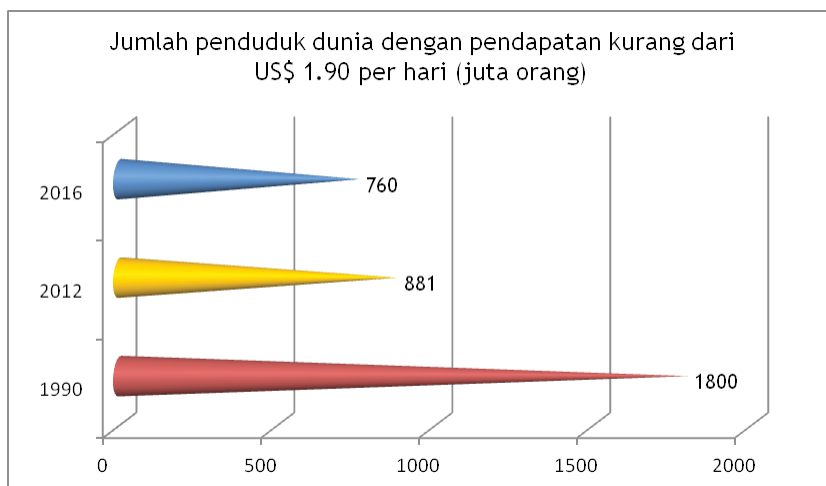
Keuangan inklusif membutuhkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut penyampaian layanan keuangan yang terjangkau dan sesuai. Melalui inovasi-inovasi dalam teknologi informasi dan telekomunikasi, saat ini terdapat kemitraan dan model bisnis baru dalam menyajikan model layanan keuangan yang membantu menjangkau nasabah yang lebih terpencil dan berpendapatan lebih rendah. Model layanan keuangan digital yang baru ini mendatangkan sejumlah peluang dan sekaligus tantangan. Lito Villanueva dari FINTQ (ADB, 2016) menyatakan bahwa *“Financial symbiosis (fin-biosis) is looking at combining the strengths of fintechs and financial institutions”*.

Mengapa segala daya upaya perlu ditempuh untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat? Alasan sederhananya adalah bahwa penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pinjaman, rekening tabungan, asuransi, dan beragam layanan keuangan lainnya, akan termarginalisasi dari masyarakat

atau komunitasnya. Mereka yang tidak mempunyai akses tidak akan mampu mewujudkan potensi dirinya.

Tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan membuat seorang penduduk lebih sulit untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Tanpa akses pada rekening tabungan, suatu keluarga tidak bisa mendapatkan obat untuk mengobati penyakit ketika sakit atau tidak dapat membayar biaya sekolah bagi anaknya. Akses keuangan akan membuka peluang bagi mereka untuk hidup dengan lebih baik.

Tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal tidak semata-mata menjadi persoalan di negara-negara yang sedang berkembang. Di Amerika Serikat sebagai contoh, usaha kecil menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk di negara tersebut. Tepatnya dua dari setiap tiga lapangan pekerjaan baru disumbangkan oleh usaha kecil. Akan tetapi, akses terhadap modal keuangan tetap menjadi kendala utama bagi para pelaku usaha kecil di sana. Sekitar 70 persen aplikasi pinjaman usaha kecil telah ditolak oleh lembaga-lembaga keuangan tradisional. Keterbatasan akses terhadap layanan keuangan tidak hanya menghambat potensi manusia, namun juga menjadi kendala



**Gambar 4.1. Kemiskinan Ekstrim di Dunia**

Sumber: Bank Dunia (2016).

bagi penciptaan kesempatan kerja, menghalangi pertumbuhan ekonomi, dan melanggengkan lingkaran kemiskinan.

Inklusi keuangan adalah suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu penduduk menjadi independen secara keuangan dan mandiri secara ekonomi. Hal ini dapat dipenuhi dengan menyediakan akses terhadap produk dan layanan keuangan yang terjangkau dan relevan. Keuangan inklusif membantu populasi yang belum terlayani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Dalam konteks ini, keuangan inklusif memiliki makna lebih dari sekedar pinjaman uang dari LJK. Penduduk tidak hanya membutuhkan uang, tetapi juga makanan, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Inklusi keuangan dapat dipandang sebagai prioritas dan kunci untuk mengurangi kemiskinan dalam pengertian memastikan berlangsungnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Upaya-upaya peningkatan inklusi keuangan yang berhasil pada umumnya merupakan kombinasi layanan yang mencakup penyediaan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dasar, adanya asuransi, pembukaan rekening tabungan, dan pelatihan literasi keuangan. Bukti yang paling kuat untuk melihat keberhasilan inklusi keuangan adalah dengan melihat dampaknya pada tingkat individu.

Untuk itu, dalam rangka memenuhi layanan keuangan bagi semua, para penyedia layanan keuangan memerlukan kapasitas untuk melayani kebutuhan penduduk yang masih terabaikan. Tanpa kapasitas yang memadai, banyak pihak yang menyatakan bahwa target pengurangan kemiskinan ekstrim global pada tahun 2030 yang ditetapkan dalam SDGs tidak akan tercapai. Upaya untuk membawa layanan keuangan tradisional ke perdesaan dengan densitas populasi yang rendah dan infrastruktur yang minim tidak akan efektif dan efisien. Bank-bank komersial sering mengabaikan pelayanan terhadap penduduk yang hidup dalam kemiskinan dikarenakan biaya infrastruktur untuk membuka kantor cabang sangat mahal dan demikian pula biaya-biaya yang timbul untuk memproses transaksi-transaksi berskala kecil relatif tinggi.



Inklusi keuangan dapat memainkan peran penting dalam mengakhiri kemiskinan ekstrim yang di Indonesia dikenal dengan istilah fakir miskin. Ketersediaan layanan keuangan bagi penduduk yang belum memiliki akses keuangan akan mengarah pada peningkatan aktivitas ekonomi pada wilayah-wilayah tempat penduduk tersebut tinggal. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh *Boston Consulting Group* (BCG), menunjukkan bahwa layanan keuangan melalui penggunaan telepon seluler di beberapa negara mampu meningkatkan produk domestik bruto (PDB) hingga 5 persen dan menciptakan lebih dari 4 juta pekerjaan baru di negara-negara tersebut.

Solusi-solusi yang berbasis teknologi, seperti *mobile banking* dan ATM, menggunakan digitalisasi yang memungkinkan para penyedia layanan keuangan menjangkau penduduk di perdesaan dan daerah terpencil dengan lebih mudah. Apalagi data yang ada saat ini menunjukkan bahwa dari sekitar 2,5 juta penduduk yang belum memiliki akses keuangan, sejumlah satu juta penduduk diantaranya telah memiliki telepon seluler. Digitalisasi menghubungkan manusia, proses, dan segala sesuatu secara cerdas, sehingga menyediakan akses pada lebih banyak data untuk membuat keputusan-keputusan yang cerdas pula. Inilah makna dari revolusi digital.

Inklusi keuangan adalah tahap yang penting dalam memampukan setiap orang untuk terlibat dalam perekonomian digital dan mendapatkan manfaat yang besar dari peluang yang tercipta melalui digitalisasi. Demikian pula sebaliknya, digitalisasi merupakan kunci untuk mempercepat dampak inklusi keuangan yang disebabkan beberapa alasan berikut ini.

1. Skala bagi lebih banyak orang melalui suatu jejaring, layanan, dan peralatan yang terkoneksi.
2. Menjangkau daerah perdesaan dan terpencil, khususnya populasi yang paling rentan (penduduk desa, penduduk berusia muda, penduduk berpendapatan rendah, wanita, dan lain-lain).

3. Efisiensi yang lebih besar, sehingga penyedia layanan keuangan dapat mengelola transaksi-transaksi kecil dalam jumlah yang besar dengan biaya yang terjangkau.
4. Memungkinkan kemandirian yang lebih cepat bagi penduduk yang belum memiliki akses keuangan.
5. Replikasi terhadap hal-hal yang telah dipelajari, sehingga solusi-solusi yang dihasilkan dapat digunakan pula pada berbagai bidang dan wilayah di seluruh dunia.



**Gambar 4.2. Faktor-Faktor Kunci untuk Mempercepat Dampak Inklusi Keuangan**

Sumber: Yoo (2017).

Menurut data yang bersumber dari *McKinsey Global Institute* (2016), dua milyar orang dan 200 juta usaha di negara-negara tumbuh cepat saat ini memiliki akses yang terbatas terhadap tabungan dan kredit. Atau sekalipun telah memiliki akses, penduduk di negara-negara tersebut hanya dapat membayar produk-produk yang terbatas. Teknologi digital yang menyebar dengan cepat saat ini dapat menawarkan suatu peluang untuk menyediakan layanan keuangan dengan jauh lebih murah, sehingga menguntungkan, serta mempercepat inklusi keuangan dan memungkinkan pendapatan dari produktivitas yang lebih tinggi di seluruh dunia.

Kuangan digital berpotensi menyediakan akses terhadap layanan keuangan bagi 1,6 milyar orang di negara-negara tumbuh cepat (*emerging economies*), di mana lebih dari separuh diantaranya adalah wanita. Keuangan digital juga dapat meningkatkan volume pinjaman yang diperluas bagi individu dan usaha sebesar US\$ 2.1 trilyun dan memungkinkan pemerintah untuk menghemat US\$ 110 milyar per tahun dengan mengurangi kebocoran dalam pengeluaran dan penerimaan pajak. Para penyedia layanan keuangan akan mendapatkan keuntungan juga, yaitu menghemat biaya langsung sebesar US\$ 400 milyar setiap tahunnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatannya mencapai US\$ 4.2 trilyun.

*McKinsey Global Institute* (2016) menghitung bahwa penggunaan keuangan digital yang meluas dapat meningkatkan PDB dari akumulasi semua negara-negara tumbuh cepat sebesar US\$ 3.7 trilyun per tahun pada tahun 2025. Angka ini lebih tinggi 6 persen jika dibandingkan dengan pertumbuhan seperti biasanya. Hampir dua per tiga dari peningkatan tersebut dihasilkan dari peningkatan produktivitas pada usaha-usaha keuangan maupun non-keuangan dan pemerintah yang menggunakan pembayaran digital. Sepertiga sisanya bersumber dari tambahan investasi yang memperluas inklusi keuangan pada penduduk serta UMKM. Terdapat pula manfaat yang diperoleh dari penghematan waktu yang memungkinkan individu dapat bekerja lebih lama. Tambahan PDB pada akhirnya diperkirakan dapat menciptakan hingga 95 juta pekerjaan di semua bidang.

Masih banyak penduduk dan usaha kecil di negara-negara yang terbelakang, sedang berkembang, dan tumbuh cepat dewasa ini tidak berpartisipasi secara penuh dalam sistem keuangan formal. Mereka melakukan transaksi keuangan secara eksklusif dalam bentuk tunai, tidak memiliki cara yang aman untuk menabung atau menginvestasikan uang, serta tidak memiliki akses terhadap kredit selain kepada rentenir dan jaringan perorangan. Mereka yang telah memiliki rekening sekalipun, kemungkinan memiliki keterbatasan dalam memilih produk-produk keuangan dan menggunakannya dengan biaya yang relatif mahal. Sebagai

konsekuensinya, kekayaan mereka tersimpan di luar sistem keuangan serta kredit menjadi langka dan mahal. Situasi ini membuat penduduk terjauhkan dari keterlibatan pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang sebenarnya dapat merubah kualitas hidup mereka dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Keuangan digital membawa suatu solusi transformasional, yaitu dapat dilaksanakan tanpa membutuhkan investasi yang besar. Bank, perusahaan telekomunikasi, dan penyedia layanan lainnya telah menggunakan telepon seluler dan teknologi lainnya untuk menjalankan layanan keuangan dasar bagi konsumen atau nasabahnya. Penggunaan saluran digital dibandingkan pembukaan kantor-kantor cabang telah mengurangi biaya bagi para penyedia layanan keuangan dan meningkatkan kenyamanan bagi pengguna, serta membuka akses keuangan bagi semua lapisan atau tingkat pendapatan masyarakat dan penduduk yang mendiami wilayah perdesaan yang terpencil. Bagi para pelaku usaha, penyedia layanan keuangan, dan pemerintah, pembayaran digital, dan layanan keuangan digital dapat menghapus inefisiensi dan meningkatkan produktivitas.

Jaringan seluler saat ini telah menjangkau lebih dari 90 persen penduduk di negara-negara tumbuh cepat. Meskipun kepemilikan telepon seluler masih tertinggal dibandingkan jangkauan jaringan, tetapi dapat bertumbuh dengan cepat. Hampir 80 persen penduduk dewasa di negara-negara tumbuh cepat telah memiliki telepon seluler pada tahun 2014. Sedangkan penduduk dewasa di negara-negara tersebut yang memiliki rekening keuangan baru sebesar 55 persen. Kepemilikan telepon seluler diperkirakan akan mencapai lebih dari 90 persen penduduk dewasa pada tahun 2020.

Bagi para penyedia layanan keuangan, biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan rekening digital bagi nasabah dapat berkisar 80 persen hingga 90 persen lebih rendah dibandingkan menggunakan kantor cabang (fisik). Penggunaan teknologi digital memungkinkan penyedia layanan keuangan dapat melayani lebih banyak nasabah secara menguntungkan,

dengan beragam produk dan harga yang lebih murah. Dari waktu ke waktu, semakin banyak orang yang menggunakan rekening digital untuk menyimpan uang mereka.

Pada saat sejumlah orang atau para pelaku usaha melakukan pembayaran secara digital, mereka menciptakan jejak data mengenai penerimaan dan pengeluaran. Data ini memungkinkan penyedia jasa keuangan menilai risiko kredit mereka, sehingga dapat menentukan kebijakan pinjaman dan asuransi bagi sekumpulan calon peminjam secara meyakinkan (*credit rating*). Penyedia layanan keuangan dapat juga mengumpulkan pengembalian pinjaman secara digital dan mengirimkan pesan kepada para peminjam apabila mereka belum melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Produk tabungan, kredit dan asuransi yang sesuai dapat disalurkan secara efisien dan tepat sasaran bahkan bagi penduduk yang berpendapatan rendah atau bagi usaha yang berskala sangat kecil (mikro).

Setidak-tidaknya terdapat tiga aspek yang diperlukan untuk menangkap manfaat dari keuangan digital sebagaimana diutarakan oleh *McKinsey Global Institute* (2016). Pertama adalah membangun infrastruktur yang luas dan kuat. Infrastruktur yang dibutuhkan untuk keuangan digital dapat dipenuhi dengan memanfaatkan prasarana dan sarana yang sudah ada atau dapat diimplementasikan dengan biaya murah dan lebih cepat dibandingkan jenis-jenis infrastruktur lainnya, seperti listrik atau transportasi. Komponen-komponen vital yang dibutuhkan dimulai dari konektivitas dan kepemilikan yang luas. Komponen selanjutnya adalah infrastruktur pembayaran digital pada tingkat nasional dan keberadaan sistem identitas perorangan yang baik.

Aspek kedua adalah memastikan pasar layanan keuangan yang dinamis dan berkelanjutan. Infrastruktur digital yang terpasang membutuhkan dukungan dari lingkungan bisnis yang berkelanjutan yang mencakup bank dan lembaga keuangan lainnya, serta perusahaan telekomunikasi, manufaktur *handset*, perusahaan *fintech*, dan bisnis lainnya, seperti pedagang eceran (*retail*). Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah

regulasi layanan keuangan yang proporsional. Selain itu, perlu diciptakan lingkungan yang kondusif bagi persaingan dan mendorong para penyedia layanan untuk menawarkan layanan keuangan dan produk baru yang beragam.

Aspek yang ketiga adalah menawarkan produk-produk keuangan kepada pihak-pihak yang menginginkan adanya alternatif. Masyarakat akan menggunakan layanan keuangan digital hanya jika mereka menginginkannya sebagai pengganti layanan keuangan yang telah ada atau mempunyai insentif untuk melakukannya. Individu dan pelaku usaha saat ini menggunakan uang tunai dan berbagai pengaturan keuangan informal untuk alasan yang baik, dan mekanisme ini terkadang memainkan peran budaya dan sosial. Produk-produk keuangan digital yang baru harus menawarkan keuntungan yang nyata khususnya dalam hal biaya dan kegunaan bagi pihak-pihak yang menggunakannya.

Manfaat keuangan digital dalam jangka panjang lebih dari sekedar perluasan akses, menurunkan biaya, dan meningkatkan kenyamanan dalam bertransaksi. Seperti halnya listrik atau jalan, suatu jaringan pembayaran digital merupakan bagian dari infrastruktur dasar dari suatu perekonomian yang memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha untuk bertransaksi satu dengan lainnya tanpa batas. Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu perjalanan yang panjang, namun solusi keuangan digital dapat mempercepat prosesnya dengan biaya yang relatif terjangkau. Digitalisasi keuangan merupakan upaya bertahun-tahun bagi banyak negara. Tetapi, sekali mereka memulainya, maka hasil yang diperoleh akan segera terlihat dalam bentuk pertumbuhan yang lebih tinggi, inovasi yang lebih banyak, dan inklusi yang lebih baik.

Teknologi digital dapat melakukan perubahan layanan keuangan melalui tiga cara. *Pertama*, solusi keuangan digital dapat memperluas akses konsumen dan jangkauan dari penyedia layanan. Kebanyakan penduduk dunia saat ini telah memiliki telepon seluler yang berarti mereka telah siap untuk melakukan akses terhadap layanan keuangan. *Kedua*, teknologi digital dapat

menurunkan biaya untuk menyediakan layanan keuangan, sehingga merubah paradigma para penyedia layanan keuangan, yaitu membuat mereka dapat memperoleh keuntungan sekalipun harus melayani penduduk miskin dan konsumen yang tinggal di daerah-daerah terpencil. *Ketiga*, teknologi digital memungkinkan bisnis baru berupa perluasan layanan bagi konsumen dan potensi aliran penerimaan yang baru bagi penyedia layanan keuangan.

Setiap tahap menuju implementasi digitalisasi layanan keuangan yang semakin lengkap akan menurunkan biaya, sehingga sangat menguntungkan bagi penyedia layanan keuangan. Mereka dapat melayani kelompok konsumen yang lebih luas dan beragam. Sejalan dengan pertumbuhan pengguna pembayaran digital, maka skala ekonomi akan menurunkan biaya dan semakin banyak orang dapat bergabung. Efek jaringan yang kuat ini merupakan suatu kesempatan dan sekaligus tantangan. Dikatakan menjadi peluang karena terdapat sejumlah orang yang aktif di dalam sistem keuangan yang akan mengakselerasi pertumbuhan. Sedangkan menjadi tantangan disebabkan penyedia layanan keuangan harus menciptakan spektrum produk yang beragam agar banyak nasabah dapat menggunakannya secara aktif.

Layanan keuangan berjalan/bergerak (*mobile financial services*) telah menjadi perantara yang penting bagi inklusi keuangan di semakin banyak negara. Kondisi ini dilandasi oleh keterbatasan bank untuk menjangkau banyak populasi penduduk, sehingga jaringan telepon seluler berkembang sangat cepat dengan menawarkan pendistribusian teknologi layanan keuangan digital. *International Telecommunication Union* (ITU, 2016) mengungkapkan bahwa antara tahun 2011 dn 2014, terdapat 700 juta penduduk dewasa di seluruh dunia telah menjadi pemilik rekening, sehingga jumlah penduduk dewasa yang tidak memiliki rekening menurun 20 persen menjadi 2 milyar orang. Jumlah rekening *mobile money* telah mencapai 411 juta pada tataran global di tahun 2015. Jumlah ini meningkat tiga kali lipat apabila dibandingkan dengan tahun 2014. *Mobile money* saat ini telah tersedia di 93 negara.

Bagi banyak orang, melakukan transfer dan pembayaran dengan menggunakan *mobile money* merupakan langkah pertama untuk memasuki sistem keuangan formal. Aktivitas nasabah yang melakukan transfer dan pembayaran tercatat dan nantinya dapat menjadi dasar bagi penilaian kredit yang dapat memfasilitasi penyaluran pinjaman secara digital. Pergeseran dari simpanan dan pinjaman informal ke dalam sistem keuangan formal (melalui berbagai LJK) dapat menyediakan akses yang sebelumnya tidak tersedia.

Namun demikian, data yang ada menunjukkan bahwa hingga saat ini masih banyak penduduk di berbagai negara yang belum menggunakan *mobile money*. Wilayah-wilayah terisolasi dan perdesaan masih tetap belum terlayani. Penggunaan *mobile money* yang paling banyak adalah untuk layanan transfer dan pembayaran, dan hanya sedikit negara yang telah mengembangkan pasar penggunaan perangkat digital untuk keperluan simpanan, pinjaman, dan asuransi. Singkatnya, meskipun *mobile money* telah meningkatkan inklusi keuangan, tetapi penggunaan aktualnya masih terbatas pada layanan keuangan tertentu.

Kebijakan dan regulasi menjadi sangat penting dengan perkembangan industri berbasis teknologi yang sangat pesat. Pada awalnya, mungkin sulit untuk memulai suatu layanan keuangan digital, namun jika telah dimulai, maka akan bertumbuh secara eksplosif. Pertumbuhan ini akan membawa serta risiko berupa terkonsentrasinya kekuatan pasar pada penyedia-penyedia layanan berskala besar.

Apabila para pemimpin pasar memiliki kekuatan yang signifikan pada sektor layanan telekomunikasi seluler, maka risiko untuk menciptakan *mobile money platform* yang dominan menjadi tinggi. Risiko muncul tatkala para penyedia layanan yang kuat membatasi saingannya tidak hanya dengan menghasilkan produk yang lebih baik dan harga yang lebih murah, tetapi juga melalui perjanjian-perjanjian yang bersifat eksklusif dengan agen-agen. Kondisi ini akan membatasi akses terhadap jaringan dan saling koneksi di antara *platform-platform* yang berbeda.



Regulasi mempunyai dampak yang penting untuk menata agar sektor layanan keuangan digital dapat berkembang dan menjadi kompetitif. Layanan keuangan digital dapat disediakan oleh operator jaringan seluler atau bank, dan pihak-pihak lainnya. Situasi persaingan di pasar akan ditentukan oleh apakah para penyedia layanan lainnya diizinkan memasuki pasar atau tidak, atau hanya perbankan yang diizinkan untuk menyediakan layanan tersebut.



## Lima

# INKLUSI KEUANGAN DAN STABILITAS KEUANGAN

**K**risis keuangan pada tahun 1998-1999 dan 2007-2009 telah memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya mempertahankan stabilitas keuangan dan mengendalikan risiko keuangan sistemik. Upaya ini berjalan beriringan dengan adanya tuntutan untuk meningkatkan inklusi keuangan, khususnya di negara-negara yang masih terbelakang, sedang berkembang, dan tumbuh cepat. Meskipun, keterbatasan akses sebenarnya masih pula dijumpai pada penduduk di negara-negara yang sudah maju sekalipun. Inklusi keuangan dalam konteks ini dimaknai sebagai akses yang lebih besar terhadap layanan keuangan bagi penduduk dan rumah tangga yang berpendapatan rendah serta perusahaan-perusahaan yang berskala kecil. Layanan keuangan sangat penting bagi penduduk dalam rangka menyiapkan strategi untuk membangun kondisi keuangan dan ekonomi mereka.

Pemaknaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan di antara inklusi keuangan dan stabilitas keuangan. Apakah hubungan keduanya bersifat saling menggantikan (substitusi) atau saling melengkapi (komplemen)? Apakah tingkat

inklusi keuangan masyarakat yang lebih baik akan meningkatkan atau justru mengurangi stabilitas keuangan?

Morgan dan Pontines (2014) mengemukakan bahwa sejumlah studi menunjukkan adanya cara positif maupun negatif dari inklusi keuangan dalam memberikan pengaruh terhadap stabilitas keuangan, namun masih jarang penelitian empirik yang dapat menunjukkan adanya hubungan di antara keduanya. Kelangkaan ini kemungkinan disebabkan masih minimnya data inklusi keuangan yang tersedia, karena diskusi mengenai inklusi keuangan masih relatif baru. Dalam penelitiannya, Morgan dan Pontines (2014) dapat membuktikan bahwa peningkatan pangsa penyaluran pinjaman kepada perusahaan berskala kecil dan menengah (UKM) membantu stabilitas keuangan, terutama dengan mengurangi jumlah pinjaman macet (*non-performing loan*, NPL) dan menurunkan kemungkinan gagal bayar oleh lembaga-lembaga keuangan.

Hingga saat ini belum dijumpai adanya definisi yang disepakati bersama pada tataran global mengenai stabilitas keuangan. Hal ini disebabkan stabilitas keuangan sangat kompleks dengan banyak dimensi, lembaga, produk, dan pasar. Mungkin jauh lebih mudah mendefinisikan ketidakstabilan keuangan dibandingkan stabilitas keuangan. *European Central Bank* (ECB, 2012) mendefinisikan stabilitas keuangan sebagai

*"... a condition in which the financial system-comprising of and financial intermediaries, markets and market infrastructures-is capable of withstanding shocks, thereby reducing the likelihood of disruptions in the financial intermediation process which are severe enough to significantly impair the allocation of savings to profitable investment opportunities."*

Terdapat tiga persyaratan yang berhubungan dengan stabilitas keuangan, yaitu:

1. sistem keuangan harus mampu mengefisienkan dan memperlancar perpindahan sumberdaya dari para penabung kepada para investor;

2. risiko-risiko keuangan harus dinilai dan dihargai secara beralasan dan akurat dan juga dapat dikelola dengan baik; serta
3. sistem keuangan harus berada dalam kondisi yang dapat menyerap berbagai kejutan dan tekanan keuangan dan ekonomi dengan baik.

Definisi stabilitas keuangan lainnya yang lebih teoritis dikemukakan oleh Schinasi (2004):

*"A financial system is in a range of stability whenever it is capable of facilitating (rather than impeding) the performance of an economy, and of dissipating financial imbalances that arise endogenously or as a result of significant adverse and unanticipated events."*

Definisi ini kembali menekankan pentingnya daya tahan terhadap gangguan dan kemampuan berkelanjutan untuk menjalankan fungsi dasar dari sistem keuangan, yaitu menjadi intermediasi bagi tabungan dan investasi dalam perekonomian.

Beberapa pihak melihat stabilitas sistem keuangan dari konteks risiko keuangan yang sistemik. *The Committee on Global Financial Stability* (CGFS, 2010) misalnya, menyatakan bahwa risiko sistemik adalah

*"... a risk of disruption to financial services that is caused by an impairment of all or parts of the financial system and has the potential to have serious negative consequences for the real economy."*

Sedangkan Borio (2012) mengkategorikan risiko sistem keuangan ke dalam dua dimensi, yaitu runtut waktu (*time series*) dan lintas pelaku (*cross sectional*). Kategori pertama menyangkut perubahan risiko agregat sistem keuangan dari waktu ke waktu. Adapun dimensi risiko kedua berhubungan dengan sistem keuangan pada suatu titik waktu sebagai hasil dari saling keterhubungan di dalam sistem keuangan.

Sahay dkk (2015) menuliskan bahwa risiko stabilitas keuangan meningkat tatkala akses terhadap kredit diperluas tanpa

adanya supervisi yang memadai. Penyangga keuangan menurun seiring dengan perluasan akses kredit pada kondisi faktor-faktor lainnya tidak mengalami perubahan. Di negara-negara yang pengawasannya lemah, penurunan penyangga keuangan dapat lebih besar. Sebaliknya, di negara-negara yang memiliki kemampuan supervisi lebih kuat, manfaat inklusi keuangan terhadap stabilitas keuangan dapat lebih terlihat.

Dalam pandangan Mehrotra dan Yetman (2015), peningkatan inklusi keuangan berinteraksi dengan kebijakan moneter melalui dua cara. Pertama, peningkatan inklusi keuangan membantu lebih banyak nasabah meningkatkan konsumsi mereka dari waktu ke waktu. Situasi ini berpotensi mempengaruhi pilihan kebijakan moneter dasar, seperti target indeks harga. Kedua, pengaruhnya berupa dorongan kepada konsumen untuk menjauhkan tabungan mereka dari aset-aset fisik dan tunai menjadi simpanan. Langkah ini dapat membawa implikasi bagi operasi kebijakan moneter dan target kebijakan antara.

Inklusi keuangan memfasilitasi kelancaran konsumsi (*consumption smoothing*), karena rumah tangga dapat menyesuaikan simpanan dan pinjaman mereka sebagai respons atas perubahan tingkat bunga dan perkembangan ekonomi yang tidak dapat diduga. Dengan kondisi keterbatasan akses terhadap lembaga-lembaga keuangan formal sekalipun, terdapat banyak cara bagi masyarakat untuk memperlancar konsumsi mereka. Mereka dapat menyimpan dalam bentuk perhiasan atau aset-aset non-finansial lainnya. Para petani yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal dapat memperdagangkan ternak mereka atau aset-aset lainnya yang menghasilkan pendapatan, atau mereka dapat melakukan penyesuaian cara kerja sebagai respons atas terjadinya gangguan. Sedangkan sebagai peminjam, para sahabat dan keluarga dapat berperan sebagai pemberi pinjaman yang penting menggantikan perbankan.

Akan tetapi, akses terhadap sistem keuangan formal tetap saja memfasilitasi kelancaran konsumsi. Mehrotra dan Yetman (2015) menunjukkan bahwa di antara 130 negara, pertumbuhan

konsumsi lebih rendah kerawanannya terhadap pertumbuhan output pada negara-negara yang memiliki tingkat inklusi keuangan lebih tinggi. Kondisi ini berlaku pada tiga pengukuran inklusi keuangan yang dilakukan dan secara statistik sangat signifikan, terutama ketika dilakukan pengukuran inklusi keuangan dalam bentuk tabungan pada suatu lembaga keuangan formal. Dua pengukuran inklusi keuangan lainnya adalah memiliki suatu rekening pada suatu lembaga keuangan dan meminjam dari suatu lembaga keuangan.

Kendala-kendala yang mempengaruhi kemampuan untuk memperlancar konsumsi, sebagai akibat rendahnya inklusi keuangan, dapat mempengaruhi kebijakan moneter melalui tiga dimensi berikut ini.

1. Ukuran tingkat bunga sebagai respons terhadap adanya berbagai gangguan (*shocks*). Semakin besar pangsa rumah tangga yang terabaikan dari layanan keuangan, maka semakin kuat kebijakan yang dibutuhkan untuk menstabilkan permintaan agregat dan inflasi. Situasi ini peka terhadap jalannya perekonomian.
2. Pertukaran (*trade-off*) antara volatilitas output dan inflasi. Ketika inklusi keuangan meningkat, maka rasio volatilitas output terhadap volatilitas inflasi seharusnya meningkat pula jika bank sentral peduli terhadap keduanya dan mengatur kebijakan moneter untuk mengoptimalkan pertukaran yang terjadi. Para konsumen yang telah menikmati layanan lembaga keuangan lebih mampu dibandingkan mereka yang belum terlayani dalam menyesuaikan keputusan simpanan dan investasi mereka untuk mengamankan konsumsi mereka dari volatilitas output. Ketika tingkat inklusi keuangan mengalami perbaikan, maka bank-bank sentral dapat memfokuskan kinerjanya untuk menjaga stabilitas inflasi.
3. Pilihan indeks harga yang digunakan untuk mendefinisikan tujuan inflasi. Di beberapa negara, bank sentral memusatkan perhatiannya pada inflasi inti (*core inflation*), yaitu suatu pengukuran perubahan harga yang tidak memasukkan

kebanyakan komponen harga konsumen yang rentan (biasanya makanan dan energi). Menjadi sulit bagi bank sentral untuk menstabilkan inflasi secara keseluruhan (dan ekonomi makro) jika harga bahan-bahan pangan diabaikan.

Selain ketiga dimensi tersebut, inklusi keuangan yang lebih tinggi juga memperkuat penggunaan tingkat bunga sebagai alat kebijakan yang utama. Ketika inklusi keuangan berada dalam kondisi rendah, maka porsi yang besar dari stok uang beredar di masyarakat. Sedangkan ketika inklusi meningkat, pangsa terbesar dari uang berada dalam bentuk simpanan di perbankan.

Khan (2011) dalam Morgan dan Pontines (2014) mengemukakan tiga cara utama di mana inklusi keuangan yang lebih tinggi dapat berkontribusi positif maupun negatif terhadap stabilitas keuangan. Kontribusi positif yang *pertama* adalah adanya diversifikasi aset-aset bank sebagai hasil dari peningkatan penyaluran pinjaman kepada perusahaan-perusahaan berskala kecil. Diversifikasi ini dapat mengurangi risiko portofolio pinjaman dari suatu bank. *Kedua*, meningkatnya jumlah penabung berskala kecil akan meningkatkan ukuran dan stabilitas dari basis simpanan serta mengurangi ketergantungan bank terhadap pembiayaan non inti yang cenderung lebih rentan selama krisis. *Ketiga*, inklusi keuangan yang lebih tinggi berkontribusi pula terhadap transmisi kebijakan moneter yang lebih baik dan stabilitas keuangan yang lebih tinggi. Pandangan ini sejalan dengan Hannig dan Jansen (2010) yang mengungkapkan bahwa kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah relatif kebal terhadap siklus ekonomi, sehingga memasukkan mereka ke dalam sektor keuangan akan cenderung meningkatkan stabilitas basis simpanan dan pinjaman.

Adapun kontribusi negatif yang *pertama* bahwa upaya memperluas peminjam dapat bermuara pada penurunan standar penyaluran pinjaman. *Kedua*, bank-bank dapat meningkatkan risiko reputasi mereka jika mereka menyerahkan fungsi-fungsinya kepada pihak luar (*outsource*), seperti penilaian kredit, dalam



rangka menjangkau para peminjam berskala kecil. Ketiga, jika lembaga-lembaga keuangan mikro tidak diatur dengan baik, maka peningkatan penyaluran pinjaman dapat menurunkan efektivitas regulasi dalam perekonomian dan meningkatkan risiko sistem keuangan.

Perbaikan akses keuangan dapat mempengaruhi komposisi penabung dan peminjam dalam perekonomian, baik dari kalangan rumah tangga maupun perusahaan. Perubahan komposisi ini dapat mendukung diversifikasi risiko dan stabilitas keuangan. Tetapi, jika lembaga-lembaga keuangan berekspansi terlalu cepat, terutama pada daerah-daerah baru yang relatif belum dikenal, maka risiko keuangan dapat meningkat.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan inklusi keuangan dapat mendukung tugas bank sentral dalam menjaga stabilitas keuangan (Mehrotra dan Yetman, 2015).

1. Konsumen yang mendapatkan akses kepada sistem keuangan formal sepertinya meningkatkan simpanan agregat dan mendiversifikasi basis penabung dari bank. Setiap peningkatan simpanan berpotensi memperbaiki ketahanan lembaga-lembaga keuangan, khususnya ketika mereka didukung oleh skema penjaminan simpanan yang efektif. Dapat dibuktikan bahwa neraca agregat dari rekening nasabah berpendapatan rendah hanya berubah secara bertahap dan tidak mudah berubah dalam waktu relatif singkat (*month-to-month swings*). Ketahanan ini sangat relevan terutama pada situasi krisis, jika para penabung berpendapatan rendah mempertahankan simpanan mereka ketika para penabung berskala besar menarik tabungannya. Sepanjang krisis keuangan dunia, total simpanan menurun lebih rendah pada negara-negara dengan tingkat inklusi keuangan lebih tinggi dalam bentuk simpanan bank, khususnya di negara-negara berpendapatan menengah, bahkan setelah dilakukan pengendalian terhadap faktor-faktor lainnya.
2. Dengan memperbaiki akses perusahaan terhadap kredit, maka inklusi keuangan dapat membantu lembaga-lembaga

keuangan untuk meragamkan portofolio pinjaman mereka. Penyaluran pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang sebelumnya belum terlayani dapat menurunkan rata-rata risiko kredit pada portofolio pinjaman. Terdapat studi yang dapat membuktikan bahwa peningkatan jumlah peminjam dari UKM berhubungan dengan pengurangan NPL dan lebih rendahnya kemungkinan gagal bayar pada lembaga keuangan. Selain itu, ditemukan pula adanya tingkat pembayaran kembali yang tinggi pada LKM. Akan tetapi, peningkatan inklusi keuangan tidak menjamin perbaikan stabilitas keuangan. Jika inklusi keuangan berhubungan dengan pertumbuhan kredit yang berlebihan atau perluasan kredit secara cepat dari sektor keuangan yang belum diatur, maka risiko keuangan dapat meningkat. Salah satu cara untuk meningkatkan inklusi keuangan adalah dengan memberikan insentif kepada bank-bank untuk meningkatkan kreditnya secara agresif kepada rumah tangga miskin yang belum terlayani tanpa mengabaikan perhatian terhadap kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman yang diterima. Rumah tangga yang belum pernah dilayani oleh lembaga keuangan formal tidak memiliki sejarah keuangan. Ketidadaan rekam jejak yang dapat dilacak ini dapat terjadi jika sistem identifikasi perorangan dalam kondisi lemah. Kondisi ini akan menjadi kendala bagi bank dalam rangka mempercepat kemampuan menyerap nasabah baru tanpa terganggu oleh kualitas kredit.

3. Suatu peningkatan inklusi keuangan dapat berhubungan dengan perubahan struktural yang cepat di dalam sistem keuangan. Dalam konteks ini, kerawanan sistem keuangan dapat meningkat. Para pengawas dan bank-bank sentral harus dapat memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas yang mencukupi untuk memantau dan bereaksi terhadap setiap risiko yang berkembang dan dapat mengganggu sistem keuangan.

Menentukan arah pengaruh inklusi keuangan terhadap stabilitas keuangan pada dasarnya merupakan suatu tantangan. Bahkan, untuk menentukan saling pengaruh di antara inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi pun masih sering didiskusikan. Fakta-fakta yang bersifat khusus mungkin saja dapat ditemukan di lapangan. Misalnya kondisi minimnya regulasi atau pendapatan yang sangat rendah, dan disparitas yang tinggi di kalangan masyarakat, dapat menyebabkan inklusi keuangan maupun pertumbuhan ekonomi yang rendah. Mengatasi kedua persoalan ini dapat membantu mendorong pertumbuhan dan inklusi.

Sektor keuangan yang tidak hanya “dalam”, tetapi juga menyediakan akses keuangan yang lebih luas, akan lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Inklusi keuangan akan mendapatkan manfaat yang lebih dari pertumbuhan dibandingkan pembangunan sektor keuangan secara keseluruhan. Jenis-jenis inklusi keuangan dengan manfaat yang besar mencakup perusahaan maupun rumah tangga. Manfaat pada tataran perusahaan antara lain berupa persentase perusahaan yang mendapatkan kredit, persentase investasi yang dibiayai oleh perbankan, dan persentase perusahaan besar dan kecil yang memandang akses keuangan sebagai kendala utama. Sedangkan manfaat pada tingkat rumah tangga meliputi persentase penduduk dewasa yang memiliki rekening pada suatu lembaga keuangan formal atau memiliki kartu kredit, persentase penduduk dewasa yang meminjam dari suatu lembaga keuangan formal, atau menggunakan suatu rekening tertentu untuk menerima transfer upah dari pemerintah.

Manfaat marjinal dari inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi mulai menurun pada pengembangan keuangan di tingkat selanjutnya. Tatkala dampak dari inklusi keuangan terhadap pertumbuhan bersifat positif, maka dampaknya terhadap interaksi di antara inklusi keuangan dan pendalaman keuangan lebih sering bersifat negatif. Pertumbuhan marjinal menurun ketika inklusi keuangan dan pendalaman keuangan menjadi lebih besar secara progresif. Apabila keduanya

rendah, maka dampak marjinal menjadi besar. Sedangkan jika keduanya tinggi, maka dampak marjinalnya menjadi kecil dan kemungkinan negatif pada beberapa kasus.

Sektor-sektor yang lebih bergantung pada keuangan eksternal bertumbuh lebih cepat di negara-negara dengan pendalaman keuangan yang lebih besar dan bahkan lebih besar lagi dengan inklusi keuangan yang lebih tinggi. Perkembangan keuangan memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan melonggarkan kendala keuangan. Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa inklusi keuangan terutama bermanfaat pada sektor-sektor di mana menempatkan agunan menjadi masalah.

Mengapa diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan di antara inklusi keuangan dengan stabilitas keuangan? Salah satu alasannya adalah untuk menentukan pengaturan, desain, dan implementasi kebijakan yang terkait. Banyak upaya penataan kebijakan dalam sektor keuangan yang telah dilakukan di berbagai negara untuk mencapai kestabilan keuangan pada tataran makro. Upaya-upaya ini semakin terlihat pasca terjadinya krisis keuangan. Kestabilan makro juga diharapkan dapat didukung oleh kebijakan yang mendukung inklusi keuangan.

Berbagai kemungkinan dapat terjadi pada hubungan di antara inklusi keuangan dan stabilitas keuangan. Hubungan yang dimaksud dapat berupa saling menggantikan atau sinergi. Beberapa hasil penelitian empirik dapat membuktikan bahwa stabilitas keuangan yang lebih besar dapat memperbaiki kepercayaan di dalam sektor keuangan dan meningkatkan permintaan terhadap simpanan bank.

Inklusi keuangan dapat pula memperkuat stabilitas keuangan melalui jalur langsung maupun tidak langsung. Jalur langsung terjadi manakala lebih banyak masyarakat menggunakan simpanan bank, sehingga bank mempunyai basis pembiayaan yang lebih solid pada periode sulit. Secara tidak langsung, inklusi keuangan dapat menyediakan nasabah bagi perusahaan jasa keuangan dengan perangkat manajemen risiko yang lebih baik, sehingga meningkatkan daya tahannya.

Namun, dampak perluasan akses kredit terhadap kestabilan perbankan sangat ditentukan oleh kualitas pengawasan. Terdapat hubungan positif di antara inklusi keuangan dengan kestabilan bank, tetapi penyangganya cenderung menurun. Perubahan besar pada akses kredit juga sangat berhubungan dengan volatilitas pertumbuhan yang lebih tinggi, tetapi dampak ini diredam dengan keberadaan regulasi dan supervisi yang memadai. Jika upaya meningkatkan inklusi keuangan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, maka hal ini dapat berkontribusi terhadap lebih stabilnya perekonomian. Tetapi, inklusi keuangan tanpa regulasi dan supervisi yang mumpuni akan menyebabkan ketidakstabilan dalam tingkat pertumbuhan.

Sahay dkk (2015) menemukan bahwa sangat berbeda dengan kredit, peningkatan akses dan penggunaan layanan keuangan lainnya secara umum hanya mempunyai hubungan yang lemah terhadap stabilitas keuangan. Hasil ini bermakna bahwa ketika yang dibahas adalah menyangkut stabilitas keuangan, maka jenis inklusi keuangan menjadi sangat penting. Jika inklusi keuangan mengukur konsentrasi akses terhadap rekening transaksi misalnya, maka dampak stabilitas keuangan hanya kecil. Akan tetapi, jika menyangkut kredit, maka perluasan akses dengan risiko terjadinya penurunan standar seleksi dan pemantauan dapat membawa implikasi negatif kepada konsumen maupun stabilitas keuangan. Oleh karenanya, dalam kasus kredit, lebih baik memperkuat inklusi keuangan melalui intervensi yang meningkatkan penawaran dengan mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Contohnya adalah penggunaan teknologi dalam menyalurkan pembiayaan yang mengurangi biaya transaksi dan memperbaiki identifikasi peminjam yang dapat memitigasi persoalan informasi yang asimetrik.

Kualitas regulasi dan supervisi dapat menunjukkan perbedaan antara inklusi keuangan yang baik dan buruk. Aktivitas supervisi yang berhubungan dengan inklusi keuangan sangat menantang dengan kesulitan yang muncul antara lain dalam menilai risiko kredit ketika tidak terdapat agunan. Kesulitan

lainnya adalah ketika mengawasi, mengatur, dan mengumpulkan informasi dari pinjaman berskala kecil dalam jumlah yang sangat banyak. Selain itu, kerjasama atau kolaborasi dengan lembaga-lembaga pengawas dan regulator serta mengelola risiko sistemik pada bank yang menyediakan kredit kepada pemberi pinjaman berskala mikro merupakan tantangan tersendiri. Struktur tata kelola sektor keuangan yang lebih inklusif juga sangat penting bagi stabilitas keuangan.

## Enam

# REMITANSI DAN INKLUSI KEUANGAN

Dalam suatu laporan yang disusun bersama oleh IFAD dan *World Bank* yang ditujukan bagi *G20 Global Partnership for Financial Inclusion* pada bulan September 2015 di Turki disebutkan bahwa terdapat bukti mobilisasi layanan remitansi atau pengiriman uang yang tepat dapat bermanfaat bagi inklusi keuangan. Ditambahkan pula bahwa terdapat suatu hubungan langsung (*direct correlation*) di antara eksklusi keuangan dengan kemiskinan. Diperkirakan sejumlah dua milyar orang atau 38 persen penduduk dewasa usia kerja di seluruh dunia tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan resmi. Selain itu, terdapat 73 persen penduduk miskin yang belum terlayani oleh perbankan. Di antara penduduk yang terabaikan dari layanan keuangan, terdapat para pekerja migran dan keluarganya di negara asal mereka. Para pekerja ini diperkirakan telah mengirimkan uang sebanyak US\$ 500 milyar ke negara asalnya pada tahun 2015. Suatu aliran uang lintas negara yang cukup besar. Akan tetapi, potensi ekonomi dari dana ini tidak dapat termanfaatkan dengan optimal, karena

pengelolaan yang tidak sesuai oleh sektor keuangan terhadap kebutuhan spesifik dari para migran dan keluarganya.

Jika dipahami dengan baik, maka aliran remitansi dapat digunakan untuk menarik penduduk keluar dari kemiskinan, membangun infrastruktur ekonomi, dan menyediakan aliran pendapatan tambahan bagi sektor keuangan di negara asal para pekerja migran. Mereka menghasilkan sekumpulan instrumen yang kuat untuk merubah hidup mereka melalui tabungan atau investasi. Dengan mengenali fenomena dampak remitansi terhadap pembangunan dan peran inklusi keuangan melalui remitansi, maka pemerintah dan sektor swasta dapat mencari cara untuk memaksimalkan dampak remitansi dengan meningkatkan skala implementasi dari berbagai kebijakan dan model-model yang berhasil. Melalui perubahan kebijakan dan intervensinya, individu dapat dibawa ke dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan keuangannya. Di samping itu, dapat dibangun pula infrastruktur keuangan untuk suatu wilayah, khususnya di perdesaan, untuk mengangkat komunitasnya keluar dari kemiskinan.

Remitansi didefinisikan sebagai *“cross-border, person-to-person payments of relatively low value”* (IFAD dan *World Bank*, 2015). Remitansi telah menjadi elemen kunci bagi agenda pembangunan global dalam 15 tahun terakhir. Aliran uang dari pekerja migran sebanyak US\$ 500 milyar telah membawa dampak yang luar biasa terhadap komunitas lokal yang beranggotakan jutaan keluarga. Para pekerja migran rata-rata mengirimkan sekitar US\$ 200 per bulan, meskipun seringkali tidak rutin. Sekalipun jumlah ini relatif kecil, tetapi dapat mencapai 50 persen dari pendapatan keluarga di negara asal pekerja migran tersebut. Karena itu, aliran uang remitansi menjadi sandaran yang penting bagi jutaan individu atau rumah tangga. Uang kiriman ini membantu banyak keluarga dalam meningkatkan standar kehidupan mereka di atas tingkat subsisten dan menurunkan tingkat kerawanan. Lebih jauh lagi, uang dari remitansi dapat digunakan untuk memperbaiki tingkat kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kewirausahaan. Remitansi seringkali menjadi pengalaman pertama bagi penerimanya untuk



terlibat di dalam layanan keuangan. Pembayaran dari seseorang ke orang lain kerap kali menjadi titik awal dan pemicu bagi inklusi keuangan.

Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil memiliki tantangan ganda untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan dan kisaran produk keuangan untuk ditawarkan kepada para pengirim dan penerima remitansi. Sektor swasta yang dimaksud meliputi perbankan, LKM, jaringan kantor pos, perusahaan telepon seluler, dan lain sebagainya. Fakta menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keuangan dapat tidak mau atau tidak mampu menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan populasi tertentu yang terabaikan, sehingga mereka cenderung menggunakan layanan keuangan yang tidak resmi.

Migran di berbagai belahan dunia selama ini telah menggunakan dan bergantung pada remitansi. Sedangkan sektor keuangan telah menyediakan layanan transfer uang yang efisien. Dengan demikian, remitansi dapat menjadi jalur bagi mereka yang belum terlayani menuju kepentingan sektor keuangan. Pada situasi seperti ini remitansi seolah-olah menjadi kewarganegaraan keuangan, karena menciptakan suatu titik awal untuk mengembangkan layanan keuangan lainnya secara inklusif dan berkelanjutan (IFAD dan *World Bank*, 2015).

Suatu transaksi atau rekening simpanan dapat menjadi batu loncatan bagi inklusi keuangan yang lebih baik. Dikatakan demikian karena menyediakan suatu jalur untuk layanan keuangan bertanggung jawab yang lebih luas yang disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan yang lebih beragam dan kuat. Ketika remitansi diterima melalui intermediasi keuangan yang diatur, maka simpanan dapat terbentuk dan diinvestasikan kembali pada komunitas lokal. Simpanan dalam konteks ini bertindak selaku mesin pembangunan lokal, selain dapat menjadi penyangga untuk mengantisipasi ketidakstabilan pada tingkat ekonomi makro.

Mashayekhi (2015) menegaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat di antara remitansi, inklusi keuangan dan pengurangan kemiskinan. Remitansi mewakili aliran uang yang utama dan

tetap/rutin yang meningkatkan pendapatan rumah tangga dan belanja layanan sosial (misalnya kesehatan dan pendidikan). Remitansi berkontribusi untuk meningkatkan permintaan layanan keuangan dengan membuat penerima uang lebih dekat untuk bergabung dengan sektor keuangan formal. Para penyedia layanan keuangan telah mengenali potensi ini dan mulai menawarkan layanan tambahan untuk melengkapi rekening remitansi. Secara lebih spesifik, Mashayekhi (2015) mengemukakan bahwa remitansi sebagai aliran keuangan dan perluasan dalam layanan keuangan akan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan manusia. Setiap peningkatan 10 persen dari remitansi dapat mendorong pengurangan 3,5 persen dari pangsa penduduk yang hidup dalam kemiskinan.

Faktor utama yang menjadi kendala remitansi adalah biaya transfer. Oleh karena itu, sangat penting membuat sistem transfer yang lebih murah dan efisien. Setiap pengurangan biaya remitansi sebesar 5 persen diperkirakan dapat mendatangkan US\$ 15 milyar simpanan. Remitansi Selatan-Selatan sangat mahal disebabkan faktor keterbatasan informasi dan kompetisi (kontrak eksklusif). Salah satu target yang diusulkan di dalam SDGs adalah mengurangi biaya transaksi remitansi migran menjadi lebih rendah dari 3 persen dan menghilangkan koridor remitansi dengan biaya lebih dari 5 persen pada tahun 2030. G-8 dan G-20 sepakat mengenai target untuk mengurangi rata-rata biaya transfer global untuk keperluan remitansi menjadi 5 persen dalam 5 tahun. Sebagai perbandingan, biaya transfer untuk remitansi adalah rata-rata sebesar 8,1 persen pada kuartal kedua tahun 2014.

Biaya remitansi memang telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, tetapi hal ini belum memadai. Biaya mengirimkan remitansi menurun di semua negara berkembang, namun di banyak negara yang terbelakang, biaya pengiriman remitansi masih berkisar 14-20 persen. Amerika Latin dan Karibia merupakan wilayah dengan rata-rata biaya transfer remitansi terendah, yaitu 5,6 persen, sedangkan wilayah dengan rata-rata biaya transfer remitansi tertinggi adalah Sub-Sahara Afrika (11,6 persen).

Dalam praktiknya, biaya remitansi tergantung pada beberapa variabel. Bank-bank komersial merupakan jalur remitansi yang paling mahal, yaitu berkisar 12,1 persen. Sedangkan kantor-kantor pos membebankan biaya remitansi yang paling murah, yaitu hanya 4,7 persen. Adapun organisasi-organisasi transfer uang yang menjadi koridor andalan sebagian besar pekerja migran mengenakan biaya remitansi rata-rata sebesar 6,6 persen. Biaya transfer remitansi dari rekening ke rekening diketahui masih lebih mahal dibandingkan dengan layanan pengiriman remitansi secara tunai ke tunai.

Pengurangan biaya pada dasarnya sangat vital untuk memperoleh manfaat pembangunan. Sistem yang dibangun seharusnya dapat memfasilitasi pembayaran lintas batas atau antarnegara secara efisien. Dalam konteks ini, persaingan atau intermediasi dapat membantu mengatasi persoalan kontrak eksklusif. Regulasi seyogyanya mendorong interkoneksi di antara *platform* atau bahkan berbagi infrastruktur untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan jaringan dan akses keuangan, serta memfasilitasi kompetisi dan skala ekonomi.

Kombinasi penggunaan jaringan perbankan, kantor pos, dan telekomunikasi dapat menurunkan biaya dan memperkuat peluang untuk menjangkau penerima remitansi yang berpendapatan rendah di lokasi-lokasi terpencil. Beberapa bank mengizinkan transfer remitansi tanpa perlu membuka rekening. Langkah ini juga mendorong persaingan, menyediakan insentif bagi jalur yang murah, dan memformalkan jalur yang tadinya informal. Perbaikan transparansi dan informasi mengenai biaya-biaya yang berhubungan dengan setiap jalur (misalnya basis data harga) akan memungkinkan pengirim remitansi untuk memilih alternatif yang paling murah (*cost-effective*).

Perlu dipikirkan berbagai upaya untuk memaksimalkan dampak remitansi bagi pembangunan. Remitansi terutama dihabiskan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga, kesehatan, dan pendidikan. Jika dana tidak tersalurkan, maka dapat menciptakan ketergantungan. Menghubungkan remitansi dengan

layanan keuangan bersama-sama dengan model-model investasi dapat mendorong penyaluran dana ini menuju aktivitas-aktivitas produktif, layanan sosial, dan infrastruktur. Kondisi ini dapat memaksimalkan dampak remitansi bagi perekonomian lokal maupun nasional serta dapat mengembangkan layanan keuangan dengan meningkatkan permintaan.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa remitansi adalah dana swasta dan fokusnya adalah menyediakan pilihan alat keuangan bagi para migran dan keluarganya untuk memaksimalkan dampak dari dana mereka. Asosiasi diaspora serta organisasi pengusaha dan pekerja dapat memainkan peran dalam menyediakan informasi mengenai alat-alat ini. Kemajuan masih diperlukan dalam mengantarkan remitansi menuju akses terhadap pasar modal melalui pengenalan akan arti pentingnya melalui lembaga-lembaga pemeringkat kredit.

Remitansi memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi bagi pembangunan manusia dan sosial. Potensi ini perlu diwujudkan melalui penggunaan layanan keuangan yang efektif. Apabila terjadi, maka prediksi adanya hubungan yang kuat di antara aliran remitansi dengan inklusi keuangan dan pengurangan kemiskinan dapat dibuktikan. Terdapat penelitian yang bahkan bisa menunjukkan bahwa peningkatan remitansi sebesar 10 persen mampu mengurangi kemiskinan sebanyak 3,1 persen. Oleh karenanya, sangat penting membangun suatu sistem transfer yang murah, efisien, dan transparan.

Transfer uang antarnegara dengan *mobile remittances* belum mengalami kemajuan, karena antara lain terkendala dengan pertimbangan anti pencucian uang, pemberantasan pembiayaan terorisme, keterbatasan interkoneksi antarplatform dan pertukaran pengawasan. Negara-negara yang telah memiliki regulasi khusus yang mengatur *mobile remittances* antara lain adalah Kenya, Uganda, dan Tanzania. Di negara-negara ini, model *mobile money* dipimpin oleh jaringan operator telepon seluler yang di antaranya bermitra dengan perbankan.

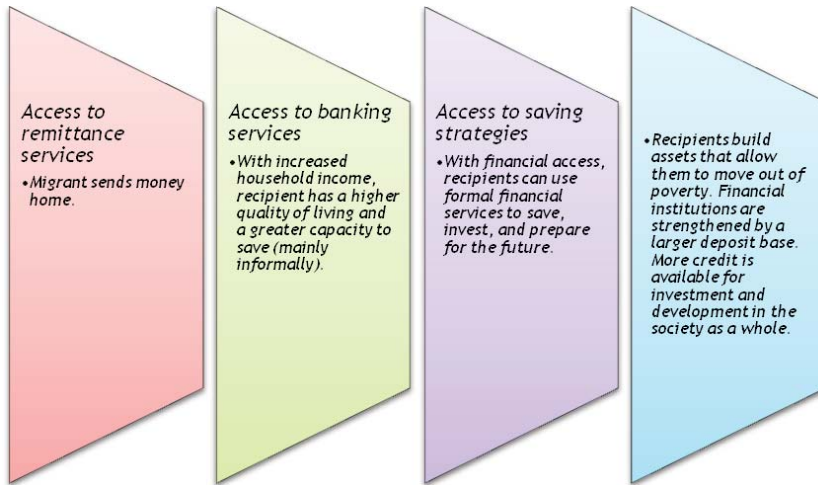
Kombinasi penggunaan fasilitas perbankan, kantor pos, dan jaringan telekomunikasi dapat menghasilkan saluran yang lebih efisien dengan biaya yang lebih rendah dan potensi yang lebih besar untuk menjangkau penerima remitansi yang berpendapatan rendah di lokasi-lokasi terpencil. Beberapa negara, seperti Meksiko dan El Salvador, mengumpulkan sumber daya perbankan, keuangan mikro, dan *credit union* untuk memperluas jaringan pembayaran, sehingga mendorong terjadinya distribusi remitansi yang lebih luas dan efisien.

Orozco dan Yansuran (2015) menegaskan bahwa hubungan penting di antara remitansi dan pembangunan berpotensi untuk merubah kesejahteraan dari para migran, keluarga, dan masyarakatnya, terutama ketika kebijakan-kebijakan yang ada juga mendukung. Remitansi membantu rumah tangga penerima untuk hidup dengan lebih nyaman serta meningkatkan belanja untuk kebutuhan nutrisi, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Aliran remitansi meningkatkan cadangan nasional, pertukaran mata uang asing, serta rasio tabungan dan kredit. Dari sudut pandang kebijakan, aliran remitansi berdampak terhadap pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi, khususnya ketika disalurkan dengan benar.

Pengaruh remitansi terhadap pembangunan tergambar dari dampaknya terhadap pendapatan. Remitansi biasanya dikumpulkan bersama-sama dengan sumber-sumber pendapatan lainnya, seperti gaji, sewa dan bantuan sosial. Semua pendapatan ini akan meningkatkan tabungan masyarakat penerima remitansi. Dikarenakan remitansi memiliki dampak terhadap pendapatan yang tidak dibelanjakan, maka akan meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk menabung. Dengan demikian, remitansi mengisi fungsi membangun kepemilikan aset-aset likuid dan tetap pada tingkat rumah tangga.

Dalam praktiknya, perlu dibedakan di antara simpanan formal dan informal karena masih berlangsung di masyarakat hingga saat ini. Banyak penduduk di belahan bumi selatan yang masih mengandalkan simpanan maupun pinjaman yang

bersifat informal, meskipun dalam banyak kasus merepotkan dan membebani mereka. Rumah tangga penerima remitansi dapat menyimpan uangnya, tetapi tanpa akses terhadap lembaga dan layanan keuangan, maka kebanyakan uangnya disimpan secara informal.



**Gambar 6.1. Dampak Proses Remitansi terhadap Akses Keuangan**  
Sumber: Orozco dan Yansuran (2015).

Peningkatan dampak remitansi bergantung pada sejumlah mekanisme keuangan. Pertama, semua migran (pengirim remitansi) memerlukan para penyedia layanan remitansi untuk mengirimkan uang mereka ke negara asal. Uang yang dikirim kemudian bergerak dari rekening penyedia layanan remitansi di bank tertentu menuju rekening bank mitra di negara penerima yang selanjutnya langsung dibayarkan, disimpan di dalam rekening simpanan, atau ditransfer pada korespondensi bukan perbankan, seperti toko retail untuk pembayaran atau kredit. Pada tahap ini, remitansi mempunyai dampak penting bagi rumah tangga, yaitu memungkinkan terjadinya standar kehidupan yang lebih nyaman, setidaknya-tidaknya dalam jangka pendek.

Tatkala seorang penerima telah menerima uang remitansi, terjadi mekanisme keuangan yang kedua. Dengan adanya tambahan sumber pendapatan, maka penerima remitansi mengalami peningkatan kapasitas untuk menabung. Akan Tetapi, apakah uang ini akan ditabung secara resmi atau tidak resmi, sangat bergantung pada akses mereka terhadap layanan perbankan. Simpanan informal mempunyai beberapa manfaat, tetapi tidak aman dan juga tidak mempunyai nilai tambah sebagaimana dimiliki oleh simpanan pada lembaga formal. Dalam konteks ini, akses keuangan dapat memperluas dampak transfer remitansi dengan memungkinkan rumah tangga penerima untuk membangun aset dan memperbaiki kualitas hidup mereka dalam jangka panjang.

Akhirnya, strategi untuk mendorong peningkatan tabungan dan investasi formal dapat membantu rumah tangga penerima untuk membangun aset-aset yang mereka butuhkan untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi. Tidak cukup bagi rumah tangga untuk memiliki akses pada layanan keuangan formal, namun mereka juga perlu merasa diberdayakan. Pada saat yang sama, peningkatan tabungan dan investasi dapat memperkuat lembaga keuangan dan memfasilitasi akses terhadap kredit pada skala yang lebih besar. Situasi ini akan mendatangkan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan masyarakat pada umumnya.

Pandangan-pandangan Orozco dan Yansuran (2015) sebenarnya telah dikaji terlebih dahulu oleh Toxopeus dan Lensink (2007) yang juga mengamati jalur eksak yang dapat menyebabkan remitansi dapat meningkatkan inklusi keuangan. Perubahan yang terjadi dilihat dari sisi permintaan, penawaran, dan faktor kebijakan. Keduanya juga menerapkan teori batas akses terhadap pasar keuangan di negara-negara yang sedang berkembang.

Pada sisi permintaan, pengirim remitansi sedikit-tidaknya membutuhkan satu layanan keuangan, yaitu pembayaran internasional. Permintaan ini dapat menjadi suatu insentif untuk

menggunakan sektor perbankan atau lembaga keuangan lainnya sebagai penyuplai. Di ujung lainnya dari transaksi, keperluan untuk menerima remitansi dapat mendorong masyarakat untuk pertama kalinya mencari layanan keuangan di luar kawasan tempat tinggalnya. Para migran yang mengirim remitansi memaksa penerima untuk menghubungi lembaga keuangan yang menjadi tempat pengiriman uang. Jika lembaga yang dimaksud adalah suatu bank yang menawarkan produk keuangan tambahan, maka interaksi ini dapat menciptakan permintaan bagi produk-produk seperti tabungan, kredit, atau asuransi. Dalam hal ini, peningkatan kepedulian keuangan dari migran dapat menjadi kekuatan penggerak untuk meningkatkan literasi bagi para penerima remitansi. Beberapa peneliti memperkirakan bahwa sekitar 10 persen dana remitansi yang diterima selanjutnya ditabung, diinvestasikan, atau digunakan bagi aktivitas wirausaha. Fakta bahwa sebagian dana yang mengalir masuk diinvestasikan mengindikasikan bahwa terdapat permintaan terhadap produk-produk keuangan pelengkap oleh para penerima remitansi.

Banyak lembaga yang dapat melayani pesatnya permintaan layanan remitansi. Sebagai tambahan dari beragam jalur dan lembaga transfer uang informal yang menangkap pangsa terbesar dari pasar, lembaga-lembaga keuangan lainnya dan formal juga menawarkan layanan yang sama. Bank-bank komersial yang menyadari akan pesatnya pertumbuhan aliran remitansi mulai tertarik untuk menargetkan segmen pasar ini. Selain menangkap aliran uang, jalur remitansi dapat digunakan untuk menjual paket-paket layanan keuangan bagi penduduk yang berpendapatan rendah. *Credit Union* di seluruh dunia juga memfokuskan operasinya pada remitansi dan telah menciptakan suatu layanan secara kolektif untuk mengirimkan uang secara elektronik. Dalam prosesnya, mereka menawarkan layanan keuangan lainnya bagi para pengguna, seperti rekening tabungan.

Persepsi remitansi sebagai bermanfaat karena melayani pasar penduduk berpendapatan rendah telah meningkat sebagai hasil permintaan layanan remitansi oleh penduduk miskin



dan adanya aliran uang masuk secara tetap. Remitansi reguler dapat mengurangi persoalan keterbatasan informasi karena aliran uang masuk secara kontinyu dari luar memungkinkan segmen berpendapatan rendah dari populasi untuk membangun sejarah keuangan dengan lembaga keuangan. Pendapatan yang diperoleh sekarang membutuhkan sejenis intermediasi untuk mentransfernya menuju tujuan.

Bank-bank dapat melakukan penjualan silang untuk mendapatkan nasabah-nasabah baru dan memungkinkan mereka untuk membangun sejarah keuangan dengan menawarkan layanan transfer internasional bersama-sama dengan layanan pelengkap, seperti tabungan. Melalui aliran remitansi, bank mendapatkan suatu gambaran mengenai pendapatan nasabah dan ekspektasi dana di masa depan, sehingga mengindikasikan potensi kredit bagi penerima remitansi, karena aliran dana yang masuk secara konstan di masa mendatang dapat digunakan untuk membayar kembali kredit. Di samping itu, dana remitansi yang diterima dari luar negeri pada umumnya meningkat, maka hal ini dapat berpotensi menurunkan profil risiko nasabah. Bank oleh karenanya mendapatkan informasi mengenai perspektif pinjaman nasabah dan mengurangi persoalan pemilihan nasabah yang keliru.

Selanjutnya, efek pendapatan yang langsung dari remitansi dapat mempengaruhi sisi suplai. Ketika suatu anggota keluarga memutuskan untuk bermigrasi, secara rasional, ia melakukannya hanya jika ekspektasi manfaat dari bekerja di luar negeri dikurangi tambahan biaya hidup selama di sana lebih besar dari pendapatan keluarganya sebelum melakukan migrasi. Oleh karena itu, keluarga penerima secara umum akan berpindah menuju kelompok nasabah dengan pendapatan yang lebih tinggi yang lebih menarik bagi bank. Situasi ini dapat mendorong penawaran layanan keuangan bagi kelompok tersebut.

Batas akses dapat digunakan untuk menguji hubungan di antara remitansi dengan inklusi keuangan dari suatu sudut pandang yang berbeda. Metoda ini menggabungkan argumen

permintaan dan penawaran dan digunakan oleh Porteous (2004) untuk melihat bagaimana suatu pasar keuangan dapat bekerja untuk penduduk miskin (Toxopeus dan Lensink, 2007). Batas akses didefinisikan sebagai penggunaan maksimum yang paling mungkin di bawah persyaratan-persyaratan struktural yang ada yang mencakup teknologi, infrastruktur dan regulasi.

Batas akses akan meluas hingga pengembangan pasar bergerak menuju fase konsolidasi dan kejenuhan, di mana pasar mencapai batas alamiahnya. Penggunaan telah berada pada titik maksimalnya, dan yang tidak digunakan menjadi pilihan yang alamiah yang dibatasi oleh kendala pendapatan atau suplai. Aliran masuk remitansi dapat menggeser batas akses menuju ke luar dengan menghilangkan alasan-alasan untuk tidak menggunakannya.

Aliran masuk remitansi dapat berfungsi sebagai substitusi bagi suatu pekerjaan atau pendapatan karena remitansi dalam banyak kasus dikirim untuk memenuhi kebutuhan suatu keluarga, maka aliran masuknya kebanyakan bersifat reguler, sehingga dapat dipandang sebagai pendapatan reguler. Juga ketika seorang anggota keluarga bermigrasi, pendapatan keluarganya cenderung meningkat, sehingga mengurangi persoalan efek pendapatan dari kepemilikan suatu rekening bank. Kondisi ini membuat para penerima remitansi menjadi nasabah yang menarik bagi perbankan. Jika kendala terhadap perbankan, baik pada sisi permintaan maupun penawaran, dapat dihilangkan, maka para penerima remitansi internasional dapat memicu pergerakan batas akses ke luar.

Para penerima menjadi nasabah bank yang potensial dan mereka sendiri akan mempunyai kebutuhan yang lebih besar untuk menggunakan layanan perbankan. Efek ini akan sangat bergantung pada kemampuan dan keinginan perbankan untuk beradaptasi. Jika bank-bank tertarik dengan aliran masuk remitansi dari luar negeri, maka paket-paket produk mereka harus diperluas, yaitu dengan menawarkan transaksi internasional yang berbiaya murah atau bahkan gratis bagi nasabah-nasabah yang memiliki rekening di bank-bank yang bersangkutan.

Pemerintah dapat menciptakan suatu sektor keuangan dan perekonomian yang lebih inklusif melalui kebijakan yang mengintegrasikan para pengirim remitansi ke dalam perekonomian formal. Mereka dapat meningkatkan pendalaman keuangan dari perekonomian dan memperbaiki pemantauan aliran-aliran keuangan. Pemerintah dapat mempengaruhi akses terhadap layanan keuangan formal di suatu negara dengan menstimulir pengiriman remitansi melalui jalur-jalur formal. Hal ini akan menghubungkan para migran dan penerima remitansi dengan beragam lembaga keuangan serta dapat meningkatkan permintaan dan penawaran produk-produk keuangan lainnya.

Pemerintah di berbagai negara dapat mendorong transfer melalui jalur-jalur formal dengan menghilangkan pajak terhadap remitansi yang masuk, melonggarkan pengendalian nilai tukar dan modal, memungkinkan bank-bank domestik beroperasi di luar negeri, menyediakan identitas bagi para migran, mendukung asosiasi-asosiasi di dalam negeri, menawarkan skema pinjaman/pensiun dan surat berharga yang mentargetkan diaspora, serta secara aktif mendorong diaspora untuk membantu memastikan kesejahteraan warga negara di luar negeri. Pemerintah juga perlu mengedukasi penduduk bahwa manfaat-manfaat dan proses-proses yang dilakukan pada lembaga-lembaga keuangan dapat meningkatkan permintaan terhadap layanan keuangan formal.

Upaya-upaya tersebut akan membuat beragam lembaga keuangan lebih tertarik untuk memasuki pasar remitansi dan mendorong nasabahnya mengirimkan uang melalui jalur-jalur formal. Namun, terdapat dua isu yang menjadi perhatian pada pengiriman remitansi melalui jalur formal, yaitu persyaratan identifikasi migran serta regulasi mengenai pencucian uang dan pembiayaan teroris. Status imigrasi yang valid seringkali menjadi masalah dalam menggunakan jalur formal untuk mengirimkan dana remitansi. Para migran yang tidak memiliki status resmi tidak memenuhi syarat untuk membuka rekening bank di luar negeri atau menggunakan sistem perbankan untuk mentransfer dananya.

Inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan ini dapat dijumpai pada banyak hasil penelitian empirik di berbagai negara. Dari berbagai faktor yang mendukung inklusi keuangan, terdapat remitansi yang berkontribusi positif. Namun, remitansi terbukti tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Remitansi menstimulasi inklusi keuangan, dan melalui jalur ini, sekaligus menstimulasi pertumbuhan pendapatan per-kapita.

## Tujuh REGULASI INKLUSI KEUANGAN

*“Poor regulation is one of the major obstacles to financial inclusion”* (Claessens dan Rojas-Suarez, 2016). Kendala lainnya adalah minimnya infrastruktur yang baik, lembaga yang lemah dan kerjasama yang buruk, serta kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil. Terdapat dua alasan untuk membahas isu regulasi yang terkait dengan inklusi keuangan. *Pertama*, perubahan regulasi seringkali dibutuhkan untuk memungkinkan berhasilnya adopsi dan adaptasi dari inovasi-inovasi baru di bidang keuangan digital. Perubahan regulasi juga dapat mendorong penggunaan keuangan digital dan meningkatkan persaingan di antara penyedia layanan keuangan digital, sehingga teknologi baru tersebut dapat memberikan manfaat bagi penduduk miskin. *Kedua*, kemajuan dalam memperbaiki inklusi keuangan harus sejalan dengan mandat dari regulasi dan supervisi keuangan, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan, mempertahankan integritasnya, dan melindungi konsumen.

Pemerintah dan regulator dapat memainkan peran yang penting dalam inklusi keuangan dengan mengembangkan

kerangka kerja regulasi dan kelembagaan yang tepat. Selain itu, pemerintah juga perlu mendukung ketersediaan informasi dan melakukan langkah-langkah nyata, seperti menyediakan subsidi. Aspek lainnya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah menata transparansi dan operasional bisnis layanan keuangan untuk mengefektifkan mekanisme perlindungan konsumen.

Pengembangan kompetisi yang sehat dapat menjadi kunci dari perlindungan konsumen. Untuk mendukung implementasi potensi layanan keuangan melalui teknologi baru, regulator perlu mengembangkan situasi persaingan di antara para penyedia layanan keuangan, sehingga konsumen memperoleh manfaat dari inovasi-inovasi teknologi yang dilakukan. Posisi regulator dalam konteks ini dapat mempengaruhi model bisnis dan layanan baru yang dijalankan oleh penyedia layanan keuangan.

Strategi inklusi keuangan telah dirumuskan di banyak negara dan menjadi dokumen publik. Strategi ini dikembangkan melalui suatu proses konsultatif yang melibatkan beragam lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil. Lembaga pemerintah yang memimpin penyusunan strategi inklusi keuangan dapat bervariasi antarnegara. Di Indonesia, penyusunan strategi inklusi keuangan dipimpin oleh Kementerian Keuangan dengan didukung sepenuhnya oleh Bank Indonesia dan OJK. Kondisi berbeda dijumpai di Afrika Selatan, Malawi, Zambia, dan Kenya, di mana penyusunan strategi inklusi keuangan di keempat negara tersebut dipimpin oleh Bank Sentral masing-masing. Ciri dari semua strategi inklusi keuangan adalah adanya penetapan target untuk dicapai pada kurun waktu tertentu. Nigeria sebagai contoh, menetapkan target penurunan eksklusi keuangan di kalangan penduduknya berkisar 46-20 persen pada tahun 2020. Sedangkan Pemerintah Indonesia telah menetapkan target inklusi keuangan sebesar 75 persen pada tahun 2019.

Prinsip-prinsip inovasi inklusi keuangan yang diluncurkan oleh para pemimpin G20 pada tahun 2010 ditujukan untuk menciptakan suatu kebijakan dan lingkungan regulasi yang memungkinkan berlangsungnya inovasi. Salah satu prinsip

yang penting adalah implementasi pendekatan kebijakan yang mendorong persaingan dan menyediakan insentif berbasis pasar untuk penyaluran akses keuangan yang berkelanjutan dan penggunaan beraneka ragam layanan yang terjangkau. Penting pula diperhatikan keragaman penyedia layanan, dukungan terhadap inovasi teknologi dan kelembagaan sebagai suatu cara untuk memperluas akses dan penggunaan sistem keuangan, serta perlindungan dan pemberdayaan konsumen untuk mendapatkan kapabilitas dan literasi keuangan.

Pemerintah di lebih dari seratus negara telah mengadopsi prinsip-prinsip inklusi keuangan untuk memandu regulator mereka dalam mempromosikan inklusi keuangan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat pemerintah memainkan peran yang sangat vital dalam mendorong akses universal terhadap layanan keuangan dasar dan inklusi keuangan. Kebijakan untuk memperluas penetrasi kepemilikan rekening, seperti mensyaratkan bank untuk menawarkan pembukaan rekening berbiaya murah atau tanpa biaya, sangat efektif untuk diterapkan. Regulator dapat menekankan kewajiban lembaga-lembaga keuangan untuk melakukan layanan umum dan persyaratan-persyaratan lainnya. Misalnya penyaluran pinjaman pada sektor-sektor prioritas, kewajiban menyediakan kredit bagi UKM, pemberian pinjaman kepada penduduk miskin dengan tingkat bunga yang lebih rendah dan pembayaran kembali yang mudah, serta melarang penolakan penyediaan layanan keuangan dasar pada nasabah miskin dan daerah-daerah tertentu.

Cina telah mengembangkan suatu strategi nasional untuk membangun sistem keuangan inklusif pada tahun 2013 yang lalu. Komisi Regulasi Perbankan Cina memastikan sektor perbankannya menyediakan layanan keuangan minimal di semua kota kecil dan desa dengan meningkatkan jumlah kantor cabang dan mengeksplorasi alternatif inovasi sebagai pengganti fasilitas fisik, termasuk unit-unit bergerak dan ATM. Untuk menyelesaikan persoalan kredit di wilayah perdesaan, Komisi Regulasi Perbankan Cina telah menyetujui pendirian bank-bank

di kota-kota kecil dan desa-desa oleh perbankan maupun koperasi kredit. Mereka mentransformasi Tabungan Pos dan Biro Remitansi menjadi Bank Tabungan Pos dengan mandat mengembangkan produk-produk pinjaman komersial yang layak bagi usaha-usaha di perdesaan, pekerja migran, dan petani. Bank Pos ini menjadi bank kelima terbesar di Cina dengan lebih dari 870 juta rekening.

Peningkatan permintaan layanan keuangan dapat dilakukan melalui perbaikan literasi keuangan, kapabilitas, dan pemberdayaan konsumen. Ruang lingkupnya antara lain melalui edukasi keuangan, yaitu mengelola anggaran keluarga, menyusun perencanaan kegiatan, memilih produk-produk keuangan yang sesuai, dan transfer remitansi. Kapabilitas, pengetahuan, dan ketrampilan keuangan dapat ditingkatkan melalui kebijakan yang dirancang dengan baik dan tepat sasaran. Promosi literasi dan edukasi keuangan yang efektif membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dengan dipimpin secara aktif oleh pemerintah melalui peran koordinasi dan pendukung.

Dalam konteks yang lebih luas, kerangka kerja regulasi inklusi keuangan terkait pula dengan liberalisasi perdagangan. Regulasi bagi perusahaan asing khususnya telah menjadi isu yang hangat dibicarakan ketika bank-bank asing mulai memasuki pasar keuangan domestik di suatu negara. Oleh karena itu, upaya liberalisasi perdagangan perlu mengkoordinasi dan mensinkronisasi regulasi-regulasi domestik dengan cermat untuk mempromosikan inklusi keuangan.

Di kawasan Asia Tenggara, inklusi keuangan telah lama menjadi agenda dari *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Perhatian utama terkait dengan upaya meningkatkan akses terhadap layanan keuangan bagi kelompok marjinal, khususnya pinjaman, asuransi, dan remitansi. Atensi lainnya adalah pengembangan berbagai instrumen dan produk keuangan inovatif bagi penduduk miskin. Negara-negara ASEAN juga ingin memperkuat perlindungan konsumen dan mendorong literasi keuangan.

Lansekap regulasi keuangan global pada dasarnya sedang berada pada proses pembentukan kembali dengan pergeseran

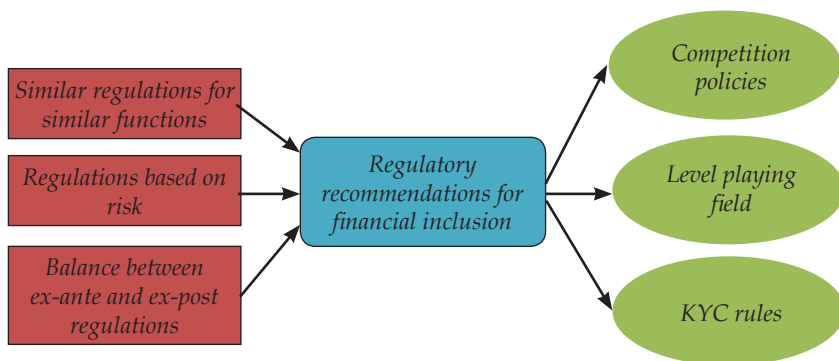


fokus regulasi pada tujuan-tujuan *macroprudential*. Agenda reformasi yang utama adalah memperkuat modal bank dan standar likuiditas di bawah Basel III yang antara lain terdapat upaya yang terkait dengan inklusi keuangan. Aspek yang menjadi perhatian adalah mengenakan bobot risiko yang lebih tinggi pada kepentingan minoritas di bank-bank pada pasar di negara-negara tumbuh cepat dan aset jangka pendek. Di samping itu, aturan-aturan baru dipandang dapat menjadi kendala bagi investasi antarnegara serta penyaluran pinjaman kepada UKM dan proyek keuangan.

Menentukan pendekatan regulasi yang terbaik bagi keuangan secara umum sangat menantang, karena aturan-aturan yang dibuat akan merefleksikan ciri dari setiap layanan keuangan yang spesifik serta risiko yang timbul dari bentuk-bentuk alternatif penyediaan layanan keuangan. Tantangan ini menjadi lebih besar untuk keuangan digital di antara banyaknya bentuk dan penyedia layanan keuangan yang tersedia. Beragam kebijakan dan regulasi akan bervariasi dalam hal jumlah dan dimensinya untuk membantu memastikan penyaluran layanan keuangan yang efisien yang juga aman bagi para penggunanya serta sistem keuangan secara keseluruhan.

Claessens dan Rojas-Suarez (2016) menuliskan tiga prinsip berikut ini yang harus dipenuhi untuk suatu regulasi yang pro inklusif.

1. Regulasi yang sama untuk fungsi yang sama. Layanan keuangan yang menyediakan fungsi-fungsi yang sama diatur dengan cara yang sama untuk semua bentuk kelembagaan penyedia layanan keuangan.
2. Regulasi berbasis pada risiko. Kekakuan persyaratan regulasi sepadan dengan risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas seorang konsumen atau penyedia layanan keuangan, serta terhadap stabilitas dan integritas sistem keuangan.
3. Keseimbangan di antara regulasi *ex ante* dan *ex post*. Keseimbangan di antara aturan-aturan main yang jelas (*ex ante*) dan menggunakan otoritas untuk mengintervensi (*ex post*) setelah dapat diidentifikasi suatu persoalan atau kegagalan pasar.



**Gambar 7.1. Prinsip-Prinsip Regulasi Pro Inklusif**

Sumber: Claessens dan Rojas-Suarez (2016).

Suatu pasar yang terbuka terhadap persaingan yang adil sangat penting bagi inklusi keuangan, karena akan menghasilkan variasi produk dan layanan yang lebih banyak serta meningkatkan efisiensi dan biaya yang lebih rendah. Sebagai konsekuensinya, konsumen-konsumen yang berpotensi tetapi masih berada di pinggiriran dapat dengan mudah masuk ke dalam sistem keuangan. Tujuan utama kebijakan persaingan adalah untuk memungkinkan dan mendorong para penyedia layanan keuangan yang baru untuk memasuki pasar.

Dengan berbagai perbedaan yang ada, maka aturan memasuki pasar harus dibedakan di antara para pemain tradisional, seperti perbankan dan non bank, dengan penyedia layanan keuangan yang berbasis digital. Untuk para penyedia layanan keuangan tradisional, izin memasuki pasar seharusnya didasarkan pada persyaratan keseuaian dan kelayakan yang standar. Jika mereka dapat memenuhinya, dan selama terdapat kerangka kerja regulasi, supervisi, dan perlindungan konsumen yang kuat, maka bank-bank seharusnya tidak menghadapi masalah untuk memasuki pasar dan menawarkan layanannya.

Untuk para penyedia layanan keuangan berbasis digital, aturan memasuki pasar seyogyanya digantungkan pada layanan yang ditawarkan. Mereka yang menawarkan layanan sejenis bank harus memenuhi persyaratan kesesuaian dan kelayakan standar

yang sama dengan perbankan. Sedangkan bagi mereka yang membatasi aktivitas retailnya pada pembayaran dan transfer atau yang menawarkan penyimpanan nilai yang didukung oleh aset-aset yang aman (seperti surat berharga pemerintah atau aset-aset likuid lainnya), maka standar yang dikenakan seharusnya relatif lebih rendah dan izin masuk menjadi lebih bebas. Mengapa? Karena aktivitas yang dilakukan hanya memunculkan sedikit risiko bagi konsumen dan sistem keuangan secara keseluruhan. Pada semua kasus, lisensi harus diberikan hanya kepada penyedia layanan keuangan yang mampu membuktikan kemampuan teknis dan keuangannya untuk memastikan kualitas layanan yang ditawarkan.

Suatu lahan untuk beroperasi bagi penyedia layanan keuangan (*level of playing field*) dimungkinkan oleh regulasi untuk memastikan bahwa layanan keuangan yang berfungsi sama diperlakukan dengan sama pula sepanjang mereka memunculkan risiko yang sama bagi konsumen yang dilayani atau terhadap sistem keuangan. Dikarenakan wilayah operasi sangat penting untuk memastikan, semua penyedia layanan keuangan bersaing pada tataran yang adil. Perlakuan yang sama berdasarkan layanan sangat bermakna bagi inklusi keuangan karena memungkinkan suatu perlindungan konsumen yang lebih konsisten di antara para penyedia layanan. Upaya ini akan membantu memperluas batas pasar bagi layanan keuangan dan akhirnya layanan keuangan digital akan menghasilkan inklusi keuangan yang lebih besar. Selain itu, penataan wilayah operasi akan mengurangi kemungkinan terjadinya arbitrase regulasi dan gangguan-gangguan lainnya.

Tugas lainnya dari regulasi keuangan adalah untuk menjaga integritas dari sistem keuangan, khususnya dalam memberantas pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Lembaga-lembaga keuangan karena perlu mengetahui dengan siapa mereka berhubungan. Suatu sistem keuangan dengan konsumen tanpa nama dapat mendatangkan penyalahgunaan dan korupsi serta berpotensi membahayakan stabilitas keuangan. Pengetahuan

mengenai seorang konsumen juga penting bagi inklusi keuangan, karena lembaga-lembaga keuangan yang tidak mengetahui nasabahnya kemungkinan kurang berminat untuk memperluas layanannya bagi nasabah.

Akan tetapi, upaya mencapai integritas keuangan dan inklusi keuangan terkadang mendatangkan konflik. Dengan demikian, tantangannya adalah menciptakan aturan mengenai *know your customer* (KYC) yang memadai untuk mempertahankan integritas keuangan dan tidak menciptakan halangan-halangan yang tidak diperlukan bagi inklusi keuangan. Aturan KYC justru harus mampu memperkuat inklusi keuangan. KYC setidaknya harus dapat mengenali risiko minimal dari transaksi-transaksi bernilai kecil.

Kebanyakan para pembuat kebijakan memandang inklusi keuangan sebagai suatu cara untuk mengurangi kemiskinan dan mempercepat penyebaran kesejahteraan bagi masyarakat. Faktanya, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan memang dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perluasan kredit yang berlebihan kepada para peminjam yang tidak layak dan pelanggaran standar persyaratan kredit dapat menyebabkan ketidakstabilan.

Sebagaimana ditunjukkan oleh *sub-prime crisis* di Amerika Serikat pada tahun 2007 dan krisis keuangan mikro di India pada tahun 2010, perluasan akses terhadap layanan keuangan yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan ketidakpuasan masyarakat apabila tanpa supervisi dan regulasi yang tepat. Ciri umum dari kedua krisis tersebut adalah lembaga-lembaga keuangan dapat melaporkan keuntungan yang tinggi selama beberapa tahun melalui pertumbuhan penyaluran pinjaman yang pesat, tetapi situasi ini menciptakan kelebihan hutang di kalangan para peminjam yang tidak layak, sehingga berkontribusi terhadap ketidakstabilan keuangan dan ketidakpuasan sosial. Memperhatikan hal ini, maka tat kala

pembuat kebijakan nasional semakin mengenali kebijakan-kebijakan yang mendorong inklusi keuangan, para regulator lebih berhati-hati terhadap inklusi keuangan karena risiko kredit yang semakin tinggi dan minimnya pencatatan yang terkait dengan para peminjam berskala kecil (ESCAP, 2017).

Upaya untuk mendorong inklusi keuangan melahirkan banyak tantangan bagi regulator keuangan dan membutuhkan respons kreatif untuk menjawabnya. Tantangan kuncinya adalah bagaimana mencapai tujuan inklusi keuangan, seperti melalui penyediaan layanan keuangan dasar bagi penduduk miskin sembari menjaga stabilitas sistem keuangan. Pendekatan regulasi yang proporsional merupakan mekanisme yang sangat esensial bagi pengembangan inklusi keuangan dengan tidak mengabaikan stabilitas keuangan. Pendekatan yang dimaksud menyeimbangkan antara risiko dan manfaat dari inklusi keuangan dengan biaya regulasi dan supervisi.

Langkah pertama menuju inklusi keuangan adalah kepemilikan rekening pada lembaga jasa keuangan. Ketergantungan bank terhadap pembiayaan yang bukan inti dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penggunaan rekening dan keragaman basis depositor. Dalam catatan ESCAP (2017), setiap peningkatan dalam akses terhadap simpanan di bank dapat menurunkan keinginan untuk mencairkan simpanan. Para penabung yang berpendapatan rendah cenderung untuk menjaga perilaku keuangan yang tetap melalui siklus ekonomi dalam bentuk mempertahankan simpanannya. Dengan demikian, upaya memperluas akses terhadap simpanan dengan memasukkan para penabung yang berpendapatan rendah akan cenderung meningkatkan stabilitas tabungan yang akan memperkuat kondisi likuiditas bank dalam periode sulit. Krisis global yang baru saja berlalu menunjukkan bahwa perbankan yang tidak bergantung pada sumber-sumber dana retail (berskala kecil) yang stabil, tetapi pada pembiayaan berskala besar, mengalami kesulitan untuk mengakses pasar pembiayaan berskala besar, sehingga menyebabkan krisis likuiditas selama berlangsungnya krisis keuangan global.

Penggunaan rekening formal dalam jumlah yang besar juga dapat memperbaiki efisiensi proses intermediasi di antara tabungan dan investasi dengan mengurangi biaya kredit dan memfasilitasi perluasan bisnis melalui peningkatan ketersediaan simpanan berbiaya rendah. Lebih jauh lagi, karena segmen rumah tangga dan usaha kecil yang belum terlayani oleh lembaga keuangan masih cukup banyak, maka peningkatan penggunaan rekening formal dapat memperbaiki transmisi kebijakan moneter. Inklusi yang lebih tinggi akan mendorong konsumen untuk memindahkan simpanan mereka dari aset-aset fisik dan tunai menjadi tabungan dan membantu lebih banyak konsumen untuk memperlancar konsumsi mereka dari waktu ke waktu. Situasi ini membuat tingkat bunga menjadi alat kebijakan yang lebih efektif dan dapat memfasilitasi upaya bank sentral untuk menjaga stabilitas harga.

Berarti bahwa penggunaan rekening formal yang lebih besar memiliki dampak positif terhadap stabilitas dan efisiensi keuangan. Ketika kebanyakan negara dengan penetrasi rekening yang tinggi mempunyai risiko stabilitas keuangan yang lebih kecil, negara-negara dengan penetrasi rekening yang rendah memiliki efisiensi lembaga keuangan yang rendah pula. Penetrasi rekening oleh karenanya dapat didorong dari perspektif stabilitas keuangan.

Namun, data penetrasi rekening belum menggambarkan fenomena inklusi keuangan yang utuh. Sebagai contoh, jumlah agregat rekening bank tidak sama dengan jumlah penabung, karena beberapa individu dapat memiliki lebih dari satu rekening. Beberapa rekening lainnya dapat bersifat tidak aktif. Menurut data IMF, banyak penduduk di negara maju yang memiliki rekening bank ganda, sementara di negara-negara yang terbelakang, hanya terdapat dua rekening untuk setiap 10 orang.

Banyak rintangan yang menghalangi masyarakat untuk membuka suatu rekening di lembaga-lembaga keuangan. Misalnya, *fee* pembukaan rekening yang tinggi, persyaratan dokumen yang merepotkan, jarak perjalanan, kendala legal, dan kegagalan pasar lainnya. Meskipun demikian, terdapat peningkatan perhatian

bahwa kebanyakan rintangan yang membatasi akses terhadap layanan keuangan dapat diatasi melalui kerangka kerja regulasi yang dirancang dengan baik. Untuk memperluas kepemilikan rekening, kerangka kerja regulasi diharapkan dapat memfasilitasi perluasan kepemilikan rekening, seperti melalui pemberian lisensi kepada agen-agen bank, memperkenalkan persyaratan dokumen yang sederhana, mensyaratkan bank untuk menyediakan rekening dasar atau berbiaya rendah, dan mengizinkan evolusi teknologi baru, seperti *mobile money*.

Terdapat sejumlah tantangan bagi regulator untuk menciptakan kerangka kerja regulasi yang dapat memfasilitasi penetrasi rekening. Misalnya, regulator harus merancang persyaratan dokumen dengan cermat, sehingga tidak mencegah masyarakat untuk membuka suatu rekening di lembaga keuangan tertentu dengan mempertimbangkan keamanan yang berhubungan dengan pencucian uang. Dengan cara yang sama, regulator harus memperhatikan keseimbangan di antara menyediakan insentif untuk pengembangan teknologi baru yang dapat menimbulkan risiko sistemik bagi perekonomian dengan menjaga kestabilan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan regulasi yang proporsional yang menyeimbangkan biaya dan manfaat dari regulasi yang berhubungan dengan stabilitas keuangan, integritas, dan inklusi.





## Delapan PENUTUP

**I**nkłusi keuangan perlu dipahami dengan baik agar berbagai pihak yang terkait dengannya memiliki perspektif yang paripurna mengenai konsep maupun praktiknya di lapangan. Perbaikan inklusi keuangan tidak cukup dimaknai sebagai telah teraksesnya seseorang atau kelompok tertentu terhadap produk dan layanan dari lembaga jasa keuangan. Apalagi sekedar dilihat dari kepemilikan rekening pada suatu bank.

Peningkatan inklusi keuangan yang ideal, apabila masyarakat tidak hanya terakses kepada lembaga jasa keuangan, seperti terlihat dari kepemilikan rekening pada perbankan atau memiliki paket layanan asuransi, tetapi lebih jauh lagi dapat memanfaatkan akses tersebut untuk memperbaiki pendapatan dan kesejahteraannya. Inklusi keuangan yang optimal juga tergambar dari semakin terlayannya penduduk yang miskin, berpendapatan rendah, atau yang mendiami kawasan terpencil. Mereka harus memiliki kesempatan untuk hidup secara produktif, sehingga mampu berkontribusi pada perekonomian dan pembangunan.

Memang, upaya meningkatkan inklusi keuangan menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Keterbatasan pemahaman (literasi keuangan) dan infrastruktur dasar masih menjadi kendala untuk memperbaiki kondisi inklusi keuangan di

banyak negara. Selain itu, kebijakan dan regulasi di negara-negara yang berkembang dan terbelakang pun masih belum sepenuhnya kondusif untuk mendukung upaya peningkatan inklusi keuangan di kalangan penduduknya.

Pemerintah di hampir seluruh negara di dunia telah menyusun strategi untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan penduduk di negaranya masing-masing. Strategi ini senantiasa dilengkapi dengan target-target untuk dicapai pada kurun waktu tertentu. Akan tetapi, implementasi dari strategi yang disusun dengan menghabiskan sumber daya yang cukup besar seringkali tidak atau belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Di tengah-tengah fenomena yang diuraikan di atas, hadir teknologi informasi yang memasuki ranah keuangan. Penerapan teknologi informasi pada sektor keuangan membuat berbagai produk dan layanan keuangan dapat dijalankan dengan semakin efektif (cepat dan mudah) dan efisien (murah). Kendala keterbatasan jangkauan yang dihadapi dalam pendekatan layanan keuangan konvensional dapat teratasi, sehingga semakin banyak penduduk yang dapat mengakses produk dan layanan keuangan berbasis teknologi digital. Dengan bantuan teknologi informasi, maka terbangun optimisme bahwa perbaikan inklusi keuangan dapat berlangsung secara sistematis dan lebih cepat, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap penguatan sistem keuangan dan penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrams, Jeff, Maelis Carraro, dan Wajiha Ahmed, 2017. *Alternative Delivery Channels for Financial Inclusion: Opportunities and Challenges in African Banks and Microfinance Institutions 2016*. The MasterCard Foundation dan Bankable Frontier Associates (BFA).
- AFI, 2010. Consumer Protection: Leveling the Playing Field in Financial Inclusion. *Policy Note*.
- Aras, Alper, 2017. Financial Regulatory Issues for Financial Inclusion. *Paper*, dipresentasikan pada The 4<sup>th</sup> High-Level Dialogue on Financing for Development in Asia and the Pacific, April. Macroeconomic Policy and Financing for Development Division, UN-ESCAP.
- Anonim, 2016. Digital Financial Inclusion. *Issue Brief Series*. International Telecommunication Union (ITU).
- Anonim, 2016. Interoperability as a Means to Financial Inclusion. *Ericsson White Paper*, November. Ericsson.
- Anzoategui, Diego, Asli Demirguc-Kunt, dan Maria Soledad Martinez Peria, 2011. Remittances and Financial Inclusion: Evidence from El Salvador. *Policy Research Paper 5839*. Finance and Private Sector Development Team, Development Research Group, World Bank.

- Asian Development Bank, 2016. *Financial Inclusion in the Digital Economy*. Manila.
- Banco Central Do Brasil, 2010. *Report on Financial Inclusion*, Number 1.
- Bank for International Settlements, 2015. *Range of Practice in the Regulation and Supervision of Institutions Relevant to Financial Inclusion*.
- Borio, C., 2011. Implementing a Macroprudential Framework: Blending Boldness and Realism. *Capitalism and Society*, Vol. 6(1): Article 1.
- Cheston, Susy, Tomas Conde, Arpitha Bykere, dan Elisabeth Rhyne, 2016. *The Business of Financial Inclusion: Insights for Banks in Emerging Markets*. Center for Financial Inclusion, Institute of International Finance.
- Claessens, Stijn dan Liliana Rojas-Suarez, 2016. *Financial Regulations for Improving Financial Inclusion*. Task Force on Regulatory Standards for Financial Inclusion, Center for Global Development.
- Committee on the Global Financial System, 2010. Macroprudential Instruments and Frameworks: A Stocktaking of Issues and Experiences. *CGFS Papers No. 38*. Basel: Bank for International Settlements.
- Demirguc-Kunt, Asli, Leora Kappler, Dorothe Singer, dan Peter Van Oudheusden, 2015. The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World. *Policy Research Working Paper 7255*. Washington, DC: World Bank.
- Enclude, 2016. *Beyond Inclusion: A Strategic Approach to Investing in Financial Capability*. JP Morgan Chase & Co.
- European Central Bank, 2012. What is Financial Stability? *Financial Stability Review*. Frankfurt.
- FATF, 2011. Anti-money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion. *FATF Guidance*. APG, World Bank, dan FATF-GAFL.
- International Fund for Agricultural Development dan World Bank Global Partnership for Financial Inclusion, 2015. The

- Use of Remittances and Financial Inclusion. *Laporan kepada G20 Global Partnership for Financial Inclusion*, September. G20 Financial Inclusion Experts Group, 2010. Innovative Financial Inclusion. *ATISG Report*, May.
- Hannig, A. Dan S. Jansen, 2010. Financial Inclusion for Financial Stability: Current Policy Issues. *ADB Working Paper 259*. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
- International Telecommunication Union, 2016. Digital Financial Services: Regulating for Financial Inclusion – An ICT Perspective. Bill & Melinda Gates Foundation, Telecommunication Development Sector.
- Joshi, Deepali Pant, 2011. Financial Inclusion & Financial Literacy. *Paper*. BI OECD Seminar – Roundtable on the Updates on Financial Education and Inclusion Programme in India, June 28.
- Kalegama, Saman dan Ganga Tilakaratna, 2014. Financial Inclusion, Regulation, and Education in Sri Lanka. *ADB Working Paper Series No. 504*, November. Tokyo: ADB Institute.
- Kashiwagi, Ryoji, 2016. FinTech is Key Driver of Financial Inclusion. *Iakyara* Vo. 248. Nomura Research Institute, Ltd.
- Magaldi de Sousa, Mariana, 2015. Financial Inclusion and Global Regulatory Standards: An Empirical Study Across Developing Economies. *Paper No. 7*, March, New Thinking and the New G20 Series. Center for International Governance Innovations (CIGI).
- Mashayekhi, Mina, 2015. Remittances and Financial Inclusion. *Paper* dipresentasikan pada Thirteenth Coordination Meeting on International Migration, New York, 12-13 Februari. UNCTAD.
- McKinsey Global Institute, 2016. *Digital Financ for All: Powering Inclusive Growth in emerging Economies*. McKinsey&Company.
- Mehrotra, Aaron dan James Yetman, 2015. Financial Inclusion – Issues for Centra Banks. *BIS Quarterly Review*, March.

- Mertz, Robert (Editor), 2010. *Global Financial Inclusion: Achieving Full Financial Inclusion at the Intersection of Social Benefit and Economic Sustainability*. McKinsey & Company.
- Morgan, Peter J. dan Pontines Victor, 2014. Financial Stability and Financial Inclusion. *Paper*, JFSA-ADBI-IMF Joint Conference, January 24, Tokyo.
- Morgan, Peter J. dan Victor Pontines, 2014. Financial Stability and Financial Inclusion. *Working Paper Series* No. 488, July. Asian Development Bank Institute (ADBI).
- Orozco, Manuel dan Julia Yansura, 2015. Remittances and Financial Inclusion: Opportunities for Central America. *Inter-American Dialogue*, February.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2017. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*. Jakarta.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- Rajendran, K., 2013. Financial Inclusion, Financial Exclusion and Inclusive Growth. *SSRN Electronic Journal*, April.
- Sahay, Ratna, Martin Cihak, Papa N'Diaye, Adolfo Barajas, Srobona Mitra, Annette Kyobe, Yen Nian Mooi, dan Seyed Reza Yousefi, 2015. Financial Inclusion: Can It Meet Multiple Macroeconomic Goals? *IMF Discussion Note*, SDN/15/17, September.
- Select Committee on Financial Exclusion, 2017. Tackling financial exclusion: A country that works for everyone? *Report of Session 2016–17*. House of Lords.
- Schinasi, G., 2004. Defining Financial Stability. *IMF Working Paper* WP/04/187. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Todoroki, Emiko, Wameek Noor, Kuntay Celik, dan Anoma Kulathunga, 2014. *Making Remittances Work: Balancing Financial Integrity and Inclusion*. Washington, D.C.: World Bank.

- Toxopeus, Helen S. Dan Robert Lensink, 2007. Remittances and Financial Inclusion in Development. *Research Paper* No. 2007/49, August. United Nations University-World Institute for Development Economic Research (UNU-WIDER).
- UNCTAD, 2015. Access to Financial Services as a Driver for the Post-2015 Development Agenda. *Policy Brief*, No. 35, September. UNCTAD.
- Wolff, Peter, 2013. The G-20 and Financial Regulation in Africa. *Policy Briefing* 78. Economic Diplomacy Programme.
- World Bank, 2012. *Financial Inclusion Strategies – Reference Framework*. Dipersiapkan untuk G20 Mexico Presidency.
- Yoo, Tae, 2017. *Point of View: Digitizing Financial Inclusion*. San Jose: CISCO.
- Zwedu, Getnet, Alemu, 2014. Financial Inclusion, Regulation and Inclusive Growth in Ethiopia. *Working Paper* 408. Overseas Development Institute (ODI).





## TENTANG PENULIS



**ROBERTO AKYUWEN** lahir di Ambon, Maluku pada 19 Maret 1970. Menamatkan pendidikan Strata-1 (Sarjana) di Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada (1993) dan Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka (2002). Selanjutnya, gelar Strata-2 (Master) diperoleh dari Program Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada (2007) dan jenjang pendidikan Strata-3 (Doktor) diraih dari Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (2003) dengan *supervisory research* di State University of New York (SUNY) at Albany, New York. Telah menulis cukup banyak artikel, baik yang bersifat populer maupun akademis, yang dimuat di berbagai media publikasi dan jurnal di dalam dan luar negeri. Karir di dunia kerja sangat beragam, yaitu mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, hingga menjadi Dosen pada perguruan tinggi dan konsultan pada lembaga asing. Saat ini, bekerja sebagai Analis Eksekutif Senior pada Deputy Komisioner Pengawas Perbankan 4, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aktivitas lainnya yang masih terus dijalankan adalah menjadi peneliti, *reviewer* jurnal, moderator dan pembicara pada berbagai seminar dan diskusi berskala nasional maupun internasional.



**JAKA WASKITO** lahir di Klaten, Jawa Tengah pada 24 Oktober 1967. Lulus Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Yogyakarta di tahun 1993 dan menyelesaikan Program S2 di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada tahun 2003 dengan Konsentrasi Manajemen Keuangan.

Saat ini sedang menempuh studi S3 (Doktor) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada dengan konsentrasi yang sama. Menjadi dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal sejak tahun 1996 sampai sekarang. Jabatan struktural yang pernah diemban adalah Ketua Jurusan Manajemen (1997-1998), Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan (1999-2001), Ketua Program Studi Manajemen (2003-2006), Wakil Dekan I (2007-2011), Wakil Dekan III (2011-2013), dan Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana (2014 – sekarang). Perolehan Jabatan Fungsional Akademik Asisten Ahli Madya (1998), Asisten Ahli (2001), Lektor (2003) dan Lektor Kepala (2007). Aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Pernah memberikan Pelatihan Pengelolaan Program Jaminan Sosial, Pengelolaan Program Bantuan Sosial, Teknik Kaji Bersama Akar Rumput (JISAMAR), Pengelolaan Program Tabungan Sosial, dan Kemiskinan. Menjadi Anggota Dewan Pengupahan Kota Tegal sejak tahun 2007 sampai sekarang.

# Indeks

## Symbols

1 September 2016 6

## A

Aktivitas nasabah 70

appropriate 9, 20, 21

Asia Timur dan Pasifik 28, 30,  
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  
42, 43, 44

Association of Southeast Asian  
Nations xiii, 102

asuransi 2, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 54,  
60, 62, 67, 70, 102, 111

auto teller machine 14

## B

bancassurance 54

Banco de Crédito del Perú 4

bankable 10

bank sentral 5, 18, 19, 77, 78, 79,  
80, 108

big data 25, 59

Bill & Melinda Gates Foundation  
26, 115

Boston Consulting Group 63

BPJS Kesehatan 47, 49, 50

branchless banking 5

## C

Chief Executive Officer 4

Claessens dan Rojas-Suarez  
(2016) 103, 104

cloud 58

consumer-centric approach 59

consumption smoothing 76

core inflation 77

cost effective 10

cost-effective 89

credit union 28, 91

Credit Union 94

cross-border 86

cross sectional 75

## D

delivery channel 52

Digitalisasi 25, 60, 63, 68

direct correlation 2, 85

## E

emerging economies 65

enabler 24

European Central Bank xiii, 74,  
114

ex ante 103

ex post 103

## F

fee 108  
financially excluded 19, 59  
financial technology 25, 59  
fintech 25, 59, 67

## G

G20 Financial Inclusion Experts  
Group 11, 115  
G20 High Level Principles for  
Digital Financial Inclusion  
24  
Gallup World Poll 26  
Global Findex 26, 27, 29, 31, 35,  
38, 40, 41, 43, 114  
Global Findex 2014 26, 27, 29, 31,  
35, 38, 40, 41, 43  
gross national income 27

## H

Hans dan Deepika (2011) 10

## I

IFAD xiii, 85, 86, 87  
Indonesia vi, vii, ix, xi, 4, 6, 21,  
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,  
50, 51, 52, 53, 54, 55, 63,  
100, 116, 120  
industri jasa keuangan 5, 6  
inklusi keuangan v, vi, 2, 3, 4, 5,  
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,  
34, 36, 37, 41, 44, 45, 48, 49,  
50, 51, 52, 55, 57, 60, 62, 63,  
64, 65, 69, 70, 73, 74, 76, 77,  
78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86,  
87, 90, 93, 95, 98, 99, 100,  
101, 102, 103, 104, 105, 106,  
107, 108, 111, 112

Inklusi keuangan 3, 4, 8, 9, 13,  
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
24, 62, 63, 73, 76, 81, 82, 97,  
111

inklusi keuangan syariah 45, 51,  
52

Interaksi 1

International Telecommunication  
Union xiii, 69, 113, 115

internet banking 25

## J

Joshi (2011) 14

## K

Kenya 59, 90, 100  
know your customer 106  
kontrak eksklusif 88, 89  
kredit 2, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18,  
23, 26, 33, 38, 40, 41, 42, 43,  
64, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 78,  
79, 80, 81, 83, 84, 90, 91, 92,  
93, 94, 95, 101, 102, 106,  
107, 108

## L

lembaga jasa keuangan 2, 23, 54,  
107, 111  
lembaga pemerintah 5, 100  
level of playing field 105  
Levine (1998; 1999) 9  
likuiditas 103, 107  
literasi keuangan 3, 4, 5, 6, 12,  
36, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52,  
55, 62, 101, 102, 111

## M

macroprudential 102  
Mashayekhi (2015) 87, 88  
McKinsey Global Institute (2016)  
64, 65, 67  
Megaldi de Sousa (2015) 2

Mehrota dan Yetman (2015) 18  
 Merz (2010) 13  
 mobile banking 5, 25, 63  
 mobile financial services 69  
 mobile money 15, 19, 28, 29, 69,  
 70, 90, 109  
 mobile money platform 70  
 mobile phone 5  
 mobile remittances 90  
 month-to-month swings 79

## N

Nomor 76/POJK.07/2016 21,  
 116  
 non-performing loan 74  
 NPL xiii, 74, 80

## O

OJK xiv, 6, 21, 44, 45, 46, 47, 48,  
 49, 50, 51, 52, 53, 54, 100,  
 119  
 online transaction 55  
 Organisation for Economic  
 Cooperation and Develop-  
 ment xiv, 27  
 otoritas jasa keuangan 5  
 Otoritas Jasa Keuangan 6, 116,  
 119  
 outsource 78  
 over-the-counter 30, 31

## P

pasar 10, 11, 13, 16, 17, 20, 47, 50,  
 55, 58, 67, 70, 71, 74, 83, 90,  
 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102,  
 103, 104, 105, 107, 108  
 pembayaran 8, 11, 13, 16, 25, 26,  
 29, 30, 31, 38, 40, 65, 66, 67,  
 68, 69, 70, 80, 89, 91, 92, 93,  
 101, 105  
 perbankan 7, 15, 16, 18, 25, 47,  
 49, 50, 52, 59, 71, 76, 78, 81,

83, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93,  
 96, 97, 101, 104, 105, 107,  
 111

perekonomian digital 57, 63  
 person-to-person payments of  
 relatively low value 86  
 phone banking 54  
 platform 70, 89  
 platform-platform 70  
 polis asuransi 2  
 PUJK xiv, 21, 22

## R

Rajendran (2013) 9  
 remitansi vi, 30, 31, 38, 39, 40,  
 41, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,  
 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,  
 102  
 retail 67, 92, 107

## S

shocks 4, 74, 77  
 smartphone 58  
 sub-prime crisis 18, 106  
 Sustainable Development Goals  
 xiv, 24

## T

tabungan 2, 7, 11, 13, 14, 15, 16,  
 27, 31, 32, 34, 41, 58, 60, 61,  
 62, 64, 67, 75, 76, 77, 86, 91,  
 93, 94, 95, 107, 108  
 Tanzania 90  
 the bottom of the economic pyra-  
 mid 59  
 The Center for Financial Inclu-  
 sion 16  
 The Committee on Global Finan-  
 cial Stability 75  
 time series 75  
 Toxopeus dan Lensink (2007) 93  
 trade-off 77

transaksi over-the-counter 30, 31  
transfer 11, 15, 29, 30, 35, 37, 38,  
39, 40, 41, 70, 81, 87, 88, 89,  
90, 93, 94, 95, 97, 102, 105

## U

Uganda 90  
UMKM xiv, 8, 23, 65  
unbanked 5, 15, 58, 60  
underbanked 5, 60  
United Nations Conference on  
Trade and Development  
xiv, 8

United Nations Organizations  
xiv, 10  
universal access 9, 20  
Universal Financial Access 8, 24

## W

World Bank 8, 20, 24, 26, 58, 85,  
86, 87, 113, 114, 116, 117  
World Bank Group's Universal  
Financial Access 2020 8